



REKOMENDASI PANJA KERJASAMA EKONOMI REGIONAL

Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

**Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

I. Jend. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta 10270
P. +6221 5715 294 | F. +6221 5715 295
E. set_ksr@dpr.go.id | oprbksap@yahoo.com

REKOMENDASI PANJA KERJASAMA EKONOMI REGIONAL



EDISI KEDUA

ISBN 978-602-74746-6-6



9 786027 474666

Rekomendasi Panja Kerjasama Ekonomi Regional

© Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) adalah alat kelengkapan DPR RI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen-parlemen negara lain baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi regional/internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen negara lain.

Lebih lanjut lihat www.dpr.go.id

Semua pertanyaan tentang hak dan izin, termasuk hak-hak tambahan sekaligus saran dan masukan dialamatkan ke:

Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Biro Kerja Sama Antar-Parlemen
Sekretariat Jenderal DPR RI
Gedung Nusantara III Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Indonesia
Telepon +62 21 5175842, +62 21 5715210
Faks +62 21 5715295
Email: set_ksr@dpr.go.id | oprkbksap@yahoo.com

171 halaman; 21cm x 29.7cm

REKOMENDASI PANJA KERJASAMA EKONOMI REGIONAL



Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

TIM PENYUSUN BUKU REKOMENDASI PANJA
KERJASAMA EKONOMI REGIONAL

PENGARAH

Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
Ketua BKSAP DPR RI

Juliari P. Batubara
Wakil Ketua BKSAP/Ketua Panja KER

PENANGGUNGJAWAB

Endah T.D. Retnoastuti

REDAKTUR

Warsiti Alfiah, S.IP., DESS

EDITOR

Warsiti Alfiah, S.IP., DESS
Rd. Anne Widyana, S.S., M.Si.

DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos.

PEMBUAT ARTIKEL

Dewi Amelia Tresna Wijayanti M.A. (DevSt)
Annisa Mariana, M.Si.
Mochamad Ilyas, M.A.

SEKRETARIAT

Keya Muhammad Nur Cahyo, S.Sos
Bowo Hoetomo
Hilda Kurnia Ningsih
Anie Puji Lestari
Ahmadi

REKOMENDASI PANJA KERJASAMA EKONOMI REGIONAL



Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua DPR	8
Kata Sambutan Ketua BKSAP	12
Kata Sambutan Ketua Panja KER	16
Susunan Anggota Panja KER	20
<hr/>	
I. Latar Belakang	
a. Pembentukan Panitia Kerja Kerjasama Ekonomi Regional	23
b. Perkembangan Terkini Kerjasama Ekonomi Regional	25
c. Kerjasama Ekonomi Indonesia Dibagian Perbatasan	50
• ASEAN	
• Non-ASEAN	
<hr/>	
BOX I.	60
Pengalaman Beberapa Provinsi Indonesia	60
▪ Kalimantan Barat	60
▪ Sulawesi Selatan	64
BOX II.	
<i>Best Practices</i> Kerjasama Ekonomi Beberapa Negara	67
▪ Australia	67
▪ Swedia	70
<hr/>	
Rekomendasi	
A. Rekomendasi Khusus Terkait Mekanisme Kerjasama Ekonomi Antar Kawasan	75
B. Rekomendasi Umum	77
Lampiran Laporan Kunjungan Kerja (media covering kegiatan Panja MEA)	82

KATA PENGANTAR KETUA DPR RI



Saya bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas dirampungkannya buku pertama Rekomendasi Panitia Kerja Kerjasama Ekonomi Regional (Panja KER) yang digawangi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini. Saya mengapresiasi rekan-rekan anggota dan pimpinan Panja yang secara aktif berpartisipasi dalam keseluruhan rangkaian kerja-kerja Panja.

Saya juga secara khusus harus memberikan kredit kepada pimpinan BKSAP yang telah menginisiasi pembentukan Panja KER sebagai bentuk tanggung jawab BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang dimandatkan untuk menjadi *focal point* diplomasi DPR RI dalam upaya mendukung diplomasi pemerintah khususnya terkait kerjasama ekonomi regional. Ini sekaligus manifestasi kemitraan strategis DPR dengan pemerintah yang tidak sekadar terkait isu-isu domestik namun juga isu-isu regional dan global.

Tak bisa dipungkiri bahwa saat membicarakan ihwal kerjasama ekonomi regional maka ranah utama diskusi kita tak dapat

terlepas dari agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan sejak Januari 2016. Kendati begitu, kita juga tidak boleh abai terhadap agenda hasil rumusan forum-forum regional lainnya untuk bisa dikapitalisasi bagi kepentingan ekonomi Indonesia seperti forum APEC (*The Asia-Pacific Economic Cooperation*), IORA (*The Indian Ocean Rim Association*) atau ACD (*Asia Cooperation Dialogue*). Intinya, pelbagai agenda forum baik itu regional maupun global harus dioptimalkan untuk memajukan taraf kehidupan rakyat Indonesia bukan malah merugikan mereka. Pada konteks tersebut menjadi sebuah keharusan terjalannya sinergi positif dan efektif serta produktif antara DPR dan

pemerintah serta institusi-institusi relevan lainnya untuk saling bahu-membahu memaksimalkan kerjasama-kerjasama ekonomi regional dan global bagi kemaslahatan bangsa Indonesia.

Sekadar mengingatkan bahwa MEA merupakan agenda kesepakatan regional pembangunan kawasan ASEAN dalam empat pilar, yaitu sebagai wilayah dengan aliran bebas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja; wilayah ekonomi yang kompetitif; wilayah dengan pembangunan yang merata, dan menjadi wilayah yang terintegrasi secara penuh ke dalam ekonomi global. Evaluasi sekitar dua tahun usia perjalanan MEA tampaknya menumbuhkan optimisme bagi Indonesia. Pasalnya, didasarkan pada laporan pemantauan dan evaluasi implementasi cetak biru MEA 2025 dalam Pertemuan *ASEAN Economic Community Council* (AECC) ke-15 yang berlangsung di Manila, Filipina, November 2017 diketahui bahwa Indonesia mencapai persentase tertinggi dalam hal kesiapan dan komitmen dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, yakni sekitar 60 persen versus rata-rata ASEAN yang baru mencapai 52 persen. Lebih jauh optimisme tersebut dikuatkan hasil riset yang dilakukan *Grant Thornton*, sebuah organisasi global penyedia jasa

audit, konsultasi pajak dan *advisory*. Menurut institusi yang berbasis di London tersebut disebutkan bahwa optimisme pelaku bisnis di Indonesia sekitar 72 persen jauh lebih tinggi dibandingkan rerata negara di Asia Tenggara dan Asia Pasifik (APAC) yang keduanya berada di level 58 persen. Tidak bisa disepelekan juga laporan *World Economic Forum (WEF)* yang dirilis pada September tahun lalu. Dalam laporan bertajuk *Global Human Capital Report 2017*, yang mengkaji kualitas SDM di 130 negara berdasarkan sejumlah indikator yang dipakai, Indonesia berada di urutan ke-65, naik tujuh peringkat jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Beberapa hasil riset yang saya kemukakan di atas dimaksudkan untuk terus meningkatkan optimisme dan percaya diri kita di era ketatnya persaingan regional dan global. Namun kita tidak boleh jumawa jika menyimak fakta-fakta riset lainnya. Pertama, meskipun *WEF* menyebut kualitas SDM kita meningkat namun secara rata-rata kualitas SDM kita masih berada di bawah negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (11), Malaysia (33), Thailand (40), dan Filipina (50). Akar rendahnya kualitas SDM kita tidak bisa dilepaskan dari rendahnya kualitas pendidikan kita. *PISA (Programme for International*

Students Assessment) 2015 telah mengevaluasi performa siswa di 69 negara. Hasilnya peringkat Indonesia masih tergolong rendah. Berturut-turut rata-rata skor pencapaian siswa kita untuk sains, membaca, dan matematika berada di peringkat ke-62, ke-61, dan ke-63 dari ke-69 negara yang dievaluasi. Memang ada perbaikan jika dibandingkan dengan 2012, tetapi tidak terlalu signifikan. Siswa Indonesia dapat dikatakan memiliki penguasaan materi yang rendah.

Kedua, daya saing kita berada pada posisi 34 masih berada di bawah Singapura (3), Malaysia (23) dan Thailand (32). Setidaknya itulah hasil temuan *Global Competitiveness Report 2017-2018* yang dirilis belum lama ini. Laporan tersebut mengukur posisi daya saing 137 negara dari hasil survei opini eksekutif dan data statistik yang dikumpulkan. Ketiga, menurut *Indonesia for Global Justice (IGJ)*, sebuah lembaga riset di Indonesia yang berfokus terhadap isu perdagangan bebas global, disebutkan bahwa rata-rata tingkat pemanfaatan yang berhasil dicapai Indonesia terkait pelbagai kesepakatan perdagangan bebas hanya 30%-35%, yakni untuk Asean-FTA hanya 30,43%, Indonesia-Jepang EPA hanya 30,40%, dan India-Asean FTA 5,96%. Tingkat pemanfaatan rendah tersebut, imbuh *IGJ*,

tidak lepas dari rendahnya daya saing Indonesia. Lima area daya saing yang harus segera dibenahi adalah: inovasi, kesiapan teknologi, efisiensi tenaga kerja, infrastruktur dan pendidikan tinggi.

Potret beberapa hasil riset tersebut di atas harus dibaca sebagai capaian dan tantangan sekaligus peluang besar ke depan di era perdagangan yang semakin terbuka dan *borderless*, yang dipicu utamanya oleh geliat bisnis *Financial Technology* dan *E-Commerce*. Masalah konektivitas antar-kawasan juga ikut memengaruhi dinamika perdagangan regional dan global. Cina dengan konsep *Belt and Road Initiative* dan India dengan konsep koridor perdagangan *North-South Transport Corridor* adalah dua kekuatan baru ekonomi Asia yang tengah mengembangkan gagasan konektivitas tersebut.

Dinamika eksekutif tatanan ekonomi kawasan dan global dewasa ini memerlukan perhatian sangat serius semua pihak, termasuk DPR sebagai salah satu institusi yang menentukan arah ke depan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kewenangannya sebagai pembuat undang-undang, pengawas kerja pemerintah dan perumus anggaran negara. Kita

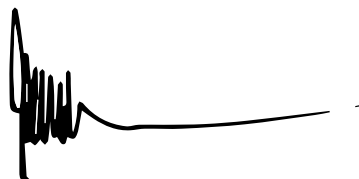
terus berikhtiar mendorong DPR sebagai institusi yang produktif dan responsif terhadap peluang dan tantangan yang membentang. Oleh sebab itu, DPR telah menetapkan beberapa rancangan undang-undang untuk merespon tantangan ekonomi ke depan sebagai prioritas pada Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2018 antara lain RUU tentang Kewirausahaan, RUU tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan RUU tentang Ekonomi Kreatif.

Buku Rekomendasi Panja KER BKSAP ini harus dimaknai peran aktif DPR terhadap isu-isu ekonomi regional dan global. Tentu saja buku tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja-kerja DPR ke rakyat Indonesia sebagai pemilik mandat. Butir-butir rekomendasi Panja KER merupakan masukan sangat berharga bagi perumusan undang-undang, pengawasan dan pengalokasian anggaran negara.

Harapan besar saya agar Buku Rekomendasi Panja KER ini semakin meningkatkan percaya diri kita sebagai bangsa yang besar, semakin mensolidkan elemen-elemen kekuatan bangsa, dan menggelorakan semangat gotong

royong dalam menghadapi era persaingan yang sangat ketat. Salah satu *founding father* kita, Soekarno, pada sebuah pidatonya yang disampaikan pada HUT Proklamasi tahun 1966 menegaskan, "*Apakah kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong*". Dalam kaitan ini, Helen Adams Keller, seorang penulis dan aktivis Amerika terkemuka pernah menuliskan bahwa "*Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.*"Akhir kata, saya sepenuhnya percaya inisiatif seperti yang dilakukan BKSAP ini akan berkelanjutan dan terus memberikan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia serta menginspirasi kita semua.

Jakarta, 31 Desember



**H. BAMBANG SOESATYO, S.E.,
M.B.A.
Ketua DPR RI**

KATA SAMBUTAN KETUA BKSAP DPR RI



Saya bersyukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena atas kehendak-Nya buku rekomendasi Panitia Kerja Kerjasama Ekonomi Regional (Panja KER) berhasil diselesaikan.

Saya mengapresiasi Ketua dan Anggota Panja KER atas partisipasi aktif mereka dalam semua agenda dan program yang telah ditetapkan Panja KER. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada pihak-pihak terkait (*stakeholders*) yang telah mencurahkan bantuan baik teknis maupun substantif, di dalam maupun di luar negeri, sehingga program-program Panja KER berjalan lancar.

Untuk diketahui pembentukan Panja KER adalah kontribusi konkrit Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) untuk mendukung upaya pemerintah mengoptimalkan pelbagai perjanjian perdagangan pada level bilateral, regional, dan global. Sebagai pimpinan BKSAP, saya terpanggil untuk berbagi tanggungjawab dengan *stakeholder*

lain dalam upaya memajukan perekonomian Indonesia di era persaingan global. BKSAP sebagai ujung tombak diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam memainkan diplomasi ekonomi yang merupakan prioritas diplomasi Indonesia. Lebih jauh, diplomasi parlemen tersebut ditujukan untuk mendukung tugas DPR RI dalam menjalankan peran pengawasan terhadap negoisasi-negoisasi kerjasama ekonomi antarpemerintah. Harapannya agar berbagai negoisasi tersebut didasarkan atas visi kemandirian ekonomi nasional Indonesia yang berkontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Membicarakan isu ekonomi regional dalam konteks ke-Indonesia-an tidak bisa terlepas dari pemberlakuan kesepakatan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan sejak Januari 2016. Merespon pemberlakuan itu BKSAP juga sebelumnya pernah membentuk Panja MEA dan telah pula menghasilkan rekomendasi-rekomendasi konstruktifnya. Oleh sebab itu, Panja KER sendiri dapat dikatakan sebagai kelanjutan Panja MEA. Namun demikian, pada cakupan agenda kerjanya, Panja KER memiliki spektrum lebih luas. Pasalnya, isu ekonomi regional tidak sekadar ruang lingkup ASEAN. Lebih jauh lagi, Indonesia merupakan bagian dari pelbagai forum ekonomi regional lain yang tak boleh dikesampingkan seperti APEC (*The Asia-Pacific Economic Cooperation*), IORA (*The Indian Ocean Rim Association*) atau ACD (*Asia Cooperation Dialogue*).

Sebagai *vocal point* diplomasi DPR, BKSAP terus berikhtiar menyuarkan kepentingan ekonomi Indonesia di forum-forum keparlemenan seperti *Inter-Parliamentary Union* (IPU), *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA), *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF), *Asian Parliamentary Assembly* (APA) dan lainnya. Bahkan, BKSAP juga berperan aktif pada jejaring parlemen pada forum-forum ekonomi eksekutif seperti *The OECD Global Parliamentary Network*. Saya sendiri berperan aktif pada agenda-agenda OECD

tersebut. Terakhir saya menghadiri *6th OECD Parliamentary Days* di Paris 7 - 9 Februari 2018 lalu. Ketika itu saya mengingatkan bahwa kerjasama perdagangan regional dan global seharusnya tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi namun lebih pada pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan bersama. Dalam konteks keregionalan, perlu kembali diingatkan kembali salah satu tujuan ASEAN seperti tertulis dalam Piagam ASEAN yaitu, mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik. Maka pemerataan pembangunan adalah komitmen bersama anggota ASEAN.

Namun faktanya, menurut hasil penelitian LIPI, ASEAN memiliki masalah ketimpangan pembangunan dimana tidak semua negara-negara anggota akan diuntungkan dengan pembangunan sektor-sektor prioritas yang sudah ditentukan di Vientiane, Laos pada 2004. Dijelaskan bahwa ASEAN harus memikirkan strategi pemerataan pembangunan melalui perlindungan, penghormatan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, pembangunan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kapasitas inovasi dan kapabilitas serta transfer

teknologi. Ke depan, ASEAN harus memaksimalkan ASEAN *Plan of Action on Science, Technology and Innovation* (APASTI) yang merupakan cetak biru kerjasama iptek di ASEAN.

Fakta lebih menukik lagi, seperti apakah pemerataan pembangunan nasional saat ini? Ketimpangan antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI) terlihat kasatmata dari berbagai aspek; sosial maupun ekonomi. Dari sisi fisik (infrastruktur), ketimpangan juga terlihat sangat nyata, yaitu konektivitas di KTI masih barang langka. Masalah ketertinggalan pembangunan tidak hanya dirasakan di wilayah KTI, tetapi juga dialami betul oleh daerah-daerah pinggiran. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyebutkan saat ini dari total 74 ribu desa yang ada di Indonesia, sebanyak 39 ribu atau lebih dari 52% masih masuk kategori tertinggal. Sekitar 43% desa di Indonesia belum mendapat aliran listrik. Akar itu semua adalah pembangunan yang tidak merata.

Pada sisi lain, perlu diajukan pula sebuah pertanyaan pada konteks keregionalan yaitu: seperti apakah profil indikator aktifitas ekonomi kita jika dibandingkan dengan

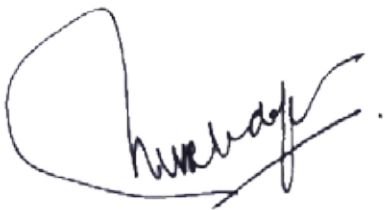
beberapa negara di ASEAN? Sekadar gambaran, untuk tahun 2017, total nilai ekspor Indonesia berada di angka USD 168,7 miliar, lebih kecil dari Malaysia (USD 211,9 miliar), Thailand (USD 233,5 miliar), dan bahkan Viet Nam (USD 214 miliar). Kemudian, dalam daftar kemudahan berinvestasi yang dirilis oleh Bank Dunia tahun 2018, Indonesia berada di ranking 72, jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang berada di posisi 2, Malaysia di posisi 24, Thailand di posisi 26, dan bahkan masih tertinggal dari Vietnam yang berada di posisi 68. Gambaran profil ekonomi tersebut merupakan lampu kuning yang harus menjadi perhatian kita bersama.

Sementara pada level global, SDGs merupakan instrumen penting bagi tercapainya pemerataan pembangunan global. Dalam kaitan tersebut, DPR RI dengan inisiasi BKSAP pada September tahun lalu secara serius menggelar hajatan *World Parliamentary Forum on SDGs* di Bali. Pada forum yang dihadiri 47 negara perwakilan tersebut berhasil mengadopsi Deklarasi Bali yang intinya komitmen parlemen dunia untuk mensukseskan SDGs. Penting juga dicatat bahwa penyelenggaraan forum SDGs tersebut menunjukkan komitmen kuat DPR untuk secara

sungguh-sungguh berperan aktif dalam menjalankan diplomasi ekonomi untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

Akhirnya, Buku Rekomendasi Panja KER ini harus dibaca sebagai kontribusi pemikiran DPR dalam upaya merumuskan langkah-langkah ke depan untuk memenangkan persaingan ekonomi regional dan global. Tentu saja pemikiran tersebut tidak akan bermakna apa-apa jika tidak dituangkan ke dalam sebuah kebijakan. Harapan besar saya, pihak-pihak terkait dapat mempertajam sekaligus menerjemahkan rekomendasi-rekomendasi tersebut sehingga menjadi *workable solution*.

Jakarta, 31 Desember

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurhayati', with a large, stylized initial 'N' and a flourish at the end.

Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si
Ketua BKSAP

KATA SAMBUTAN KETUA PANJA KER



Memasuki awal tahun, BKSAP memutuskan untuk membentuk Panja Kerjasama Ekonomi Regional (KER). Tidak dipungkiri saat ini kita tengah berada dalam era meluasnya regionalisme dan perubahan tata ekonomi global yang masif. Dimana kesadaran untuk mengikatkan diri dengan negara yang berada dalam satu kawasan semakin meningkat.

Hal ini ditandai dengan meningkatnya *free trade areas*, *custom unions*, *common markets* dan *economic unions*. Uni Eropa (UE) merupakan salah satu pengikatan diri terhadap regionalisme menyeluruh. Selanjutnya, pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Desember 2015 merupakan sebuah regionalisme yang diikuti oleh integrasi ekonomi kawasan pada level tertentu.

BKSAP sebagai ujung tombak diplomasi parlemen melihat signifikansi untuk melakukan telaah regionalisme ekonomi guna memperoleh masukan-masukan bagi peran diplomasi parlemen yang dilakukan di tataran ASEAN dan Asia melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asian Parliamentary

Assembly (APA) dan Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF).

Indonesia saat ini juga tengah mengintensifkan negosiasi kerjasama perdagangan dan ekonomi dengan berbagai pihak baik secara bilateral dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership (CEPA) dan melalui peran sentral di forum kerjasama ekonomi regional seperti Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Bertolak dari kesadaran akan pentingnya fungsi pengawasan atas kesepakatan-kesepakatan kerjasama ekonomi yang dibentuk di level pemerintah, BKSAP berkeinginan untuk mengambil peran aktif. Dengan demikian pembentukan Panja ini dapat memaksimalkan peran pengawasan atas kerjasama ekonomi yang diambil pemerintah

agar selalu berpegang pada visi kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Ada dua hal yang menjadi fokus Panja tahun ini. Pertama, kompetensi dan daya saing. Kedua, diplomasi kelapa sawit. Kedua fokus tersebut menciptakan perpaduan antara konsentrasi pada sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kompetensi dan daya saing mendapat perhatian tersendiri terutama setelah membaca posisi Indonesia di *Programme for International Student Assesment (PISA)*, sebuah metode evaluasi sistem pendidikan di 72 negara yang diinisiasi OECD. Meskipun terdapat peningkatan signifikan pada kompetensi sains dan matematika, namun peringkat Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Selain itu Indonesia masih kurang memberi perhatian dalam pengembangan tradisi inovasi dan riset terutama jika dibandingkan dengan negara-negara skandinavia.

Diplomasi kelapa sawit layak untuk menjadi fokus berikutnya terlebih setelah Parlemen Uni Eropa mengadopsi *Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforests* pada tanggal 4 April 2017. Meskipun resolusi

tersebut non-binding dan keputusan tindakan tetap di tangan Komisi Eropa, resolusi yang secara khusus menyebut Indonesia tersebut bersifat kontra-produktif bagi industri sawit dalam negeri. Berbagai *image* dilekatkan pada industri sawit Indonesia antara lain deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM. Salah satu poin resolusi bahkan menyerukan untuk mengambil langkah-langkah penghentian bertahap dalam penggunaan minyak nabati pendorong deforestasi, termasuk kelapa sawit, sebagai komponen biofuel pada 2020. BKSAP DPR RI tidak tinggal diam dan berupaya untuk mengubah persepsi negatif tersebut. Diplomasi dilakukan baik secara bilateral dengan International Trade Committee European Parliament maupun dalam berbagai agenda sidang antar parlemen regional.

Sebagai konklusi dan pertanggungjawaban publik atas kerja-kerja Panja di tahun 2017, buku ini kami susun. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rampungnya proses penulisan dan penerbitan. Apresiasi dan terima kasih tak terhingga saya tujukan kepada rekan-rekan anggota Panja yang berasal dari lintas fraksi dan komisi atas antusiasme dan komitmen dalam mengawal program-program kerja Panja KER.

Tentunya tugas-tugas yang dimiliki anggota Panja tidak dapat terselesaikan secara optimal tanpa kolaborasi dengan mitra-mitra strategis. Apresiasi yang mendalam saya sampaikan kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini agenda Panja KER tahun 2017 tidak akan terealisasi dengan baik tanpa sinergi dengan segenap pimpinan BKSAP. Semoga kita dapat terus menjaga kekompakan dan mengawal agenda Panja KER selanjutnya. Mewakili rekan-rekan anggota Panja KER 2017, saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di kesekretariatan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) khususnya bagian Kerja Sama Regional (KSR) dan Tenaga Ahli BKSAP untuk asistensi secara teknis maupun substantif.

Sebagai penutup, selamat membaca dan semoga buku ini dapat menginisiasi diskusi-diskusi mengenai kompetensi sumber daya manusia Indonesia di percaturan global dan upaya-upaya mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam di tanah air tercinta. Saya pun berharap buku ini akan mendapatkan respon-respon konstruktif yang bermanfaat bagi kerja-kerja kami di Panja.

Jakarta, 31 Desember



Juliari P. Batubara
Ketua Panja Kerjasama Ekonomi
Regional



SUSUNAN ANGGARAN PANJA KER

DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si	Ketua BKSAP	
Juliari P. Batubara	Ketua Panja / Wakil Ketua BKSAP	
Siti Hediatie Soeharto, SE	Wakil Ketua BKSAP	
H. Rofi' Munawar, Lc	Wakil Ketua BKSAP	
Ir. Nazarudin Kiemas	Anggota Panja	F-PDIP
Agustina Wilujeng Pramestuti, SS	Anggota Panja	F-PDIP
Donny Maryadi Oekon, ST	Anggota Panja	F-PDIP
Vanda Sarundajang	Anggota Panja	F-PDIP
Mercy Chriesty Barends, ST	Anggota Panja	F-PDIP
Dave Akbarshah Fikarno, ME	Anggota Panja	F-PG
Dwie Aroem Hadiatie, S.I.KOM	Anggota Panja	F-PG
H. Hasnuryadi Sulaiman	Anggota Panja	F-PG
Rachel Maryam Sayidina	Anggota Panja	F-P. Gerindra

Dr. H. AzikinSolthan, M.Si	Anggota Panja	F-P. Gerindra
Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc	Anggota Panja	F-P. Gerindra
Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA	Anggota Panja	F-P. Demokrat
Hj. Melani Leimena Suharli	Anggota Panja	F-P. Demokrat
H. Jon Erizal, SE., MBA	Anggota Panja	F-PAN
Lucky Hakim	Anggota Panja	F-PAN
Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.	Anggota Panja	F-PKB
H. Abdul Kadir Karding, S.Pi, M.Si	Anggota Panja	F-PKB
Drs. H. Mahfuz Sidik, M.Si	Anggota Panja	F-PKS
H. Mahfudz Abdurahman, S.Sos	Anggota Panja	F-PKS
H. Achmad Farial	Anggota Panja	F-PPP
Prananda Surya Paloh	Anggota Panja	F-P. Nasdem
Drs. Fadholi	Anggota Panja	F-P. Nasdem
Mukhtar Tompo, S.Psi	Anggota Panja	F-P. Hanura

A. PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Pembentukan Panitia Kerja Kerjasama Ekonomi Regional

Penguatan bidang ekonomi merupakan salah satu prioritas kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 - 2019. Hal ini dilakukan antara lain dengan meluncurkan beberapa paket kebijakan ekonomi yang bertujuan menarik investasi. Di tahun 2018, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penguatan dibanding tahun 2017. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil diperkirakan menguat menjadi 5,3 persen pada 2018 dibanding tahun 2017 yang sebesar 5,1 persen. Hingga triwulan ketiga 2017, kinerja perdagangan luar negeri masih mengalami surplus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2017 sebesar US\$1,63 miliar atau menjadi yang tertinggi sejak tahun 2012. Namun disayangkan performa ekspor Indonesia masih tertinggal bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara sesama anggota ASEAN.

Saat ini Indonesia tengah melakukan negosiasi 16 perjanjian dagang, 6 diantaranya diharapkan selesai dalam waktu dekat. Keenam perjanjian tersebut yakni Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), pengembangan Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (PTA), Indonesia-Chile Trade In Goods Agreement (TIGA), Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) CEPA, ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement (FTA), dan pengembangan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Dalam hal ini Badan Kerja Sama Antar parlemen (BKSAP) sebagai ujung tombak diplomasi parlemen dapat mengambil peran dalam diplomasi ekonomi yang merupakan prioritas diplomasi Indonesia. Diplomasi Parlemen ini juga dapat mendukung DPR RI dalam melakukan peran pengawasan negosiasi-negosiasi kerjasama ekonomi yang diambil pemerintah selalu berpegang pada visi kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, BKSAP sebagai alat kelengkapan DPR RI yang memiliki jaringan kerja yang luas secara internasional, dapat berperan lebih aktif dalam upaya diplomasi ekonomi melalui Panitia Kerja. Dasar dari pembentukan Panitia Kerja ini adalah adanya sebuah kebutuhan untuk dapat membangun dialog dan berbagi pengalaman dengan parlemen negara-negara lainnya dan mendukung misi diplomasi ekonomi Pemerintah RI.

Diharapkan dengan adanya Panja ini dapat memberikan rekomendasi pada bidang perdagangan terutama terkait kinerja perdagangan luar negeri dan pengembangan produk unggulan Indonesia, pariwisata, investasi dan kerja sama pembangunan agar nantinya partisipasi Indonesia dalam kerangka kerjasama ekonomi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Pembentukan Panitia kerja yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BKSAP memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud peran serta Parlemen dalam mendukung diplomasi ekonomi yang tengah menjadi salah satu fokus pemerintah RI;
- b. Sebagai forum yang menyediakan ruang dialog dan pengayaan isu-isu bagi Anggota Panitia Kerja dalam membuat legislasi/perundang undangan dan melakukan pengawasan menjamin pelaksanaan kerjasama ekonomi yang efektif;
- c. Memberikan saran/rekomendasi terkait kerjasama ekonomi regional kepada pihak eksekutif/pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Anggota Panja yang bersifat lintas komisi dapat berperan dalam memastikan sinergi antara resolusi/keputusan yang diambil dalam sidang-sidang parlemen regional dengan pembahasanpembahasan di komisinya;
- e. Menggalang kerjasama dengan Anggota Parlemen negara lain melalui organisasi-organisasi keparlemenan yang memiliki agenda kerjasama ekonomi antara lain ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), dsb.

B. Perkembangan Terkini Kerjasama Ekonomi Regional

Kerja Sama Ekonomi Regional: Memperkuat Posisi Strategis Indonesia di Tengah Kompetisi Global¹

■ Latar Belakang

Hingga kini isu globalisasi dan regionalisasi yang mendorong perdagangan bebas masih dan akan tetap menjadi isu yang menjadi perhatian dunia. Sepertinya sulit bagi negara manapun di dunia yang dapat menghindarinya, era keterbukaan. Interaksi dengan negara lain menjadi mutlak diperlukan oleh semua negara di dunia. Interaksi tersebut dilakukan melalui diplomasi/perundingan untuk menjalin, mempererat, dan meningkatkan hubungan antara satu negara dengan negara lain untuk mencapai kepentingan bersama, mengingat setiap negara memiliki tujuan dan kepentingan nasionalnya masing-masing. Kepentingan nasional tersebut mencakup semua aspek kehidupan bernegara, yang meliputi beberapa bidang, seperti pertahanan keamanan, politik, ekonomi dan budaya.

Di abad 21, tidak dapat dipungkiri bahwa agenda ekonomi suatu Negara sangat dipengaruhi oleh proses integrasi ekonomi global yang ditandai dengan adanya perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis untuk mengurangi/dan menghapus hambatan tarif dan non-tarif atas barang dan jasa yang diperdagangkan, serta mengurangi hambatan bagi masuknya investasi asing (FDI).

Regionalisme itu sendiri diambil dari kata region atau wilayah, berarti regionalisme dapat diartikan sebagai perkembangan integrasi sosial dalam sebuah wilayah yang tidak secara langsung dalam interaksi sosial dan ekonomi (Fawcet & Hurrell, 2002). Dalam regionalisme ini ditekankan adanya koordinasi untuk menentukan posisi regional dalam sistem internasional. Lebih lanjut, integrasi regional menekankan pada pengurangan atau bahkan usaha untuk menghilangkan batas antar negara di bidang kerja sama ekonomi seperti pembebasan pajak impor maupun ekspor di kawasan regional tersebut untuk memfasilitasi terjadinya transaksi perdagangan di antara negara anggota kerja sama secara lebih efisien dan murah.

1 Sumber: Kementerian Perdagangan RI

Kerjasama regional tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia dan negara. Ketika suatu negara membutuhkan keunggulan dan potensi negara lain, maka pada saat itu pula negara tersebut akan melihat kerjasama dengan negara lain sebagai sebuah solusi. Regionalisme merupakan produk dari globalisasi karena terbukti regionalisme semakin menemukan posisinya di era globalisasi saat ini, di mana perkembangan teknologi dan kompleksitas kebutuhan manusia semakin mendorong terciptanya integrasi di tingkat regional.

Menurut Hurrell (1995), regionalisme lahir dari sebuah konstruksi sosial sesuai dengan konteks masalah dan pembentukannya. Bagi negara yang cenderung berada dalam posisi lemah dalam organisasi regional, fungsi regionalisme adalah sebagai institusi pembentuk peraturan dan prosedur, sementara bagi negara yang relatif kuat, regionalisme berfungsi sebagai tempat untuk menjalankan strategi, tempat untuk mewartakan hegemoni, dan tempat untuk melegitimasi POWER².

Lebih lanjut Walter S. Jones (1993) menyebutkan setidaknya ada 7 (tujuh) kondisi yang mendorong terciptanya integrasi dalam suatu wilayah, yakni: (1) asimilasi sosial; (2) kesamaan nilai; (3) keuntungan bersama; (4) kedekatan hubungan di masa lampau; (5) pentingnya integrasi itu sendiri; (6) biaya relatif rendah; serta (7) pengaruh-pengaruh eksternal, sementara tujuan yang hendak dicapai melalui proses integrasi, antara lain: (1) maksimalisasi potensi ekonomi; (2) maksimalisasi potensi politik; dan (3) penyelesaian konflik regional³.

Tahapan dari integrasi regional dapat berlangsung dalam beberapa bentuk, tergantung dari tingkat integrasi di antara negara. Ditinjau dari sisi kedalaman integrasinya, bentuk integrasi regional yang diurutkan mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling komprehensif, adalah sebagai berikut: (1) Preferential Trade Agreement (PTA); (2) Free Trade Area (FTA); (3) Custom Union (CU); (4) *single market*; (5) *monetary union*; (6) *political union*.⁴ Free Trade Agreement (FTA) merupakan tahap kedua dari integrasi

2 Andrew Hurrell, *Regionalism in Theoretical Perspective*, 1995, *Oxford University Press*, hlm. 3-73

3 Walter S. Jones, *Logika Hubungan: Kekuasaan, Ekonomi Politik dan Tata Dunia*, 1993, Gramedia, Jakarta

4 Louis F Del Duca, *Teaching of European Community Experience for Developing Regional Organizations*, *Dickinson Journal of International Law* 485, 11, 1993, hlm 490-492

di mana negara anggota setuju untuk mengurangi tarif, kuota, dan hambatan non-tarif untuk hampir seluruh barang dan jasa yang diperdagangkan di antara negara anggota.

■ **Perkembangan Kesepakatan Perdagangan yang Telah Diimplementasikan oleh ASEAN**

Dalam rangka meningkatkan akses pasar barang dan jasa di negara tujuan ekspor, Indonesia berpartisipasi aktif dalam perundingan di berbagai forum kerja sama perdagangan internasional, mulai dari forum bilateral, regional maupun multilateral. Di forum regional, Indonesia aktif di perundingan APEC dan ASEAN.

Kerja sama perdagangan ASEAN pada awalnya dimulai dengan perjanjian FTA yang sederhana yaitu ASEAN Preferential Trade Agreement (PTA) pada tahun 1967. ASEAN mulai meningkatkan level integrasinya pada saat ASEAN menyepakati untuk mengimplementasikan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 dan memasuki implementasi penuh pada 1 Januari 2010 dimana tarif bea masuk dari hampir seluruh produk yang diperdagangkan oleh ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) dihapuskan (0%) kecuali untuk minuman beralkohol (MINOL), beras dan gula (untuk Indonesia). Selain perjanjian di bidang perdagangan barang (AFTA), ASEAN juga menyepakati perjanjian di bidang perdagangan Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS) pada tahun 1995, dan perjanjian di bidang Investasi (ASEAN Investment Agreement/AIA) pada tahun 1998. Hingga awal tahun 2000, ASEAN fokus mengimplementasikan ketiga perjanjian tersebut.

Pada tahun 2003 di Bali, ASEAN menyepakati ASEAN Community Vision yang terdiri dari 3 (tiga) Visi ASEAN yaitu ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Political Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC), dan sejak saat itu ASEAN mulai menyusun ASEAN Community Blueprint (AEC Blueprint) dan ditandatangani pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, ASEAN juga mengesahkan ASEAN Charter, yang mengkonsolidasikan 10 Negara anggota ASEAN di dalam 1 (satu) entitas legal yang bersifat mengikat secara hukum. Dengan demikian, semua komitmen ASEAN khususnya di bidang ekonomi yang disepakati sejak tahun 2007, bersifat mengikat secara hukum dan harus diimplementasikan. AEC Blueprint pertama yang disepakati dan diimplementasikan oleh ASEAN adalah

AEC Blueprint 2015 di mana masa implementasinya berlaku mulai tahun 2008 dan berakhir 2015. Sejak tahun 2016, ASEAN telah mulai mengimplementasikan AEC Blueprint 2025. ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint atau Cetak Biru MEA 2025 disusun untuk mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang lebih terintegrasi secara komprehensif. Cetak Biru MEA 2025 terdiri dari 5 (lima) pilar yakni: (1) Ekonomi yang Terintegrasi dan Terpadu, (2) ASEAN yang Kompetitif, Inovatif dan Dinamis, (3) Peningkatan Konektivitas dan Kerja sama Sektoral, (4) ASEAN yang Tangguh, Berorientasi dan Berpusat pada SDM, dan (5) ASEAN yang Global.

Proses integrasi/liberalisasi di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi sebagaimana dituangkan dalam AEC Blueprint 2015, dilaksanakan mengacu pada ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Khusus untuk perjanjian di bidang perdagangan jasa, saat ini sedang dalam pembahasan menjadi ASEAN Trade in Services (ATISA). Selain melaksanakan integrasi liberalisasi menuju pasar tunggal berbasis produksi ASEAN, proses integrasi ekonomi secara komprehensif juga diupayakan melalui implementasi berbagai komitmen dan kerjasama di bidang persaingan usaha, perlindungan konsumen, HAKI, dan pembangunan infrastruktur menuju Kawasan ASEAN berdaya saing. Upaya lain melalui pemberdayaan UKM untuk memastikan pemerataan pembangunan ekonomi ASEAN.

Sebagaimana tertuang dalam AEC Blueprint 2015 dan 2025, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih luas lagi, ASEAN memiliki visi untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN dengan ekonomi global. ASEAN juga membangun kerja sama perdagangan dalam bentuk FTA dengan Negara Mitra Wicara dan kerja sama ekonomi dengan Negara Mitra Strategis. Untuk mewujudkan hal tersebut, ASEAN melakukan kerja sama dalam bentuk perdagangan bebas (FTA) dengan Negara Mitra Dialog (RRT, Jepang, Korea, India, Australia, Selandia Baru, dan Hong Kong), maupun kerja sama ekonomi (*cooperation*) dengan Negara-negara Mitra Strategis (Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Rusia). Selain itu, dalam rangka meningkatkan integrasi internal ASEAN, sejumlah Negara ASEAN juga membangun kerja sama sub-regional (BIMP-EAGA dan IMT-GT). ASEAN sangat meyakini bahwa berbagai bentuk kerja sama dengan Negara Mitra dan sub-regional ASEAN merupakan peluang yang juga melahirkan tantangan bagi

ASEAN dan Indonesia dalam mengembangkan perdagangan internasionalnya.

Kerjasama FTA yang telah disepakati oleh ASEAN dengan Negara Mitra Wicara dan telah diimplementasikan sejak beberapa tahun lalu adalah ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP), dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). Pada tahun lalu (2017), disepakati ASEAN-Hong Kong, China FTA (AHKFTA) dan ASEAN-Hong Kong, China Investment Agreement (AHIA). Khusus untuk AJCEP, perjanjian ini baru akan diimplementasikan secara penuh per 1 Maret 2018. Saat ini ASEAN dan seluruh Negara Mitra FTA-nya sedang merundingkan FTA komprehensif yang melibatkan 16 Negara (10 Negara anggota ASEAN dan 6 Negara Mitra FTAs) yaitu Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP) guna meningkatkan akses pasar dan meningkatkan kontribusi Indonesia dalam Global Value Chain (GVC). Selain itu, ASEAN juga terus memelihara kerjasama ekonominya dengan Negara Mitra Strategis yaitu Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Rusia.

■ **ASEAN Free Trade Area dan ASEAN Trade in Goods Agreement**

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) disepakati dan ditandatangani pada tahun 2009 dan dibangun di atas komitmen yang telah disepakati dan diimplementasikan sebelumnya, yaitu the Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements (1977), the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (1992), the ASEAN Agreement on Customs (1997), the ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (1998), the e-ASEAN Framework Agreement (2000), the Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (2003), the ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors (2004), dan the Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window (2005). Dengan kata lain, ATIGA merupakan perjanjian perdagangan barang yang mengakomodir semua perjanjian terkait perdagangan barang yang selama ini disepakati secara tersendiri.

Pemanfaatan ATIGA oleh Indonesia secara jelas dapat diukur dari peningkatan ekspor serta tingkat utilisasi tarif preferensi

0% ATIGA. Seiring berjalannya waktu, pemanfaatan tarif preferensi ATIGA oleh Indonesia mengalami peningkatan. Dalam Tabel 1 yang disajikan, tampak bahwa nilai ekspor Indonesia yang memanfaatkan tarif preferensi ke ASEAN meningkat setiap tahun 20,44% dari US\$ 16,52 miliar pada tahun 2012, menjadi US\$ 21,8 miliar pada tahun 2017 di mana peningkatan yang nyata terjadi dari tahun 2016 ke 2017. Pada tahun 2016, 54,55% dari total ekspor Indonesia ke ASEAN dan diharapkan setiap tahun tingkat pemanfaatannya terus meningkat.

Perekonomian ASEAN saat ini tercatat menduduki peringkat terbesar ke-6 di dunia dan ke-3 di Asia, dengan total PDB sebesar US\$ 2,55 triliun pada 2016. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ASEAN mencapai 5,1 persen pada tahun 2018. Nilai perdagangan barang ASEAN-dunia mencapai US\$ 2,24 triliun, dengan 23,1% diantaranya merupakan perdagangan intra-ASEAN. Sedangkan investasi ke ASEAN mencapai US\$ 98 miliar pada tahun 2016, dan 25% diantaranya merupakan investasi intra-ASEAN⁵.

■ Kerja Sama Asean Dengan Negara Mitra Asean

Berdasarkan data ASEAN Statistics 2017, ASEAN menyumbang 3,4% terhadap perekonomian dunia (GDP), dengan *share* total perdagangan dunia mencapai 6,9%⁶. Hal ini membuat ASEAN menjadi mitra dagang yang cukup menarik bagi negara-negara lainnya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, saat ini ASEAN sudah dan sedang mengimplementasikan 5 ASEAN FTA-nya yaitu (1) ASEAN-China FTA; (2) ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership; (3) ASEAN-Korea FTA; (4) ASEAN-India FTA; dan (5) ASEAN-Australia-New Zealand FTA. Sementara untuk ASEAN-Hong Kong, China FTA, mengingat masih terdapat 2 (dua) Negara anggota ASEAN yang belum dapat menandatangani, Indonesia dan Negara ASEAN lainnya belum dapat melakukan ratifikasi agar dapat mulai diimplementasikan.

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Perjanjian ASEAN-China FTA (ACFTA) ditandatangani pada tahun 2005 dan mulai implementasi pada tahun 2006, khusus untuk kategori Early Harvest Program (EHP) untuk Chapter 01 - 08, dimana tarif produk-produk tersebut langsung menjadi 0% pada tahun tersebut. Selanjutnya, implementasi ACFTA nya Framework Agreement on Comprehensive

5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN, Kemendag, 2017

6 ASEAN Statistical Leaflet Selected Key Indicators, 2017 dan AEC Chart Book, 2017

Economic Cooperation between the ASEAN berlangsung sesuai dengan Modalitas Tarif yaitu (1) Normal Track-1 (NT-1) yang telah memasuki tarif 0% pada tahun 2010 dan Normal Track-2 (NT-2) pada tahun 2012; (2) Sensitive List menjadi 0-5% pada tahun 2018; dan (3) Highly Sensitive List (HSL) dimana tarifnya maksimal menjadi 50%. Dengan demikian, saat ini tingkat integrasi FTA ASEAN dengan RRT telah memasuki implementasi penuh.

Sementara komitmen Jasa yang disepakati dan diimplementasikan masuk pada Paket ke-3 dimana komitmen Indonesia untuk Foreign Equity Participation (FEP) tidak lebih dari 49% kecuali untuk Hotel khusus di Wilayah Indonesia Timur, Kalimantan, Bengkulu, Jambi dan NTT; untuk Golf Courses and Other Sporting Facilities; Tourist Resorts including Hotel (3, 4 and 5 stars), Marinas, Golf Courses and Other Sport khusus wilayah Indonesia Timur, Bengkulu dan Jambi, diberikan hingga 100%. Untuk investasi, ASEAN dan RRT telah melakukan amandemen terhadap perjanjian awalnya khusus untuk elemen promosi dan fasilitasi, sedangkan untuk elemen proteksi dan liberalisasi, belum dibahas karena menunggu penyelesaian perjanjian investasi di RCEP.

Tingkat pemanfaatan tarif preferensi ACFTA untuk ekspor Indonesia dari tahun ke tahun sejak tahun 2012 hingga 2017, menunjukkan peningkatan yang cukup besar 51,56% per tahun, dari US\$ 15,47 M di tahun 2012, menjadi US\$ 23,31 miliar pada tahun 2017, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 dan Grafik 1. Tingkat pemanfaatannya merupakan yang tertinggi dari pemanfaatan tarif preferensi ASEAN FTA lainnya, khususnya pada tahun 2016, mencapai 91,60% dari total ekspor Indonesia ke RRT.

Nilai perdagangan ASEAN-RRT menyumbang 21,39% dari total perdagangan ASEAN dengan negara-negara lain, yaitu sebesar US\$ 368,026 juta pada tahun 2016⁷. Total investasi RRT ke ASEAN pada tahun 2015 sebesar US\$6,460 juta naik menjadi US\$9,799 juta pada tahun 2016⁸. Nilai investasi ini menjadikan RRT sebagai investor terbesar ke-4 di ASEAN dan berkontribusi sebesar 13% terhadap total investasi ASEAN. Di samping itu, RRT juga merupakan investor terbesar ke-3 di Indonesia.

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Prtnership (AJCEP). ASEAN juga menjalin kerja sama dengan Jepang sejak tahun 2008 dengan ditandatanganinya ASEAN

⁷ ASEAN Sekretariat, "ASEAN Statistical Year Book", 2016/2017, hlm. 78.

⁸ Ibid, hlm. 78.

Japan Comprehensive Economic Agreement (AJCEP). Sebagaimana disepakati, pada tahun 2024, Indonesia dan ASEAN lainnya harus menghapus tarif dari 90% pos tarifnya dan Jepang tarif sebanyak 92% pos tarif. Indonesia merupakan satu-satunya pihak dalam AJCEP yang belum mengimplementasikan AJCEP Trade in Goods, dan baru mulai mengimplementasikan pada tanggal 1 Maret 2018. Sementara untuk Trade in Services (mencakup juga MNP) dan Investment-nya, saat ini sedang dalam proses penyelesaian proses domestik agar seluruh pihak dapat menandatangani pada bulan Agustus 2018.

Mengingat Indonesia baru pada tanggal 1 Maret 2018 mulai mengimplementasikan perjanjian ini, maka tingkat pemanfaatan perjanjian ini belum dapat disajikan.

Kinerja perdagangan dan investasi ASEAN-Jepang pada tahun 2016 menunjukkan bahwa perdagangan antara ASEAN dengan Jepang berkontribusi sebesar 11,74% dari total perdagangan ASEAN, atau mencapai US\$201,892 juta⁹. Pada tahun yang sama pula, Jepang merupakan Mitra dagang terbesar ke-4 bagi ASEAN dan sumber investasi asing (FDI) terbesar ke-3 dengan jumlah investasi asing langsung (FDI) ke ASEAN sebesar US\$11,535 juta, atau 16% dari total arus FDI ke ASEAN¹⁰.

ASEAN-Korea Free Trade Agreement AKFTA). Kerja sama ekonomi dengan Korea Selatan juga dilakukan oleh ASEAN melalui ASEAN Korea Free Trade Agreement (AKFTA) pada tahun 2006. Sesuai kesepakatan tarif modalitas (untuk ASEAN 6 termasuk Indonesia), maka sejak 1 Januari 2007, tarif dari sebanyak minimal 50% pos tarif menjadi 0-5% dan 1 Januari 2009 sebanyak minimal 90% turun menjadi 0% (Normal Track). Untuk kategori Sensitive List (SL), turun menjadi 20% per 1 Januari 2012, dan menjadi 0-5% pada 1 Januari 2016, sementara untuk Highly Sensitive List (HSL) mulai 1 Januari 2016 turun tarifnya menjadi 50% (grup A), dan sisanya diturunkan tarifnya sebesar 20% (grup B), sebanyak 50% (grup C), pengaturan kuota (grup D), dan pengecualian (exclusion) maksimal sebanyak 40 pos tarif. Untuk kerja sama di bidang investasi disepakati pada tahun 2009 yaitu ASEAN-Korea Investment Agreement. Indonesia meratifikasinya tanggal 18 Maret 2010.

Nilai ekspor Indonesia yang memanfaatkan tarif preferensi AKFTA menurun sejak tahun 2012 dari US\$ 10,09 M menjadi US\$ 6,42 M pada tahun 2017, namun penurunan ini

9 Ibid.
10 Ibid.

sepertinya diakibatkan oleh turunnya total ekspor Indonesia ke Korea karena tingkat utilisasi tarif preferensinya tetap tinggi pada tahun 2016 yaitu 80,2% dari total ekspor ke Korea.

Pada tahun 2016, total perdagangan ASEAN dengan Korea Selatan adalah 7,23% dari total perdagangan ASEAN, yaitu sebesar US\$ 124,251 juta.¹¹ Sedangkan aliran investasi dari Korea Selatan ke ASEAN adalah sebesar US\$ 5,743 juta, menyumbang 8% dari total FDI di ASEAN¹².

ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA). ASEAN juga memiliki perjanjian FTA dengan India yaitu ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA), namun tingkat liberalisasinya cukup rendah. Sebagaimana disepakati dalam tarif modalitas, maka tarif dari 71% pos tarif (India dan ASEAN-6 minus Filipina) dan tambah 9% pos tarif lagi menjadi 0% masing-masing pada tahun 2013 dan 2016 (Filipina tahun 2018 dan 2019). Tarif produk yang masuk kategori sensitive maksimal menjadi 5% pada tahun 2016 (tahun 2019 bagi Filipina). Selanjutnya produk yang masuk kategori *highly sensitive* turun menjadi 25% atau 50% pada 31 Desember 2019 (untuk Indonesia, Malaysia & Thailand) dan pada 31 Desember 2022 (untuk Filipina). Dalam skema ASEAN-India FTA ini, sejumlah produk yang menjadi kepentingan Indonesia dan Malaysia yaitu CPO dan lada oleh India dikategorikan sebagai *special products*, di mana tarif bea masuk CPO hanya turun menjadi 37,5% dan untuk lada turun menjadi 50% pada 31 Desember 2019.

Tingkat pemanfaatan tarif prefrensi AIFTA untuk ekspor Indonesia dari tahun ke tahun sejak tahun 2012 hingga 2017, menunjukkan peningkatan yang cukup besar yaitu 38,9% per tahun, dari US\$ 8,27 miliar pada tahun 2012, menjadi US\$ 11,31 miliar pada tahun 2017, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 dan Grafik 1. Pada tahun 2016, tercatat bahwa tingkat pemanfaatannya merupakan yang tertinggi kedua setelah ACFTA, mencapai 80,67% dari total ekspor Indonesia ke India.

Pada tahun 2016, tercatat bahwa share perdagangan ASEAN dan India mencapai 2,6% dari total perdagangan ASEAN atau senilai US\$ 58,449 juta dan menjadikan India sebagai mitra dagang terbesar ke-7 bagi ASEAN¹³. Sementara di sektor investasi, India berada di peringkat ke-8 sumber investasi bagi ASEAN dengan nilai investasi sebesar US\$ 1,046 juta pada tahun 2016¹⁴.

11 ibid.
12 ibid.
13 ibid
14 ibid

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). ASEAN juga bermitra dengan negara di kawasan Pasifik, yaitu dengan Australia dan Selandia Baru melalui ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA). Modalitas tarif yang disepakati dalam perjanjian ini adalah (1) Normal Track (NT): 90% dari pos tarif; (2) Sensitive Track (ST): 10% dari pos tarif, yang terbagi atas ST1 (6%) dan ST2 (4%), dan (3) Exclusion paling banyak 1% pos tarif. Diharapkan pada tahun 2025, sebanyak 94% pos tarif Indonesia berada pada tarif 0% versus Australia dan New Zealand yang 100% sudah tidak ada tarif lagi. Saat ini kedua Pihak sedang melakukan *review* terhadap Perjanjian AANZFTA tersebut dalam rangka meng*upgrade* Perjanjian dan pada bulan Agustus 2018, elemen yang akan di*upgrade* akan dilaporkan ke Menteri AANZ. Adapun di bidang Jasa, kedua Pihak sepakat untuk merujuk pada uraian yang terdapat dalam jadwal komitmen spesifik setiap pihak sebagaimana tercantum dalam perjanjian (*specific commitment*).

Tingkat pemanfaatan tarif preferensi AANZFTA untuk ekspor Indonesia dari tahun ke tahun sejak tahun 2012 hingga 2017, menunjukkan fluktuasi meskipun cenderung meningkat, dari US\$ 1,35 miliar pada tahun 2012, menjadi US\$ 1,72 miliar pada tahun 2017, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 dan Grafik 1. Tingkat pemanfaatannya cenderung stagnan, meskipun sebanyak 47,6% dari total ekspor Indonesia ke Australia dan Selandia Baru telah memanfaatkan tarif preferensi AANZFTA.

Investasi asing langsung dari Australia dan Selandia Baru mencapai US\$ 3 miliar atau setara dengan 3,1% dari total investasi di ASEAN pada tahun 2016. Australia merupakan mitra terbesar ke-7 bagi ASEAN.

Pada tahun 2016, total perdagangan ASEAN, Australia dan Selandia Baru mencapai nilai US\$ 60,688 juta atau sebesar 2,7% dari total perdagangan ASEAN¹⁵. Hal ini menjadikan Australia dan Selandia Baru sebagai mitra dagang terbesar ke-6 bagi ASEAN. Di samping itu, Australia dan Selandia Baru juga menjadi mitra terbesar ke-7 bagi ASEAN dengan total nilai investasi asing langsung mencapai US\$2,928 juta atau setara dengan 3,1% dari total investasi di ASEAN pada tahun 2016¹⁶.

15 ASEAN Secretariat, "ASEAN Statistical Year Book", 2016/2017, hlm. 78.

16 Ibid.

ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA). Pada tahun 2017, ASEAN dan Hong Kong menandatangani ASEAN Hong Kong FTA (AHKFTA). Perjanjian AHKFTA ini meliputi kesepakatan di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis. Komitmen Indonesia dalam AHKFTA ini terbilang rendah yaitu 75% pos tarif dibebaskan tarifnya dalam 10 tahun, sedangkan ASEAN-6 lainnya, sebesar 85%. Daftar produk yang dikecualikan oleh Indonesia juga cukup tinggi yaitu 15% pos tarif, yang paling tinggi diantara ASEAN+1 FTAs lainnya.

Dengan menjadi bagian dari AHKFTA, Indonesia berharap dapat meningkatkan akses pasar produk potensial dan produk unggulan, menciptakan peluang bisnis, meningkatkan arus perdagangan serta kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Hong Kong. Perjanjian ini juga mencakup komitmen liberalisasi tarif regional, sehingga Indonesia dapat memperkuat perannya dalam rantai produksi global (global value chain).

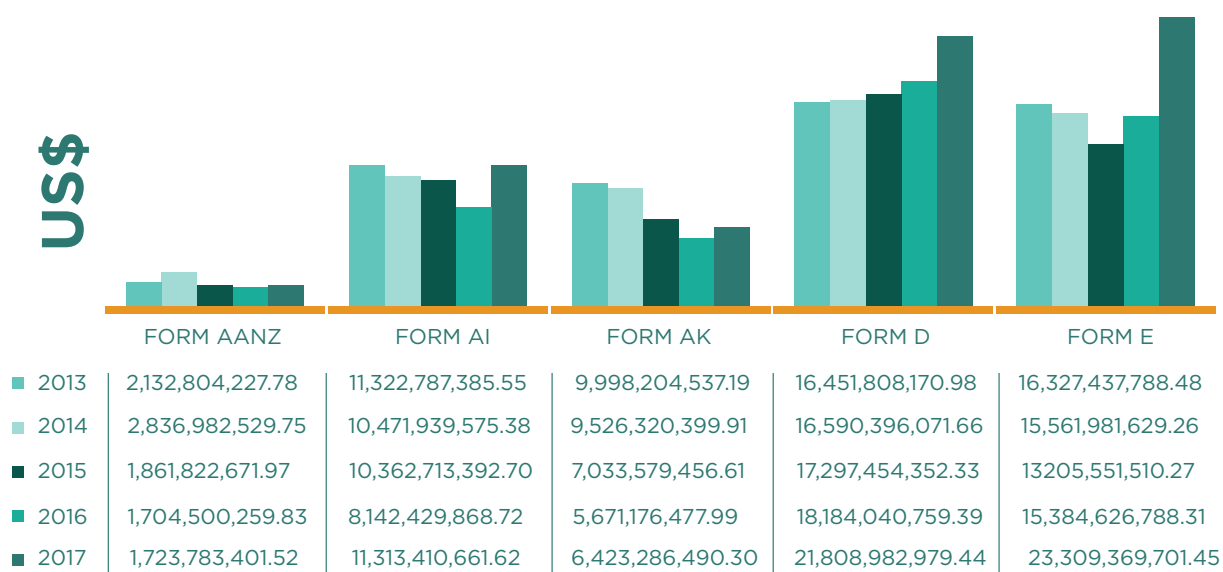
Tabel 1 Nilai Ekspor Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor (ASEAN, RRT, Korea, India, Australia, New Zealand) Periode 2012--2017 (miliar US\$)

JENIS FORM	Nilai FOB SKA, Milyar US\$						PERUBAHAN Ekspor (%) 2017/2016	TOTAL Ekspor, 2016	Share Ekspor dengan SKA Tahun 2016
	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
FORM AANZ	1,32	2,13	2,84	1,86	1,7	1,72	1,17	3,57	47,62%
FORM AI	8,27	11,32	10,47	10,36	8,14	11,31	38,94	10,09	80,67%
FORM D	16,52	16,45	16,59	17,3	18,1	21,8	20,44	33,2	54,52%
FORM AK	10,09	10	9,53	7,03	5,62	6,42	14,23	7,01	80,17%
FORM E	15,41	22,81	15,56	13,21	15,38	23,31	51,56	16,79	91,60%
TOTAL	51,64	62,71	54,99	49,76	48,94	64,56	31,92	70,66	69,20%

Sumber: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag

Keterangan: AANZ (ASEAN-Australia-New Zealand); AI (ASEAN-India); AK (ASEAN-Korea); D (ATIGA); E (ASEAN-China). Belum ada data penggunaan form ASEAN-JEPANG (AJ) karena perjanjian AJCEP baru diimplementasikan oleh Indonesia per 1 Maret 2018.

Grafik 1 Nilai Ekspor Indonesia yang Menggunakan Tarif Preferensi Tahun 2012–2017



Sumber: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor,
Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag

ASEAN-Mitra Strategis. Di samping bermitra dengan 7 (tujuh) Negara tersebut, ASEAN juga mengembangkan kerja sama perdagangan dengan Mitra Strategis ASEAN. Tujuannya adalah untuk memperkuat kontribusi perdagangannya dalam penanganan berbagai isu dan tantangan global, serta akan memastikan peran sentral ASEAN dalam evolusi arsitektur kawasan Asia Pasifik terhadap perdagangan dunia yang perwujudannya ditandai dengan adanya ekuilibrium dinamis. Negara-negara Mitra Strategis itu adalah Uni Eropa, Rusia, Amerika Serikat, dan Kanada.

ASEAN-EU. Gagasan pembentukan ASEAN-EU FTA telah muncul sejak bulan Agustus 2005. Dalam perkembangannya, Indonesia bersama dengan Negara anggota ASEAN dan perwakilan Uni Eropa telah melaksanakan ASEAN-EU Trade and Investment Work Programme 2017-2018. Selain itu, Indonesia juga berperan penting dalam terlaksananya kesepakatan Menteri Ekonomi ASEAN dan EU Trade Commissioner tanggal 10 Maret 2017 di Metro Manila, Filipina mengenai rencana mereaktivasi perundingan ASEAN-EU FTA yang telah terhenti sejak tahun 2009, setelah 6 (enam) putaran, serta disahkannya Roadmap on Framework of ASEAN EU FTA pada Pertemuan ke-26 SEOM-EU

Consultation tanggal 7 Juli 2017 di Cebu City, Filipina. Selanjutnya ASEAN dan EU membentuk Joint Working Group (JWG) on ASEAN-EU FTA yang telah bertemu sekali pada bulan Oktober 2017 di Palawan, Filipina dan pada akhir Januari 2018 di Brussel untuk melakukan pembahasan mengenai draf teks Framework ASEAN-EU FTA. Berdasarkan rekomendasi dari JWG tersebut pada tahun 2019, para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) dan EU akan memutuskan apakah perundingan ASEAN-EU FTA dimungkinkan untuk dimulai atau tidak perlu diteruskan.

ASEAN-Eurasian Economic Union (ASEAN-EAEU). Selain dengan EU, ASEAN saat ini juga membahas rencana peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN-Eurasian Economic Union (EAEU), khususnya terkait usulan Rusia untuk melaksanakan Joint Feasibility Study (JFS) tentang ASEAN-EAEU FTA, di mana ASEAN memandang bahwa masih terlalu dini untuk melakukan JFS, mengingat hubungan kerjasama ekonomi yang terjalin saat ini adalah ASEAN dengan Rusia, bukan dengan seluruh negara anggota EAEU. Untuk menjembatani perbedaan pandangan tersebut, ASEAN dan Rusia sepakat untuk melakukan orientasi dahulu dalam bentuk pertukaran informasi melalui *workshop* maupun *policy dialogue*. Adapun The Revised ASEAN-Russia Trade and Investment Cooperation Roadmap dan Post 2017 ASEAN-Russia Trade and Investment Cooperation, telah disahkan oleh ASEAN dan Rusia pada Pertemuan ke-6 AEM-Russia Consultations.

ASEAN-US. Di samping dengan Rusia, ASEAN juga membangun kerja sama dengan United States Trade Representatives (USTR), dimana ASEAN-US Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) telah ditandatangani pada tahun 2006 oleh Menteri Ekonomi Negara anggota ASEAN dan United States Trade Representatives (USTR) sebagai inisiasi dalam kerja sama bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam berbagai kesempatan Indonesia menyampaikan bahwa kerjasama ekonomi ASEAN dan Amerika Serikat perlu terus ditingkatkan melalui skema *win-win cooperation* dan mengharapkan Amerika Serikat untuk terus memberikan dukungannya terhadap berbagai kerja sama ekonomi dengan ASEAN melalui US-ASEAN Connect, Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), Expanded Economic Engagement (E3) dan ASEAN Connectivity dengan fokus pada pemberdayaan UMKM di ASEAN.

ASEAN-Kanada. Selaku Negara Koordinator, Indonesia terus memfasilitasi komunikasi antara ASEAN - Kanada dalam mendorong peningkatan kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Kanada. Pada Tahun 2017, ASEAN dan Kanada telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi khususnya dalam rangka melipatgandakan nilai perdagangan dan investasi antara ASEAN-Kanada. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, diantaranya yaitu: (1) Pelaksanaan ASEAN-Canada Trade Policy Dialogue yang pertama pada bulan Juli 2017 dengan topik peningkatan pemberdayaan UMKM di ASEAN; (ii) Pelaksanaan Preliminary Joint Feasibility Study for a potential ASEAN-Canada Free Trade Area (FTA) dan (iii) peluncuran ASEAN-Canada Exploratory Discussion sebagai wadah sharing informasi antara pemerintah ASEAN-Kanada terkait hal-hal yang dapat menentukan dibentuknya ASEAN-Canada FTA.

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan Mega FTA regional yang melibatkan 10 Negara anggota ASEAN dan 6 Negara Mitra Dagang yaitu Australia, Selandia Baru, RRT, Jepang, Korea Selatan dan India yang merupakan konsolidasi dari 5 (lima) ASEAN+1FTAs. RCEP yang diinisiasi oleh Indonesia pada Pertemuan ASEAN Summit bulan November 2011. Kemudian pada tahun 2012 disepakati Guiding Principles for RCEP Negotiations, bertujuan menciptakan perjanjian regional yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan memberikan keuntungan baik bagi 16 negara tersebut. Dengan beranggotakan 16 negara, kekuatan RCEP cukup signifikan di dunia, dimana Total GDP negara-negara RCEP mewakili 31,32% GDP dunia dan mewakili 28,7% perdagangan global. Lima belas negara peserta RCEP mewakili 55,2% ekspor Indonesia ke dunia dan 64,2% impor Indonesia dari dunia. RCEP juga merupakan 48,21% sumber FDI bagi Indonesia.¹⁷ Dalam hal ini Indonesia ditunjuk sebagai Country Coordinator perundingan RCEP.

Sejauh ini perundingan RCEP telah berlangsung sebanyak 20 Putaran dan sebanyak 2 (dua) Bab draf teks perjanjian terkait UKM dan kerja sama peningkatan kapasitas (ECOTECH) telah disepakati. Disamping itu, selaku inisiator RCEP, ASEAN berkomitmen meningkatkan soliditasnya (Sentralitas ASEAN) agar dapat mengusulkan langkah-langkah penyelesaian perundingan RCEP pada tahun 2018. Salah satu langkah

17 World Bank dan Trade Map.

yang diupayakan adalah dengan mendorong masing-masing anggota RCEP melakukan recalibrasi ambisi liberalisasi. Dalam hal ini, negara dengan ambisi terlalu rendah (seperti India dan RRT) diharapkan meningkatkan *offer*-nya dan negara dengan ambisi tinggi menurunkan tuntutan (seperti Australia dan Selandia Baru). Perundingan RCEP diharapkan dapat dituntaskan secara substansial pada akhir tahun 2018, sesuai arahan Kepala Negara/Pemerintahan RCEP pada KTT RCEP Pertama pada tanggal 14 November 2017 di Manila, Filipina.

Kerja sama Sub-Regional. Forum kerja sama Sub Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dibentuk pada Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-1 pada 20 Juli 1993. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta memperkecil kesenjangan ekonomi daerah perbatasan antar negara. Kerja sama ini mencakup 32 (tiga puluh dua) provinsi yang tersebar di tiga negara anggota (Indonesia, Malaysia dan Thailand). Dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia di kawasan IMT-GT (10 Provinsi di Sumatera) telah mengusulkan 3 (tiga) proyek untuk segera diimplementasikan dalam konteks kerja sama Trade and Investment, yakni: (1) upaya pembukaan jalur konektivitas laut rute Dumai (Indonesia)-Melaka (Malaysia) (Acceleration of implementation of Dumai-Melaka RoRo Services), di mana pengoperasian RoRo ini juga merupakan bagian dari Master Plan on ASEAN Connectivity; (2) pembentukan kerja sama antar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (atau Special Economic Zone (Sabang, Sei Mangke and Tanjung Api-Api)); dan (3) pengembangan industri pengolahan karet (Feasibility Study for Economic Corridor for Rubber Product), kedepan, inisiatif ini dapat juga mengkaji potensi konektivitas dan integrasi koridor ekonomi ini dengan Kota Songkhla dan Kedah dalam proyek Rubber City.

Kerja sama Sub Regional BIMP-EAGA merupakan kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan ekonomi serta pemerataan pembangunan di kawasan provinsi daerah perbatasan antara Brunei Darussalam (Seluruh wilayah Brunei Darussalam), Indonesia (15 Provinsi), Malaysia (3 Provinsi) dan Filipina (2 Provinsi). Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Provinsi di kawasan timur Indonesia yang masuk dalam cakupan BIMP-EAGA, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sebagai salah satu capaian pada tahun 2017 dari kerja sama ini, yaitu telah dibukanya jalur konektivitas laut rute Bitung-Davao / General Santos, yang menghubungkan Indonesia (bag. Timur) dengan Filipina (bagian Selatan), yang telah diresmikan oleh kedua kepala negara pada KTT BIMP-EAGA ke-12 pada 30 April 2017 di Davao, Filipina.

■ Implementasi Penghapusan/Penurunan Hambatan Tarif dan Non-Tarif

Penghapusan/Pengurangan Hambatan Tarif. Dalam rangka implementasi komitmen tarif bea masuk sesuai dengan Jadwal Penurunan Tarif (Tariff Reduction Schedule) yang disepakati dalam masing-masing skema FTA (ATIGA, ACFTA, AJCEP, AKFTA, AFTA dan AANZFTA), Pemerintah Indonesia akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) segera setelah perjanjian diratifikasi. Mengingat Indonesia telah menerapkan HS 2017, maka Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk seluruh Perjanjian FTA tersebut diterbitkan kembali dalam HS2017. Untuk skema ATIGA, PMK terakhir yang diterbitkan adalah PMK Nomor 25/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ATIGA. Selain mengatur mengenai besaran tarif bea masuk preferensi dalam rangka ATIGA, PMK ini juga mengatur ketentuan umum pengenaan tarif.

Penetapan tarif bea masuk Indonesia skema ACFTA diatur terakhir di dalam PMK Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA. Selain mengatur mengenai besaran tarif bea masuk preferensi dalam rangka ACFTA, PMK ini juga mengatur ketentuan umum pengenaan tarif dan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang pedoman teknis untuk melakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Asal (SKA) dalam rangka pelaksanaan ketentuan asal barang, dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan, terkait skema AJCEP diatur dalam PMK Nomor 18/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AJCEP, yang telah ditetapkan pada 15 Februari 2018, dan mulai diberlakukan per 1 Maret 2018.

Untuk skema AKFTA diatur terakhir melalui PMK Nomor 24/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AKFTA. Selain mengatur mengenai besaran tarif bea masuk preferensi dalam rangka AKFTA, PMK

ini juga mengatur ketentuan umum pengenaan tarif dan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang pedoman teknis untuk melakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Asal (SKA) dalam rangka pelaksanaan ketentuan asal barang, dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Terkait dengan skema AIFTA, penetapan tarif bea masuk diatur terakhir di dalam PMK Nomor PMK 27/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AIFTA. Selain mengatur mengenai besaran tarif bea masuk preferensi dalam rangka AIFTA, PMK ini juga mengatur ketentuan umum pengenaan tarif. Untuk skema AANZFTA diatur terakhir di dalam PMK 28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AANZFTA. Sementara untuk AHKFTA, PMK akan diterbitkan setelah Indonesia menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan komitmen Jadwal Penurunan Tarif dari seluruh skema FTA tersebut di atas, tercatat bahwa pada tahun 2016 terdapat sekitar 8.970 pos tarif atau 92,68% total pos tarif yang bea masuknya sudah 0%, sisa 7,32% pos tarif masih memiliki tarif. Selanjutnya pada tahun di tahun 2017, jumlah pos tarif yang tarifnya sudah 0% meningkat menjadi 93,82% dari total pos tarif sehingga menyisakan 6,18% pos tarif yang masih memiliki tarif (belum 0%).

Surat Keterangan Asal (SKA). Lebih lanjut, agar suatu barang dapat mendapatkan tarif preferensi suatu skema FTA, barang tersebut harus memenuhi ketentuan tentang asal barang. Hanya barang yang diidentifikasi berasal dari suatu negara anggota yang bisa menikmati tarif preferensi. Pengaturan kriteria keasalan berdasarkan berbagai perjanjian integrasi ekonomi, meliputi, antara lain: (a) barang yang sepenuhnya didapat atau diproduksi di negara anggota pengekspor, dan (b) barang yang tidak sepenuhnya didapat atau diproduksi di negara anggota pengekspor, sepanjang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang paling umum adalah memenuhi prosentase Regional Value Content sebesar 40%, atau dapat diartikan 40% bahan baku yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang akan di ekspor harus berasal dari Negara anggota penandatanganan FTA. Pengaturan persyaratan ini secara lebih detil terdapat dalam perjanjian-perjanjian terkait.

Dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (CoO) merupakan surat keterangan yang menunjukkan bahwa suatu barang memenuhi kriteria “originating” untuk

mendapatkan tarif preferensi, yang disertakan pada saat barang tersebut memasuki wilayah suatu negara tujuan ekspor tertentu. SKA tersebut akan dapat membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di suatu negara sebagaimana ketentuan “originating” yang disepakati dalam Perjanjian. SKA yang diterbitkan di Indonesia oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, juga merupakan dokumen pelengkap kepabeanan. Saat ini, terdapat 86 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal di Indonesia (IPSKA) di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan, sehingga produk ekspor Indonesia bisa mendapatkan tarif preferensi di negara tujuan ekspor Indonesia dengan bea masuk 0% atau sesuai kesepakatan Indonesia dengan ASEAN dan Mitra Dialog ASEAN pada perjanjian Free Trade Agreement (FTA) yang telah ditandatangani oleh Indonesia bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya dan masing-masing Negara Mitra. SKA Form yang digunakan dalam memanfaatkan tarif preferensi, yaitu: (a) SKA Form D (ATIGA); (b) SKA FORM E (AFCTA); (c) SKA Form AJ (AJCEP); (d) SKA Form AI (AIFTA); dan (e) SKA Form AANZ (AANZFTA). Pada Tabel 1 di atas dan Tabel 2 di bawah ini, disajikan gambaran peningkatan Nilai Ekspor Indonesia yang menggunakan SKA Preferensi di Internal dan Eksternal ASEAN.

Tabel 2 Peningkatan Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi

Jenis Form	2015		2016		Pertumbuhan Jumlah SKA 2015-2016	Pertumbuhan Nilai FOB 2015-2016	2017		Pertumbuhan Jumlah SKA 2016-2017	Pertumbuhan Nilai FOB 2016-2017
	Jumlah SKA	Nilai FOB (Miliar US\$)	Jumlah SKA	Nilai FOB (Miliar US\$)			Jumlah SKA	Nilai FOB (Miliar US\$)		
AANZ	47.270	1,862	52.108	1,704	10,23%	-8,47%	54.527	1,724	4,64%	1,16%
AI	31.630	10,363	35.663	8,878	12,75%	-14,33%	41.555	11,313	16,52%	27,43%
AK	51.318	7,034	58.688	5,628	14,36%	-19,98%	65.301	6,423	11,27%	14,12%
D	158.892	17,298	169.402	17,093	6,61%	-1,18%	180.380	21,809	6,48%	27,59%
E	72.386	13,206	78.149	14,343	7,96%	8,62%	87.737	23,309	12,27%	62,51%
TOTAL	361.496	49,761	394.010	47,647	8,99%	-4,25%	429.500	64,579	9,01%	35,54%

Sumber: Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan nilai ekspor Indonesia yang menggunakan SKA Preferensi

ke negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara mitra ASEAN pada tahun 2017 mengalami kenaikan signifikan, dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar -4,25%. Sementara itu untuk pemanfaatan SKA oleh pelaku usaha juga mengalami kenaikan dari 8,99% pada tahun 2016 menjadi 9,01% pada tahun 2017. Peningkatan utilisasi SKA Preferensi ini sangat jelas disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor ke negara anggota ASEAN dan mitra ASEAN, khususnya RRT yang menggunakan tarif preferensi ACFTA, yang meningkat sebanyak 62,51% dibandingkan tahun sebelumnya (2016). Hal ini menunjukkan bahwa Perjanjian ACFTA yang selalu dikhawatirkan mengancam pasar domestik Indonesia, justru memberikan peluang bagi peningkatan ekspor Indonesia.

Hambatan Non-Tarif. Selain itu, Indonesia bersama-sama dengan negara anggota ASEAN maupun mitra ASEAN sepakat untuk mengurangi hambatan non tarif agar perdagangan intra-ASEAN mengalami peningkatan signifikan sehingga kawasan ASEAN bisa lebih mampu berkontribusi dan menghadapi dinamika perkembangan perekonomian global. Saat ini, implementasi dari komitmen ASEAN telah berhasil menghapus hambatan tarif di atas 96,01% dari total seluruh pos tarif dalam skema ASEAN Trade in Goods (ATIGA), bahkan untuk Singapura seluruh pos tarifnya sudah 0%. Namun dalam kenyataannya, semakin rendahnya hambatan tarif tidak serta merta meningkatkan intra-trade ASEAN. Sebagaimana diketahui, intra-trade ASEAN stagnan berada di tingkat 24-25% sejak ASEAN mulai menghapus tarif lebih dari 90% pos tarif yang diperdagangkan.

Faktanya, masing-masing negara anggota ASEAN masih menggunakan hambatan non-tarif bagi produk-produk yang tarifnya telah rendah dan bahkan 0% apabila produk tersebut dinilai masih memerlukan perlindungan. Sehingga masing-masing anggota ASEAN membentuk suatu forum untuk membahas dan mencari solusi bagi kebijakan-kebijakan non-tarif yang diterapkan satu negara anggota dan diprotes oleh negara anggota ASEAN lainnya. Untuk menyelesaikan isu ini, AEC Blueprint 2025 telah memberikan mandat untuk eliminasi NTMs/NTBs melalui peningkatan fasilitasi perdagangan di ASEAN, melalui re-aktifasi ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC), serta pengembangan website ASEAN Solutions for Investments, Services and Trade (ASSIST), sebagai mekanisme penyelesaian kasus hambatan ekspor berbasis online.

Beberapa pelaku usaha/asosiasi seperti The ASEAN Business Advisory Council, US-ASEAN Business Council, EU-ASEAN

Business Council dan business councils lainnya juga telah menyampaikan permintaan untuk segera dilakukannya penghapusan NTMs /NTBs di ASEAN dan ASEAN+1 FTA, terutama dengan adanya kesepakatan di ASEAN untuk mengurangi biaya transaksi perdagangan sebesar 10% pada tahun 2020, yang diukur melalui ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators (ASTFI). Selain itu, berdasarkan database NTMs masing-masing negara anggota ASEAN, yang dibangun oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) bekerjasama dan United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), secara detil mencatat bahwa 35% NTMs di ASEAN terdiri atas 43,1% isu Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan 12,8 % isu Technical Barrier to Trade (TBT), yang berpotensi menghambat perdagangan dan investasi di ASEAN.

Pada pertemuan High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI) ke-32 pada bulan Agustus tahun 2017 di Filipina, ASEAN telah menyepakati prosedur untuk mengurangi NTMs/NTBs, yaitu: (i) mendefinisikan atau menentukan kriteria bagaimana suatu measure dipandang sebagai hambatan (*barriers*) dalam perdagangan; (ii) menjalankan mekanisme *counter notification* ketika salah satu negara anggota ASEAN dapat menotifikasi adanya pemberlakuan NTMs/NTBs dari negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini akan disesuaikan dengan prosedur notifikasi yang berlaku di WTO; (iii) meningkatkan *engagement* dengan pelaku usaha karena pelaku usaha akan lebih memahami apakah suatu *measure* merupakan hambatan dalam perdagangan atau tidak; dan (iv) menciptakan sistem “*scorecard*” ketika setiap negara anggota ASEAN bertanggung jawab untuk memonitor penurunan/penghapusan NTMs/NTBs di negaranya masing-masing dan melaporkan perkembangannya secara tahunan.

Hal-hal tersebut menunjukkan keseriusan ASEAN di dalam mengatasi hambatan non-tarif. Komitmen ASEAN untuk menyelesaikan isu-isu tersebut dilakukan forum konsultasi Matrix of Actual Cases di antara negara anggota ASEAN. Setiap negara anggota ASEAN dapat mengajukan keberatan terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Negara anggota lainnya. Seluruh keberatan tersebut dikompilasi dalam Matrix of Actual Cases ASEAN.

Hambatan Non Tarif yang dihadapi oleh Indonesia dalam hubungan perdagangan ASEAN dengan Negara Mitra FTA/ Dialog ASEAN pada tahun 2017 diidentifikasi sebanyak 5 (lima) kasus, yakni: (i) kasus Direct Consignment dalam

skema AKFTA; (2) kasus Food Safety dalam skema AKFTA; (3) hambatan ekspor sarang burung walet asal Indonesia ke RRT dalam skema ACFTA; (4) hambatan ekspor kertas rokok ke RRT dalam skema ACFTA; dan (5) penolakan pemberian tarif preferensi 0% dalam skema AIFTA untuk produk perhiasan asal Indonesia. Dari ke-lima kasus di atas, Indonesia telah berhasil menyelesaikan 3 (tiga) kasus, yaitu kasus *direct consignment*, *food safety*, dan hambatan ekspor sarang burung walet. Sementara untuk hambatan ekspor produk kertas rokok dalam skema ACFTA dan hambatan eksportasi produk perhiasan dalam skema AIFTA, saat ini Indonesia terus mendorong RRT dan India dalam berbagai fora perundingan agar kedua kasus tersebut dapat segera diselesaikan.

KESIMPULAN

Sejarah bangsa Indonesia sudah sejak lama mengenal dan melakukan perdagangan internasional, maka dengan demikian sejarah pula yang seharusnya menjadi pijakan untuk berbenah dalam menghadapi tantangan kawasan hingga tantangan global.

Berbagai upaya untuk menegaskan peran strategis Indonesia di forum Internasional terus dilakukan, untuk mencapai manfaat dari potensi kerja sama. Indonesia tidak dapat lagi berkata mundur dari wacana liberalisasi, namun Indonesia harus dapat memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mengambil peluang serta keuntungan dari liberalisasi itu sendiri. Kinerja industri, termasuk obat, makanan dan minuman serta sektor hulu seperti pertanian, perikanan, energi dan mineral harus ditingkatkan agar pasar yang terbuka di 9 (sembilan) negara ASEAN lainnya, 6 (enam) negara mitra dialog, 1 (satu) special administrative region dan sejumlah negara mitra strategis, diisi secara maksimal untuk menghasilkan devisa negara.

Hal tersebut dapat dilakukan apabila Indonesia melaksanakan semua program pemerintah yang telah ditetapkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan daya saing industri dan sektor hulu (bahan baku/mentah) nasional Indonesia. Indonesia tidak memiliki pilihan lain, selain memainkan perannya secara aktif dengan tidak melupakan berbagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar ekonomi, berbagai kemudahan bagi UMKM, pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja terampil dan mampu beradaptasi menghadapi berbagai perubahan, hingga kebijakan yang lebih fokus pada sektor-sektor unggulan. Dengan terselesaikannya pekerjaan rumah tersebut, maka Indonesia akan bisa menjawab pertanyaan, di mana dia akan ditempatkan dalam peta perekonomian dunia di masa depan.

Mengutip pandangan Iman Pambagyo dalam tulisannya mengenai Keseimbangan Baru Globalisasi, bahwa Indonesia, dan seperti semua negara lainnya di dunia tidak dapat menghentikan globalisasi. Hal yang perlu dilakukan adalah mengambil-alih kemudi globalisasi dan mengarahkannya agar lebih humanis. Sama seperti apa yang dilakukan Taiwan, Korsel, Singapura, India, RRT bahkan Viet Nam. Semenjak RRT mulai membuka diri di tahun 2004 dan meningkatkan kekuatan internalnya, tidak ada satu pun negara yang tidak mengakui efek domino dari *the rise of China and India*. Lebih dari itu kerja sama perdagangan internasional tidak hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja, namun juga bermanfaat untuk mempererat kerja sama di bidang lain seperti politik, sosial dan pertahanan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Amerika Serikat. <https://www.kemlu.go.id/ptri-asean/lc/Pages/Amerika-Serikat.aspx>, diakses tanggal 26 Februari 2018.

ASEAN Secretariat. ASEAN Statistical Leaflet Selected Key Indicators. 2017, www.asean.org

ASEAN Secretariat. ASEAN Statistical Year Book. 2016/2017, www.asean.org

ASEAN Statistic. www.aseanstats.org

Cetak biru dari AEC dapat dilihat di www.asean.org

Data Perdagangan dalam www.worldbank.org

Data Perdagangan dalam www.trademap.org

Darwin, Arfiansyah. Tinjauan Umum Atas Tujuh Kesepakatan Perdagangan yang Telah Diimplementasikan Di Indonesia: Seberapa Liberalkah Indonesia? Jurnal BPPK, Volume 8 Nomor 1, Jakarta, 2015.

Del Duca, Louis F, Teaching of European Community Experience for Developing Regional Organizations, 11 Dickinson Journal of International Law 485, 1993

Fawcett, L., & Hurrell, A. 2002. Regionalism in Worlds Politic. Oxford University Press.

Halwani, Hendra. 2005. Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi (Edisi. Kedua). Ghalia Indonesia: Bogor. Jhingan M.L. (1996)

Hurrell, A. 1995. Regionalism in Theoretical Perspective. In Regionalism in World Politics, edited by Louise Fawcett and Andrew Hurrell, PP. 3-73. Oxford: Oxford University Press

Hubungan Kemitraan ASEAN-Kanada. <https://www.kemlu.go.id/ptri-asean/en/Pages/Kanada.aspx>, diakses tanggal 26 Februari 2018.

Jones, Walter. S, 1993, Logika Hubungan: Kekuasaan, Ekonomi Politik dan Tata Dunia, Gramedia, Jakarta.

Kementerian Perdagangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja DPA. 2017.

Kementerian Perdagangan. Kerja Sama Association of South East Asia (ASEAN) dengan European Union (EU).

Louise Fawcett and Andrew Hurrell, pp. 3-73. Oxford: Oxford University Press.

Pambagyo, Iman. Keseimbangan Baru Globalisasi. Bisnis Indonesia, 16 Maret 2017

Paul R. Krugman & Obstfeld. M. 1994. International Economics Theory and Policy. Third Ed. New York: Harper Collins College Publishers.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2006. Nomor 69 Tahun 2006 tentang Pengesahan Agreement Between The Governments of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Government of The Russian Federation on Economic and Development Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 54.

Perjanjian Perdagangan RCEP diintensifkan.nasional.kontan.co.id/news/perjanjian-perdagangan-rcep-diintensifkan, diakses tanggal 26 Februari 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AANZFTA. Jakarta: Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AIFTA. Jakarta: Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ATIGA. Jakarta: Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AKFTA. Jakarta: Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA. Jakarta: Kementerian Keuangan.

R. Viooti, Paul. 1993. International Relations Theory: Realism, pluralism and Globalism. New York: MacMillan Publishing Company.

Rinaldy, E. 2000. Kamus istilah perdagangan internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Salvatore, D. 2007. International Economics. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc

C. Kerjasama Ekonomi Indonesia Dibagian Perbatasan

Kerjasama Ekonomi di Perbatasan RI-Timor Leste Oleh: Humphrey Wangke¹

■ Pengantar

Pengertian kawasan perbatasan negara menurut UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Sedangkan menurut UU 43/2008 tentang Wilayah negara, kawasan perbatasan negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga.

Melihat potensi ekonomi di perbatasan, pemerintah perlu membangun suatu zona perdagangan antar-penduduk di wilayah perbatasan, dimana penduduk perbatasan dari dua negara dapat melakukan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Tentunya akan ada permasalahan ikutan, baik yang bersifat kriminal atau lainnya, namun itu harus bisa diantisipasi dan dikendalikan. Dua negara bertetangga seharusnya dapat bekerja sama menetapkan suatu area perdagangan yang berada diantara pos penjagaan perbatasan dan peraturan mengenai zona perdagangan antar-penduduk dan sekaligus mengelolanya bersama-sama. Dengan demikian keberadaan zona perdagangan antar-penduduk tersebut dapat menjadi penggerak perkembangan ekonomi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan.

Adanya kesamaan budaya dan adat antara masyarakat di perbatasan serta faktor kesenjangan ekonomi menyebabkan munculnya mobilitas penduduk lintas batas yang memerlukan penanganan khusus. Lemahnya pengelolaan ekonomi di kawasan perbatasan menyebabkan adanya potensi kerawanan terhadap *transnasional crime*. Untuk mengatasi ketertinggalan kabupaten/kota di perbatasan salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan memfokuskan pada pengembangan ekonomi wilayah

¹ Peneliti Madya bidang Hubungan Internasional pada Badan Keahlian DPR RI.

kabupaten/kota untuk dapat menjadi produsen hulu/hilir bagi negara tetangga, dan mendorong optimalisasi potensi-potensi kabupaten/kota agar memiliki nilai tambah sebagai *market* perdagangan dengan negara tetangga.

Dalam beberapa tahun terakhir ini telah muncul kesadaran diantara negara-negara di dunia tentang pentingnya perdagangan lintas batas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semua negara tentunya sepakat bahwa fasilitasi perdagangan akan memberikan keuntungan untuk semua pihak. Membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasan melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan akan memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya.

Di Indonesia, perdagangan lintas batas masih diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang mengharuskan semua produk makanan dan minuman, alas kaki, elektronik, pakaian jadi, dan mainan anak-anak hanya boleh melalui pelabuhan laut Belawan, Medan; Tanjung Perak, Surabaya; Tanjung Mas, Semarang; Tanjung Priok, Jakarta; dan melalui bandara internasional. Karena itu, agar manajemen di perbatasan menjadi lebih kompetitif maka cara yang bisa ditempuh adalah dengan menyingkirkan hambatan-hambatan yang tidak perlu agar perdagangan di perbatasan menjadi lebih lancar.

■ **Pokok Permasalahan**

Ada 3 pos lintas batas negara (PLBN) di NTT yang telah diresmikan penggunaannya oleh pemerintah pada tahun 2017 lalu yaitu di Motaain (Kabupaten Belu), Motamasin (Kabupaten Timor Tengah Utara) dan Wini (Kabupaten Malaka). Pemerintah menyediakan dana hingga Rp 875 miliar untuk ketiga PLBN di NTT itu. Selain membangun PLBN, pemerintah juga membangun infrastruktur di kawasan permukiman sekitar perbatasan berupa sarana air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan ruang publik. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerataan hasil pembangunan dan pengurangan kesenjangan. Dengan dibangunnya sejumlah infrastruktur, Indonesia optimistis akan semakin banyak komoditas dari Indonesia yang di ekspor ke negara tetangga. Barang-barang yang berasal dari Indonesia ke Timor Leste lebih lengkap dan kompetitif dari sisi harga.

Dengan dibangunnya ketiga PLBN itu diharapkan di perbatasan Indonesia-Timor Leste tidak ada lagi pelanggaran

yang kerap terjadi seperti *illegal logging*, penyelundupan BBM dan sembako. Perdagangan ilegal ini dilakukan dengan menyeberang perbatasan hingga sejauh 1-2 km melalui jalan tikus.

Persoalan perbatasan RI-Timor Leste (TL) tergolong cukup rumit. Pada awalnya dipisahkan oleh Belanda dan Portugal, kemudian Timtim berintegrasi ke Indonesia, dan disepakati untuk membuat perbatasan baru yaitu perbatasan provinsi. Sekarang kedua wilayah kembali terpisahkan karena Timtim telah menjadi negara Timor Leste sehingga perbatasan harus dikembalikan seperti semula atau membentuk perbatasan baru.

Dengan kondisi seperti itu, Provinsi NTT dan Timor Leste mengalami kesulitan untuk menentukan tapal batas. Masalah adat menjadi kendala utama. Orang Timor yang berada di Indonesia dan Timor Leste berasal dari satu etnis, menggunakan bahasa yang sama, satu nenek moyang dan satu asal-usul. Orang Timor di Indonesia dapat memiliki lahan di Timor Leste dan demikian juga sebaliknya. Konsekuensinya, ketika Timor Leste merdeka, penduduk yang melakukan lintas batas melalui jalan-jalan tikus akan langsung ditangkap karena jalan-jalan tersebut bukan merupakan jalur resmi, padahal menurut mereka jalan-jalan tersebut merupakan jalur pintas.

Namun demikian para pelintas batas tetap saja melakukan aktivitas perdagangan sembako dan BBM melalui jalan-jalan tikus ini, hanya saja transaksi perdagangan di garis perbatasan, dan tidak lagi masuk ke wilayah negara lainnya. Masyarakat Timor Leste umumnya membeli sembako dan BBM dari masyarakat Indonesia dan menggunakan mata uang rupiah. Jadi walaupun secara resmi negara mereka menggunakan dolar AS, tetapi masyarakatnya masih banyak yang menggunakan rupiah.

Selama ini batas darat menjadi fokus pembicaraan karena rumitnya perundingan. Misalnya di salah satu segmen di Kabupaten Belu sebelah barat garis batas RI-Timor Leste berupa aliran sungai. Kalau hujan dan terjadi banjir, aliran sungai akan meluap dan mengikis tanah di bagian wilayah Indonesia dan Timor Leste ini menimbulkan permasalahan karena di tengah sungai ada dataran yang merupakan daerah subur seluas sekitar 42 Ha yang dimanfaatkan untuk areal pertanian oleh kedua belah pihak.

Untuk masalah infrastruktur dan sosial dasar di wilayah perbatasan, kondisinya masih jauh dari apa yang kita

harapkan. Padahal potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah NTT di perbatasan itu sangat besar, diantaranya adalah kayu jati, gaharu, dan cendana. Ketiga sumber daya alam inilah yang terkadang memicu terjadinya permasalahan lintas batas, karena seringkali terjadi *illegal logging*. Tingkat pembangunan di wilayah perbatasan selama ini juga sangat kecil, mengingat terbatasnya anggaran yang ada. Mengenai perdagangan lintas batas, masyarakat kedua negara biasa melakukan transaksi perdagangan secara resmi di Motaain dengan penggunaan pas lintas batas.

Pelanggaran yang kerap terjadi di perbatasan adalah *illegal logging* dan penyelundupan BBM dan sembako dari Indonesia ke Timor Leste. Barang-barang dari Indonesia lebih banyak dijual ke Timor Leste. Misalnya untuk sembako, satu barang kebutuhan pokok yang berharga Rp 1.000,- di Indonesia bisa menjadi Rp 4.000,- di Timor Leste. Mereka melakukan perdagangan ilegal ini dengan menyeberang perbatasan hingga sejauh 1-2 km melalui jalan tikus.

■ Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Penyelesaian masalah di perbatasan tidak cukup dilakukan dengan melakukan pembangunan secara fisik di perbatasan. Persoalan penting yang harus dipikirkan adalah strategi pengelolaan perbatasan agar menguntungkan bagi Indonesia. Memperhatikan kondisi di lapangan, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan, yaitu: 1. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada sentra-sentra kawasan perbatasan yang potensial melalui basis ekonomi kerakyatan dengan tersedianya infrastruktur yang memadai; 2. Menciptakan stabilitas politik yang kondusif dan konstruktif guna mendukung pelaksanaan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan; 3. Meletakkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan utama dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat di kawasan perbatasan secara nyata; dan 4. Meningkatkan kinerja manajemen pembangunan melalui kualitas aparatur pemerintah, sehingga mampu menjadi fasilitator pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Dalam pembangunan dan penyejahteraan kawasan perbatasan ada 3 level pemerintah yang turut membantu menyukseskan pengelolaannya, yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Daerah punya tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Begitupun masyarakatnya, dilibatkan dalam mengelola wilayahnya. Masyarakat dilibatkan karena mempunyai nilai-nilai atau kearifan lokal

yang bisa memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengelola kawasan perbatasan. Badan Nasional Pengelolaan BNPP harus terus mendorong perencanaan partisipatif dari masyarakat. agar apa yang dibangun justru tidak dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada tingkat lokal, permasalahan yang dihadapi oleh daerah perbatasan adalah keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik (infrastruktur), rendahnya kualitas SDM pada umumnya, dan penyebaran penduduk yang tidak merata.

Sementara pada tingkat nasional, permasalahan daerah perbatasan adalah berupa kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada pembangunan daerah perbatasan serta masih kurangnya personil, anggaran, prasarana dan sarana, serta kesejahteraan; terjadinya perdagangan lintas batas illegal; kurangnya akses dan media komunikasi serta informasi dalam negeri; terjadinya proses pemudaran (degradasi) wawasan kebangsaan; serta belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan.

Untuk mengatasi tantangan seperti ini maka langkah yang sangat mendesak dilakukan saat ini adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kawasan perbatasan merupakan wewenang pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah pusat kurang memberikan perhatian yang semestinya sehingga sering terjadi penyelundupan di perbatasan. BNPP dapat memfasilitasi kesenjangan ini agar pengelolaan perbatasan dapat lebih terarah meskipun wewenang yang dimiliki terbatas.

Perlu digarisbawahi, saat ini faktor keamanan bukan lagi kendala di perbatasan, tetapi kurangnya pengaturan menyebabkan sering munculnya penyelundupan. Melihat besarnya potensi perdagangan di perbatasan, sudah saatnya pemerintah melakukan pengaturan perdagangan secara resmi dengan pemerintah Timor Leste. Pengaturan perdagangan (*Border Trade Agreement*) dengan sendirinya akan menjadi *Standard Operation Procedure* dalam melakukan perdagangan di perbatasan.

Melihat kondisi di lapangan, perdagangan lintas batas sebaiknya diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok saja. Karena itu, pasar tradisional yang ada di perbatasan perlu dimaksimalkan pemanfaatannya. Untuk itu,

pemerintah pusat sebaiknya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sebab pengadaan pasar tradisional ini merupakan wewenang pemerintah pusat yang seharusnya pengelolaannya diserahkan pada pemerintah daerah.

Perbatasan seharusnya hanya untuk kegiatan ekonomi penduduk yang berada di kawasan perbatasan saja. Sedangkan yang berada di luar kawasan perbatasan seharusnya dikenai hukum positif yang berlaku. Sebab bagi masyarakat di perbatasan, perbatasan lebih banyak dilihat sebagai perbatasan antar kampung sistem kekerabatan yang masih mereka miliki. Karena itu seandainya dibuat aturan baru yang mengatur tentang lalu lintas orang di perbatasan maka akan dirasakan menghambat hubungan kekerabatan mereka.

Isu Ekonomi Perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara

Oleh: Adirini Pujayanti²

Pembangunan kawasan perbatasan menjadi salah satu isu yang cukup penting pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019). Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi Indonesia di pasar internasional, pembangunan perbatasan dilaksanakan dengan paradigma *outward looking* dengan memperkuat daerah-daerah dan desa terdepan Indonesia dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Pembangunan infrastruktur fisik di tingkatkan dengan harapan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara keseluruhan.

Kalimantan Utara adalah provinsi perbatasan dengan negara Malaysia. Dengan terbentuknya provinsi Kalimantan Utara 25 Oktober 2012 masalah perbatasan di kawasan ini diharapkan akan lebih diperhatikan. Provinsi ini memiliki dua kabupaten perbatasan, yaitu kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan Serawak di Malaysia. Isu kesejahteraan dan sosial politik di Kalimantan Utara menjadi penting karena wilayah ini memiliki topografi berupa pegunungan dan pesisir. Wilayah perbatasan darat, khususnya di wilayah hutan pegunungan terisolir sehingga sulit dijangkau. Sementara untuk perbatasan laut telah terdapat Pintu Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung telah terdapat di Tanah Merah Kelurahan Nunukan Utara.

■ Lemahnya Bargaining Power

Selama ini dengan alasan keamanan, perbatasan laut negara di pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara paling banyak mendapat perhatian. Namun kesenjangan sosial ekonomi penduduk Indonesia-Malaysia di perbatasan Kalimantan Utara juga perlu diprioritaskan. Dengan semboyan 'Indonesia di dadaku, Malaysia diperutku', bertahun-tahun masyarakat di kawasan perbatasan lebih banyak pergi mencari nafkah dan mengandalkan kebutuhan hidupnya dari Malaysia. Kemiskinan akibat keterisolasian wilayah pedalaman

² Peneliti Madya bidang Hubungan Internasional pada Badan Keahlian DPR RI.

perbatasan juga menjadi pemicu masyarakat menjadi pelintas batas ilegal untuk memperbaiki perekonomiannya. Adanya ikatan kekerabatan antar penduduk di kedua negara membuat masyarakat mudah melakukan perjalanan lintas perbatasan negara atau memilih tinggal di tempat kerabatnya di negara tetangga. Dengan melihat kenyataan kesejahteraan masyarakat di negara tetangga yang lebih baik dapat menimbulkan kecemburuan sosial, mudah terbujuk melakukan kegiatan ilegal, dan dikhawatirkan berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan Indonesia.

Negara harus hadir berperan utama dalam menegakan kedaulatan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan bagi penduduk perbatasan. Kesenjangan ekonomi di perbatasan Kalimantan Utara menyebabkan *bargaining power* mereka terhadap Negara Bagian Sabah dan Serawak lemah. Kedua negara bagian Malaysia tersebut secara sepihak dapat melanggar kesepakatan yang telah disepakati dan diputuskan bersama dalam forum Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). Sebagai contoh, pernah terjadi dalam kasus narkoba, WNA Malaysia pembawa narkoba tertangkap oleh pihak berwajib Indonesia. Pihak keluarga yang didukung Pemda Sabah ingin menghentikan kasus itu dengan secara sepihak dengan menghentikan ekspor sembako ke Nunukan.

Dalam menjaga hubungan bilateral yang harmonis antara dua negara bertetangga, Indonesia dan Malaysia telah membuat perjanjian Sosial Ekonomi Malaysia dan Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan Sosek Malindo pada tahun 1967. Forum Sosek Malindo ini merupakan kerjasama di bidang sosial ekonomi yang menyelenggarakan pertemuan tahunan secara reguler dengan tempat yang saling bergantian. Dalam pelaksanaannya kegiatan Sosekmalindo sukses sebagai ajang diplomasi budaya untuk tetap mempererat ikatan persaudaraan serumpun. Namun pembahasan isu kerjasama ekonomi terutama terkait kepentingan Kalimantan Utara, masih belum optimal. Pembahasan isu terkait kepentingan Kalimantan Utara belum dilakukan secara khusus dan masih menjadi bagian dari pembahasan Malaysia dengan Kalimantan Timur. Demi kepentingan ekonomi bersama kedua negara, pembahasan isu ekonomi diantara negara perlu lebih mendapat perhatian karena masih banyak peluang ekonomi yang dapat ditingkatkan.

■ Membangun Kerja Sama Ekonomi Yang Saling Menguntungkan

Kesungguhan Pemerintahan Indonesia membangun kawasan perbatasan mulai mendapat tanggapan positif dari pihak Malaysia. Pihak Malaysia mulai mulai menyadari bahwa kemajuan pembangunan ekonomi di wilayah Sabah dan Serawak tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian dan kesejahteraan di kawasan perbatasan Indonesia, khususnya di perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Kedua pihak memiliki saling ketergantungan. Oleh karena itu kerjasama perbatasan yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia-Malaysia, terutama di Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan dengan Kota Tawau Negara Bagian Sabah yang berjalan dalam kerangka kerjasama KK Sosek Malindo perlu semakin diperhatikan dan ditingkatkan. Belum tercipta suatu keterkaitan (*interface*) dengan program pengembangan kawasan dan kerjasama ekonomi regional seperti BIMP-EAGA, yang sebenarnya sangat relevan untuk dikembangkan secara *integratif* dan komplementatif dengan KK Sosek Malindo.

Dalam penerapan kebijakan pembangunan perbatasan *outward looking* di Kalimantan Utara, Pemerintah Indonesia perlu menerapkan tata kelola lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* searah dengan ASEAN Connectivity. Pola hubungan intra ASEAN berdasarkan kesetiakawanan saudara serumpun mulai diarahkan menjadi mitra bisnis yang saling menguntungkan. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan perekonomian di perbatasan, Indonesia perlu mempertimbangkan kepentingan Malaysia karena negara tersebut adalah mitra ekonomi Indonesia di perbatasan. Pemerintah Indonesia perlu merencanakan agar pembangunan infrastruktur yang dilakukan di perbatasan dapat mendapatkan benefit bagi Indonesia, khususnya bagi Kalimantan Utara.

Negara hadir membangun kedaulatan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan terhadap Malaysia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk perbatasan. Penduduk perbatasan adalah garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa. Posisi masyarakat perbatasan di Kalimantan Utara sebagai konsumen produk Malaysia kurang menguntungkan karena menciptakan ketergantungan. Pemerintah Indonesia perlu lebih kreatif dalam mencari peluang ekonomi agar penduduk perbatasan mandiri dan yang mampu membalik keadaan sehingga menarik pembeli dari Malaysia datang ke Indonesia.

Langkah tepat untuk pengembangan ekonomi di perbatasan dilakukan berdasarkan sumber daya lokal berbasis pada komoditas unggulan. Kegiatan perekonomian perbatasan Indonesia - Malaysia di Pulau Kalimantan banyak dilakukan di sektor pertanian, terutama bahan pangan dan perkebunan. Rencana pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan daerah perbatasan sebagai daerah pengekspor pangan lokal ke negara-negara tetangga perlu ditindaklanjuti. Sebagai contoh, Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan terkenal memiliki beras yang sangat bagus. Petani Krayan sudah melakukan ekspor beras secara tradisional ke Malaysia sejak lama. Hanya saja selama ini ekspor tersebut belum tercatat resmi sehingga lebih menguntungkan para temgkulak Malaysia. Program lumbung pangan perbatasan yang sejauh ini masih berupa wacana perlu segera ditindaklanjuti dengan serius dan diikuti adanya regulasi lanjutan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan mengenai aturan perdagangan beras di perbatasan.

Sementara upaya melepas ketergantungan pasokan kebutuhan sehari-hari dari Malaysia melalui program Toko Indonesia harus segera dilaksanakan. Sepanjang tahun 2016-2017 melalui APBD Pemda Kalimantan Utara telah melaksanakan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk barang kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman perbatasan di Kabupaten Nunukan. Sedangkan untuk tahun 2018 Pemda Kalimantan Utara telah mengusulkan pembangunan pasar berupa toko Indonesia melalui anggaran APBN (DAK Fisik) untuk Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Toko Indonesia tersebut akan menyediakan dan menjual berbagai kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga yang tinggal di daerah perbatasan dengan menggandeng pihak Bulog. Toko tersebut diharapkan juga dapat menjadi pusat penjualan hasil industri UMKM warga setempat untuk dibantu pemasarannya ke luar daerah, termasuk dalam hal ini beras Krayan. Untuk itu, Pemerintah dapat mengajak bisnis ritel modern untuk membuka cabangnya di provinsi atau kabupaten perbatasan dengan berbagai kemudahan dan aturan khusus.

■ SARAN

Percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di kawasan perbatasan dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat aspek ketahanan bangsa. Percepatan pembangunan perbatasan dilakukan searah dengan kerjasama ekonomi regional seperti BIMP-EAGA dan *connectivity and common prosperity* searah dengan ASEAN Connectivity.

BOX I.

Pengalaman Beberapa Provinsi Indonesia

KALIMANTAN BARAT

DIPLOMASI LINTAS BATAS PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBENAHAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki letak geografis dan posisi strategis yang berpotensi besar menjadi pintu gerbang perdagangan dan investasi sub-regional. Provinsi Kalbar memiliki luas wilayah 146.807 km², terletak di lokasi yang dekat dengan pusat energi gas Natuna, Singapura sebagai salah satu hub utama kawasan untuk transportasi global dan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1, dan berbatasan darat dengan Sarawak - Malaysia.

Provinsi Kalbar telah menjalin kerjasama di bidang sosial ekonomi daerah perbatasan Malaysia (Sarawak dan Sabah) melalui Sosek Malindo. Provinsi ini merupakan bagian dari kerjasama ekonomi regional Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine *East Asia Growth Area* (BIMP-EAGA). BIMP-EAGA secara resmi terbentuk pada ASEAN 1st Ministerial Conference di Davao City, Filipina, pada tanggal 26 Maret 1994. Tujuan pembentukan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang berada di perbatasan ASEAN. Kerjasama teknis BIMP-EAGA meliputi berbagai bidang yang terbagi dalam cluster yaitu: (a) *Cluster* Pembangunan Sumber Daya Alam diketuai oleh Indonesia, (b) *Cluster* Transportasi, Infrastruktur, dan Informasi, Komunikasi, dan Pengembangan Teknologi yang diketuai oleh Brunei Darussalam, (c) *Cluster* Pengembangan Pariwisata yang diketuai oleh Malaysia, (d) *Cluster* Pembangunan Usaha Kecil dan Menengah diketuai oleh Filipina, dan (e) *Task Force* on Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan yang diketuai oleh Filipina.

Pemerintah Provinsi Kalbar telah mencanangkan pembangunan hijau (*Green Growth*) ramah lingkungan berbasis komoditas. Program ini sebagai upaya mendukung Kontribusi Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi. Dalam sesi *Empowering Innovation and Enhancing Climate Change Action for Sustainable Development* pada COP22 di Maroko, Gubernur Kalbar mengemukakan upaya-upaya yang dilakukan Kalimantan Barat dalam upaya menurunkan emisi. Misalnya,

memperkuat kesatuan pengelolaan hutan, mengendalikan penggunaan ruang dan tata kelola izin, serta membangun kemitraan dengan swasta, memastikan rantai pasok komoditas diproduksi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Provinsi Kalbar juga menjamin pembangunan rendah emisi yang inklusif dengan keterlibatan aktif masyarakat adat dan petani kecil.

Berdasarkan data BPS, industri kayu masih mendominasi jenis usaha kecil dan mikro di berbagai desa di Kalimantan Barat. Selain itu, provinsi Kalbar juga memiliki produk unggulan di industri karet, kelapa sawit, kelapa dalam, bauksit, hasil laut dan perikanan. Khusus kelapa sawit, Provinsi Kalbar memiliki potensi pengembangan industri yang cukup besar. Berdasarkan data tahun 2016, saat ini luas lahan sawit di Kalimantan Barat mencapai 1.478.133 Ha dengan total produksi CPO mencapai 2,27 ton atau setara dengan 56,97% produksi nasional. Sebagian besar hasil produksi CPO ini diekspor ke negara-negara di kawasan Uni Eropa.

Pemerintah Provinsi Kalbar sangat mendukung minat masyarakat dalam mengembangkan industri sawit. Walaupun demikian, provinsi Kalbar perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan baik dari domestik, seperti kebakaran hutan, maupun internasional, seperti kampanye anti-sawit. Tantangan terbesar saat ini adalah adanya Resolusi mengenai sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit (*Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforests, RSPO*) yang diadopsi Parlemen Eropa pada tanggal 4 April 2017. Resolusi ini diterbitkan karena Parlemen Eropa merasa perlu untuk mengawasi prosedur penanaman sawit di negara-negara eksportir yang beresiko menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam rangka meningkatkan daya saing produksi CPO antara lain dengan:

1. Melakukan perbaikan infrastruktur mulai dari perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan antar Kabupaten maupun antar Provinsi, meningkatkan pelayanan pelabuhan antara lain dengan dibukanya

Border Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu dan Border Aruk di Kabupaten Sambas. Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat untuk mencapai kesuksesan program hilirisasi industri sawit tersebut seperti pasokan energi, penyediaan air bersih, sistem transportasi jalan, jembatan dan pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini mempunyai *multiplier effect* pada berbagai industri yang mendorong perbaikan ekonomi masyarakat.

2. Melakukan hilirisasi industri yang nantinya memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, peningkatan ekonomi masyarakat setempat, dan penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya, secara teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar telah melakukan upaya-upaya di bawah ini:

1. Program Replanting (dengan memanfaatkan bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengalokasikan dana Rp 2,5 triliun untuk melakukan penanaman ulang (replanting) kebun sawit tahun ini). Program penggantian Benih Palsu yang didukung melalui Dana APBD I dan APBN.
2. Pembinaan dan Penanggulangan Kebakaran lahan dan kebun (yang dilakukan melalui lintas sektoral antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan (SPORC), serta Badan yang membidangi Lingkungan Hidup Daerah.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 584 TAHUN 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar untuk usaha Perkebunan di Kalimantan Barat.

Upaya-upaya peningkatan daya saing tersebut saat ini diimplementasikan untuk pengolahan sawit secara berkelanjutan melalui Penerapan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015. Sampai saat ini 11 unit perusahaan di Kalimantan Barat telah memiliki sertifikasi ISPO dan 34 perusahaan sedang dalam proses sertifikasi. Meskipun hal ini masih jauh dari target secara keseluruhan tapi upaya untuk mendorong perusahaan perkebunan untuk memiliki sertifikasi ISPO terus dilakukan. Antara lain dengan pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan yang setiap tahun

dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten dan Provinsi di Kalimantan Barat.

Beberapa poin yang mengemuka dari telaah mengenai diskusi dengan berbagai pihak terkait di provinsi Kalbar adalah:

1. Realisasi terhadap asas legalitas status kawasan pabean Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat oleh Kementerian terkait ternyata berjalan lambat. Hal ini tentu saja berakibat langsung terhadap kinerja ekspor impor melalui PLBN dan tentunya terhadap perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan dan sekitar PLBN. Untuk itu diperlukan dukungan dalam mendorong segera diterbitkannya legalitas hukum terkait status kawasan pabean dan kode pelabuhan darat. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalbar mengharapkan dukungan untuk mendorong segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pendukung Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya yang menyangkut perdagangan lintas batas.
2. Pemerintah Provinsi Kalbar menghadapi tantangan mengelola persaingan dengan pihak Malaysia karena Malaysia dirasakan lebih berhasil memanfaatkan sarana PLBN Entikong dibandingkan Indonesia. Malaysia telah jauh hari mempersiapkan daerah mereka yang berbatasan dengan PLBN Nanga Badau dan PLBN Aruk sesuai hasil kertas kerja Sosek Malindo ke 32. Pemerintah Provinsi Kalbar juga menghadapi kendala dalam tata cara *goods-in-transit* dan sedang membahas masalah tersebut dengan pemerintah Sarawak, Malaysia.
3. Pemerintah Provinsi Kalbar memiliki keinginan untuk menjadi Hub ASEAN guna mendukung implementasi *ASEAN Master Plan on Connectivity*. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan mendirikan pusat logistik berikat oleh pihak swasta untuk memaksimalkan posisi Kalimantan Barat sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (hub transportasi utama global).
4. Hilirisasi industri minyak kelapa sawit saat ini dinilai tidak cepat berkembang akibat belum optimalnya insentif dan keberpihakan pemerintah. Pemerintah provinsi Kalbar sedang meninjau produk-produk hukum yang tidak berpihak kepada investasi, agar investasi di sektor

hilir dapat meningkat. Beragamnya regulasi di masing-masing daerah akibat otonomi juga dapat menghambat berkembangnya industri hilir tersebut. Sebagai contoh, produk turunan CPO Kalimantan Barat sejauh ini hanya dimanfaatkan oleh satu perusahaan minyak goreng, yakni PT. Cahaya Kalbar (PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk).

5. Tiga hal yang dapat dijadikan rekomendasi Panja Kerjasama Ekonomi Regional - BKSAP DPR RI ke Provinsi Kalbar yaitu (1) pengaturan legalitas hukum status kepabeuan dan kode pelabuhan darat guna memaksimalkan keberadaan PLBN dan potensi strategis Kalimantan Barat sebagai hub transportasi global; (2) peningkatan daya saing UMKM yang menjadi bagian dari skema *One Village One Product* (OVOP) yang saat ini tengah diterapkan Pemerintah Provinsi Kalbar; dan (3) tata niaga komoditas terutama di kawasan perbatasan yang berhadapan langsung dengan wilayah Malaysia Timur.

SULAWESI SELATAN

Tantangan Ekonomi di Gerbang Pembangunan Indonesia Timur

Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan gerbang pertumbuhan ekonomi yang menjadi andalan dalam program pemerataan pembangunan nasional, khususnya di Indonesia Timur. Perekonomian Sulsel tahun 2016 tumbuh sebesar 7,41 persen sementara pada 2017 tumbuh 7,23 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp. 418,93 triliun dan PDRB perkapita sebesar USD 3.603,26. Peningkatan produktifitas tertinggi berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makanan/minuman yang tumbuh sebesar 11,66 persen. Saat ini, jumlah pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sulsel mencapai sekitar 916 ribu unit usaha yang tersebar di 24 kota/kabupaten.

Sarana infrastruktur di Sulsel sudah berkembang pesat. Jalan antar kabupaten dan jalur kereta api sudah dipersiapkan. Jalan penghubung antara Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan sedang dibangun demi menunjang pertumbuhan

ekonomi dan mempermudah transportasi logistik. Area Pantai Losari akan direklamasi untuk membangun ruang publik. Taman Nasional Bantimurung dan sejumlah tujuan wisata di daerah Maros juga sedang dipersiapkan untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata.

Salah satu area yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Pulau (Kelurahan) Lakkang yang terletak di Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Pulau Lakkang terbentuk secara alami dari proses sedimentasi. Dengan populasi 1027 jiwa, Lakkang dihuni oleh 289 KK dengan luas area sekitar 165 hektar. Sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani dan nelayan tambak. Lakkang memiliki beberapa potensi, seperti wisata pedesaan, wisata bunker peninggalan Jepang, kuliner lokal, dan tambak udang. Desa ini juga berdekatan dengan kawasan industri Makassar sehingga dengan keasriannya diharapkan dapat berperan sebagai paru-paru kota.

Langkah Pemkot Makassar untuk menjadikan Lakkang sebagai salah satu tujuan wisata patut diapresiasi. Perlu ada nilai jual dan daya tarik agar Lakkang dapat tumbuh sebagai daerah unggulan. Akses menuju Lakkang masih harus diperbaiki. Selain itu, sarana akomodasi yang memadai juga belum tersedia. Warga Lakkang sendiri masih kesulitan dalam beraktifitas, termasuk untuk mengakses sarana kesehatan yang memadai. Pemkot Makassar perlu menyusun cetak biru untuk membangun Kelurahan Lakkang, apakah akan dijadikan sebagai technopark (sebagaimana telah diwacanakan sejak 2015) atau akan dijadikan sebagai tujuan wisata pedesaan dengan keunikannya tersendiri.

Human Development Index Sulsel berada di peringkat 14 nasional. Masih rendahnya kualitas SDM adalah kendala utama yang dihadapi Pemrov Sulsel. Upah Minimum Regional (UMR) yang tergolong tinggi seharusnya diiringi dengan kualitas SDM yang memadai. Dalam era liberalisasi perdagangan regional, bukan hanya pendidikan formal bergelar yang diperlukan, tetapi pendidikan untuk tenaga kerja terampil. Kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kejuruan harus ditingkatkan agar lulusannya dapat bersaing dalam era globalisasi. Sulsel juga harus mengupayakan agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja lokal.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel: 1) untuk meningkatkan sektor pariwisata, perlu dibangun pasar-pasar tradisional, misalnya pasar *handycraft* dan pasar produk lokal, bukan pusat perbelanjaan; 2) di bawah kebijakan otonomi daerah, DPRD dan Pemprov Sulsel dapat menyusun kebijakan untuk melindungi tenaga kerja lokal; 3) sektor UKM di Sulsel masih perlu mendapatkan arahan dan bimbingan untuk mengembangkan dan memasarkan produk mereka, khususnya dari segi kualitas produk dan kemasan; dan 4) Sulsel hendaknya tidak hanya mendorong warganya untuk menempuh pendidikan tinggi, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan terampil.

BOX II. Best Practices Kerjasama Ekonomi Beberapa Negara

AUSTRALIA

PARTNER STRATEGIS YANG MEMILIKI POTENSI MENJADI ECONOMIC POWERHOUSE

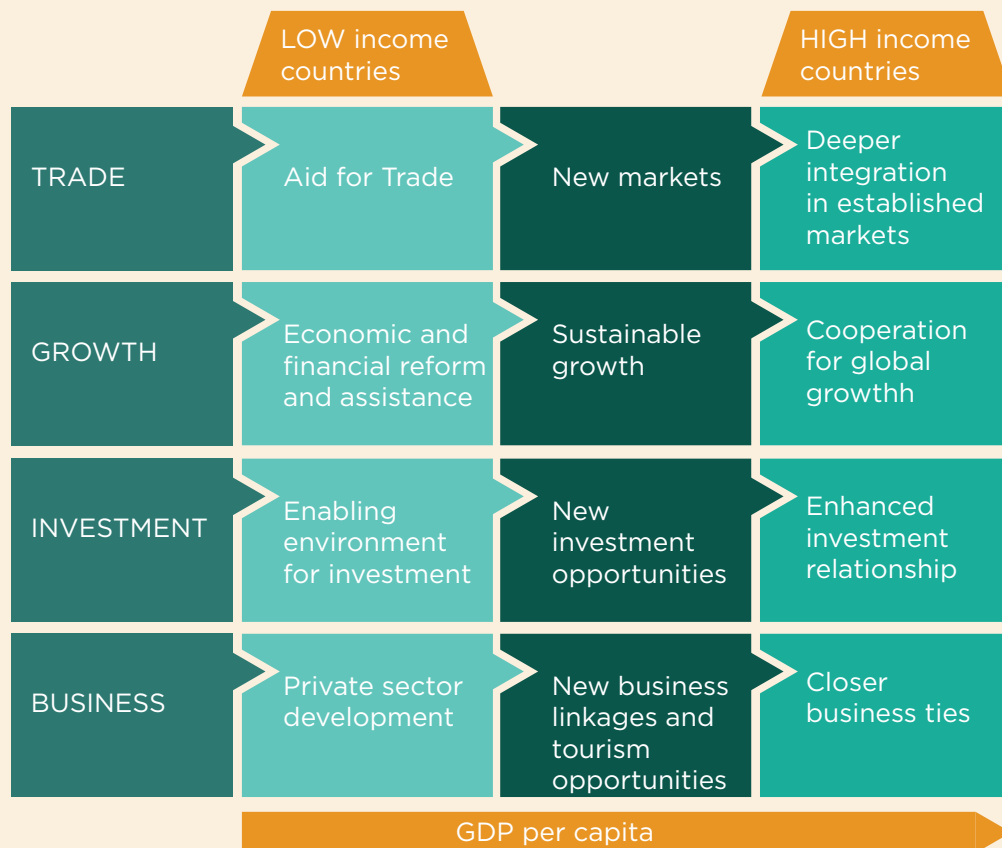
Australia memiliki GDP per kapita tertinggi ke-11 di dunia dan merupakan ekonomi terbesar ke-13. Perdagangan internasional tercatat menyumbang 40 persen PDB Australia pada tahun 2016. Kegiatan ekonomi Australia mengandalkan bidang pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan teknologi informasi dan telekomunikasi. Australia merupakan 10 besar negara untuk investasi langsung luar negeri, dimana arus masuk investasi mencapai USD 51.845 miliar pada tahun 2015.

Menyadari bahwa kemakmuran Australia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi, kemudahan birokrasi dan perlindungan hukum menjadi salah satu fokus pemerintah Australia. Sebagai hasil penerapan reformasi struktural dan kebijakan yang terus-menerus, Australia kini memiliki struktur kelembagaan dan peraturan yang sehat, stabil dan modern yang memberikan kepastian kepada dunia usaha dan menawarkan tujuan investasi yang ramah. Australia secara progresif telah merombak atau memangkas banyak tariff proteksionisnya, memperkenalkan undang-undang persaingan dalam negeri, melakukan deregulasi pasar keuangan, mengembangkan nilai tukar mata uangnya, dan melakukan desentralisasi pasar tenaga kerja.

Australia berada di posisi 13 dalam peringkat Kemudahan Berbisnis Bank Dunia tahun 2016. Australia juga memiliki keunggulan dalam hal Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, Mendapatkan Kredit, dan Penegakan Kontrak. Australia berada di peringkat 5 dalam tiga hal tersebut dan merupakan tiga ekonomi teratas dalam hal kualitas proses peradilan.

Untuk mempertahankan kinerja ini tentunya membutuhkan keterlibatan internasional yang kuat. Australia memiliki visi politik luar negeri Australia untuk menjadi *active middle power* dengan tiga pilar utama, yakni aliansi tradisional dengan AS dan Inggris, keterlibatan kerja sama dengan kawasan Asia-Pasifik, melalui peningkatan hubungan dengan

Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India dan Indonesia, serta kerja sama dalam kerangka multilateral di PBB. Australia mengedepankan diplomasi ekonomi yang berlandaskan empat pilar yaitu perdagangan, pertumbuhan ekonomi, investasi dan bisnis.



Diambil dari Department of Foreign Affairs and Trade <http://dfat.gov.au/trade/economic-diplomacy/Pages/economic-diplomacy-activities-across-australias-international-relationships.aspx>

Diplomasi ekonomi Australia dijalankan secara komprehensif dengan melibatkan diplomat-diplomat sebagai ujung tombak diplomasi dan melibatkan peran pemerintah negara bagian, perwakilan dagang serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan diplomasi ekonomi berada di bawah koordinasi *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) yang bekerja bersama-sama dengan mitranya yaitu *Austrade*, *The Australian Centre for International Agricultural Research* (ACIAR), *the Export Finance and Insurance Corporation* (EFIC), *Tourism Australia* dan perwakilan-perwakilan diplomatik di luar negeri.

Dengan posisi geografis Australia dan Asia yang saling berdekatan, menyebabkan adanya saling ketergantungan di antara keduanya. Selain itu, banyak negara di kawasan Asia yang memiliki kesamaan agenda hubungan luar negeri yang memprioritaskan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi yang bersifat inter-komplemen. Indonesia telah melakukan inisiatif kerja sama dengan Australia dalam bentuk *Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA - CEPA) yang menjadi mekanisme efektif yang melandasi perluasan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang. IA - CEPA merupakan modalitas utama yang mendorong kemajuan kerja sama ekonomi dan mengatasi hambatan perdagangan di antara kedua negara. Dalam pertemuan dengan perwakilan Australia-Indonesia Business Council, mereka menyampaikan harapan bahwa modalitas IA-CEPA dapat memfasilitasi Indonesia dan Australia untuk mencari pasar di negara ketiga dan menjadi *economic powerhouse* di Asia-Pasifik.

Beberapa poin yang mengemuka dari telaah mengenai diskusi dengan berbagai pihak terkait di Australia adalah:

- Sebagai solusi untuk meningkatkan ekspor produk sensitif dari Indonesia, Australia mendukung upaya penurunan tariff terutama untuk produk makanan jadi atau olahan. Australia juga mendukung pendirian *Indonesian Food Innovation Centre*, yang dalam perkembangannya menjadi *early outcomes* negosiasi IA - CEPA. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam hal ini adalah hambatan non-tariff seperti, *labelling* dan *packaging* serta standar *sanitary* dan *phytosanitary* yang diterapkan oleh badan administrasi makanan dan obat-obatan Australia.
- Australia mengedepankan skema *value chain* dalam distribusi dan pemasaran produk barang dan jasa dalam kerangka IA - CEPA. Dalam kaitan ini, *design and branding* menjadi komponen kerjasama IA - CEPA yang tetap harus diperhatikan dan disepakati berdasarkan aturan dan regulasi WTO dan WIPO. Untuk itu, Australia akan membuka akses pasar bagi produk barang dan investasi jasa asal Indonesia, sepanjang Indonesia memberikan akses *design and branding* kepada Australia untuk keperluan pemasaran produk Indonesia di Australia.
- Australia mempunyai minat besar untuk mempertahankan

impur produk turunan (*derivatives*) minyak kelapa sawit (CPO) asal Indonesia yang dinilai prospektif dan memiliki pangsa pasar terbesar dalam skala perdagangan bilateral. Potensi pasar konsumen *derivatives* dari CPO pun cukup menjanjikan di Australia dengan melihat tren pasar domestik. Agar hal tersebut segera terealisasi, Australia menghendaki agar Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan mengenai transparansi produksi CPO berkelanjutan yang memenuhi standarisasi importasi Australia.

- Dalam pertemuan dengan *Bilateral Friendship Groups Indonesia and Australia* - Parlemen Australia dibahas mengenai usulan keluasaan visa kunjungan yang dapat mendukung peningkatan kerja sama ekonomi dan lalu lintas pebisnis antar kedua negara.

SWEDIA

EKONOMI BERBASIS PILAR RISET DAN INOVASI

Swedia merupakan sebagai negara yang sangat berorientasi pada ekspor dan memiliki kebijakan ekonomi yang sangat terbuka. Swedia merupakan negara yang mengutamakan ekonomi hijau, teknologi, inovasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Swedia sangat mendukung pembentukan *Free Trade Agreement* dengan berbagai negara. Tercatat nilai ekspor Swedia pada tahun 2016 mencapai \$147,3 miliar dan mitra dagang terbesar saat ini adalah negara-negara anggota OECD.

Swedia merupakan pula negara yang sangat mementingkan inovasi dan pengembangan teknologi. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penentu keberlanjutan tradisi inovasi di Swedia. Swedia mengalokasikan sekitar 3,5 % investasi publik dan swasta untuk riset dan pengembangan guna mendorong upaya inovasi teknologi. Pendanaan riset dan pengembangan teknologi dikelola dalam satu badan bentukan pemerintah yaitu *Swedish Governmental Agency for Innovation Systems* - VINNOVA.

VINNOVA didirikan pada bulan Januari 2001 oleh pemerintah Swedia sebagai badan pemerintah yang membidangi kebijakan tentang inovasi. Misi VINNOVA adalah mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan cara menumbuhkan iklim inovasi serta mempersiapkan pendanaan bagi penelitian dan pengembangan teknologi yang didorong oleh kebutuhan. Visi VINNOVA adalah agar Swedia menjadi negara terdepan di dunia dalam penelitian dan inovasi, serta menjadi pilihan yang terbaik untuk berinvestasi dan melakukan bisnis. Oleh karena itu, VINNOVA mempromosikan kolaborasi antara perusahaan, universitas, lembaga penelitian dan sektor publik. VINNOVA melakukan ini dengan cara merangsang penelitian pengembangan, melakukan investasi jangka panjang dalam pengembangan atmosfer penelitian dan inovasi yang kuat, mengembangkan VINNOVA sebagai katalis ajang pertemuan diantara institusi-institusi tersebut.

VINNOVA adalah sebuah lembaga pemerintah Swedia yang bekerja di bawah Kementerian Perindustrian, Energi dan Komunikasi dan bertindak sebagai ujung tombak pemerintah Swedia dalam Program Uni Eropa dalam Kerangka Kerja Riset dan Pengembangan Teknologi. VINNOVA berperan besar untuk mendukung terciptanya pasar baru dan eksploitasi komersial yang terinspirasi dari hasil penelitian dan pengembangan di lembaga tersebut. VINNOVA memegang peran penting untuk memenuhi tantangan sosial dan meningkatkan daya saing jangka panjang Swedia melalui lima program kolaborasi strategis, yaitu: teknologi transportasi, ekonomi berbasis lingkungan, ilmu hayat, smart city, dan kolaborasi antara industri manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan pemula yang inovatif, perusahaan IT dan telekomunikasi yang telah mapan. Setiap tahun, VINNOVA menginvestasikan sekitar SEK 3 Miliar, untuk mendorong inovasi. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan melalui seleksi proposal di mana perusahaan, sektor publik dan organisasi lainnya mengajukan permintaan pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi mereka.

VINNOVA juga melakukan penguatan kerja sama dengan lembaga pemodal riset dan inovasi internasional. VINNOVA bertanggung jawab atas kerjasama internasional di bawah

kerja sama bilateral dengan negara-negara lain. Bentuk kerja sama diselenggarakan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan negara mitra. Jaringan kerja sama internasional VINNOVA meliputi benua Amerika, Eropa dan Asia. Di Asia, VINNOVA bekerja sama dengan Jepang, India dan Cina terutama di bidang ICT dan inovasi bio-teknologi yang ramah lingkungan.

Swedia merupakan negara penelitian terkemuka di mana penelitian dan inovasi dilakukan dengan standar yang tinggi dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan masyarakat dan daya saing industri. Kementerian Pendidikan dan Penelitian Swedia menjalankan kebijakan tentang inovasi sesuai dengan Undang-Undang tentang Riset. Kementerian Pendidikan dan Penelitian Swedia juga melakukan kerja sama internasional di bidang penelitian, salah satunya melalui program Horizon 2020. Horizon 2020 merupakan instrumen utama dan kerangka kerjasama penelitian dan inovasi internasional di Uni Eropa. Melalui program Horizon 2020 ini, Kementerian Pendidikan dan Penelitian Swedia hendak memperkuat keunggulan penelitian, meningkatkan daya saing ekonomi dan industri, serta mengatasi tantangan masyarakat global. Swedia telah berpartisipasi aktif dalam kerangka kerja sama penelitian Horizon 2020 misalnya pengembangan metode evaluasi kemitraan publik-swasta, penyelarasan dan koordinasi program penelitian antar negara, evaluasi terhadap skema hibah litbang bisnis dan pendanaan proyek yang pada berbasis kinerja. Swedia berhasil mendapatkan pendanaan untuk sebanyak 13.946 proposal dengan tingkat keberhasilan hingga 15,5%. Pemerintah Swedia sendiri merupakan kontributor program Horizon 2020 terbesar ke-8 di Uni Eropa.

Beberapa poin yang mengemuka dari telaah mengenai diskusi dengan berbagai pihak terkait di Swedia adalah:

- Swedia sangat mendorong penyelesaian perundingan Indonesia - EU CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Berkaca dari *Comprehensive Economic and Trade Agreement between the EU and Canada* (CETA) yang saat ini tengah dalam proses ratifikasi di Parlemen Swedia, perjanjian tersebut telah mampu meningkatkan ekspor Swedia ke Kanada secara signifikan dan membuka lapangan kerja baru bagi

penduduk Swedia. Diharapkan Indonesia - EU CEPA akan memberikan manfaat sejenis bagi Indonesia dan Swedia.

- Swedia merupakan negara yang sangat peduli tentang pelestarian lingkungan hidup, oleh karena itu upaya pembenahan industri kelapa sawit menjadi tantangan tersendiri bagi hubungan ekonomi Swedia dan Indonesia. DPR RI saat ini sedang membahas RUU Perkelapasawitan sebagai payung hukum pembenahan industri ini dari hulu hingga ke hilir, untuk mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat standarisasi *Crude Palm Oil* (CPO). Di samping itu, Indonesia telah memiliki standar industri berkelanjutan yakni *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), yang dapat disejajarkan dengan RSPO sebagai menjadi standar preferensi negara-negara Uni Eropa. ISPO memiliki banyak kriteria yang mencakup aspek legalitas, tanggung jawab sosial dan praktik bisnis yang berlaku secara universal. Selanjutnya, DPR RI dan Pemerintah RI akan terus konsisten melakukan langkah korektif mengenai moratorium perluasan lahan untuk kelapa sawit, skema kolaborasi antara pemerintah dan swasta, restorasi lahan gambut dan praktik pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan.
- Dalam pertemuan dengan *Committee on Trade and Industry*, dibahas mengenai kerja sama ekonomi regional ASEAN dan Uni Eropa serta kerja sama ekonomi bilateral. Swedia menyambut baik pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan memandang posisi strategis Indonesia di kawasan dapat membantu ekspansi kerja sama perdagangan Swedia dengan negara-negara anggota ASEAN.

2.

REKOMENDASI



A. Rekomendasi Khusus Terkait Mekanisme Kerjasama Ekonomi Antar Kawasan

■ 1. Penyelesaian negosiasi mekanisme kerjasama ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah beranjak dari *Free Trade Agreement* dan melakukan negosiasi kerjasama ekonomi komprehensif guna memperkuat dan memperluas ruang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi. Hal ini dilakukan terutama dengan negara-negara dan kawasan yang memiliki kesamaan agenda kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi yang bersifat saling menguntungkan dan inter-komplementer.

Indonesia-Australia CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang ditargetkan untuk selesai pada akhir tahun 2017 merupakan modalitas utama untuk mengantarkan kedua negara yang bertetangga dekat ini menuju kerjasama yang lebih luas. IA CEPA diharapkan dapat menyelesaikan berbagai hambatan antara lain terkait keleluasaan tarif dan akses bagi pebisnis kedua negara serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Demikian pula dengan perundingan Indonesia - EU CEPA yang pada September 2017 lalu telah melalui tahap ketiga perundingan. Diharapkan penyelesaian Indonesia - EU CEPA akan mendorong volume *two-way trade* antara Indonesia dengan negara-negara anggota EU maupun menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk EU ke ASEAN.

■ 2. Pemanfaatan kerangka kerjasama ekonomi sub-regional

Konsep diplomasi total yang diadopsi Pemerintah RI membuka kesempatan bagi entitas sub-negara untuk menjalankan kebijakan luar negeri. UU no. 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah otonom untuk melakukan sebagian kerja sama luar negeri. Hal ini tercantum dalam pasal 42 ayat (1), bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Beberapa Provinsi di Indonesia merupakan bagian dari kerjasama ekonomi regional Brunei-Indonesia-Malaysia-Philipina East Asia Growth Area (BIMP-EAGA). BIMP-

EAGA secara resmi terbentuk pada ASEAN 1st Ministerial Conference di Davao City, Filipina, pada tanggal 26 Maret 1994. Tujuan pembentukan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang berada di perbatasan ASEAN. Provinsi di Indonesia yang menjadi anggota BIMP-EAGA adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pelibatan kawasan-kawasan terdepan Indonesia terutama yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dalam visi diplomasi ekonomi Pemerintah RI tentunya meningkatkan manfaat kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Dibutuhkan pula upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan *awareness* akan posisi strategis kawasan tersebut dan peran yang dapat diambil untuk memaksimalkan keanggotaan dalam BIMP-EAGA.

■ 3. Pengaktifan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Keberadaan PLBN merupakan salah satu aspek krusial dalam mendukung visi desentralisasi pembangunan yang tengah digaungkan Pemerintah RI. Berdasarkan kunjungan lapangan yang dilakukan Panja KER, didapat kesimpulan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi adalah sinergi antara pusat dan daerah. Lambatnya realisasi terhadap asas legalitas status kawasan pabean Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat oleh Kementerian terkait berakibat langsung terhadap kinerja ekspor impor melalui PLBN dan tentunya terhadap perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan dan sekitar PLBN. Dimana *spillover effect* yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur PLBN belum memberikan hasil maksimal. Untuk itu diperlukan dukungan dalam mendorong segera diterbitkannya legalitas hukum terkait status kawasan pabean dan kode pelabuhan darat. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan dukungan untuk mendorong segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pendukung Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya yang menyangkut perdagangan lintas batas.

B. REKOMENDASI UMUM

■ 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang *Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)*

Dewasa ini banyak negara mulai beranjak mengadopsi STEM dalam cetak biru pendidikan nasional mereka guna mendorong inovasi dalam dunia yang semakin dikuasai teknologi digital. Dalam laporan Program for International Student Assessment (PISA) yang dikeluarkan OECD tahun 2017, Indonesia menempati ranking 64 dari 72 negara. PISA merupakan metode penilaian kemampuan membaca, matematika dan sains terhadap siswa usia 15 tahun di berbagai negara di dunia yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Terdapat peningkatan dari ranking 71 namun masih jauh dibanding negara-negara lain di kawasan ASEAN yaitu Singapura dan Viet Nam yang berada di rentang top 20.

Secara nasional, penerapan kurikulum 2013 yang menekankan pada transformasi dari pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodisiplin) menuju pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisiplin) tentunya memberikan keleluasaan bagi pengembangan STEM yang menggunakan metode pembelajaran terapan dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu.

■ 2. Peningkatan daya saing produk-produk Indonesia

Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kerjasama teknis dan penguatan kapasitas melalui transfer *knowledge/know-how* terutama terkait standarisasi mutu produk, *packaging* dan *labeling* di negara tujuan ekspor Indonesia.

Selanjutnya strategi *labeling* dapat dimanfaatkan untuk menyisipkan pesan-pesan mengenai kualitas mutu dan proses produksi yang telah mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini terutama terkait produk sawit dan turunannya yang tengah mendapat sorotan dari kampanye-kampanye negatif *consumer groups* di pasaran internasional.

Selain penguatan terhadap aspek-aspek *tangible* dari produk-produk nasional Indonesia, selayaknya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap aspek *intangible*

terutama kekayaan intelektual yang berperan dalam melindungi aspek *tangible* antara lain *labeling* dan *packaging* di atas. Berdasarkan World Intellectual Property Report 2017 - *Intangible Capital in Global Value Chains* yang dirilis World Intellectual Property Organization (WIPO), kekayaan intelektual merupakan faktor penentu bagi keberlanjutan suatu perusahaan dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya terutama di tengah rantai pasokan global.

Sebagai anggota badan perdagangan dunia World Trade Organization (WTO), Indonesia terikat dalam kesepakatan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) termasuk di dalamnya ketentuan mengenai hak merek, hak cipta, hak paten, hak desain industri, hak tata letak sirkuit, hak varietas tanaman dan hak rahasia dagang. Dalam lingkup nasional, ketentuan tersebut telah diterjemahkan ke berbagai perangkat legislasi. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak cipta maupun hak ekonomi pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Selain itu telah terdapat UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Industri dan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU Merek dan Indikasi Geografis juga telah disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 untuk mengatur merek konvensional dan merek non-tradisional. Dengan disahkannya UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai revisi UU No. 14 Tahun 2001 menambah stimulus bagi pelaku bisnis terutama UMKM untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas produk mereka. UU tersebut memberikan perlindungan hukum dan menjembatani kebutuhan penyelenggaraan paten di Indonesia sekaligus mengatur mengenai royalti bagi inventor.

Agar penyelenggaraan hak kekayaan intelektual di Indonesia mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha, upaya-upaya proaktif yang telah dilakukan di tataran kebijakan harus dibarengi oleh strategi nasional yang mensinergikan perangkat legislasi dan sistem kekayaan intelektual dengan pembangunan ekonomi dan pengembangan industri dalam negeri. Dengan adanya strategi nasional, diharapkan nantinya akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat ekonomi dari komersialisasi kekayaan intelektual, mendorong inovasi dan riset, sekaligus juga menjamin aspek penegakan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, selayaknya penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual (SNKI) yang baru sampai pada tahapan pembahasan dapat diselesaikan sesegera mungkin.

■ 3. Pengembangan inovasi dan riset yang mampu menjawab dinamika kebutuhan pasar

Salah satu prasyarat untuk memenangkan persaingan global adalah fondasi ekonomi yang berbasis riset dan teknologi dengan didukung oleh atmosfer penelitian dan inovasi yang kuat. Saat ini masih menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan budaya riset dan iklim inovasi yang bermuara pada hasil-hasil yang mampu menjawab kebutuhan pasar.

Penerapan strategi jangka panjang yang didukung pendanaan dan investasi berkelanjutan guna merangsang penelitian dan pengembangan menjadi suatu keniscayaan. Tidak dipungkiri saat ini alokasi anggaran riset di Indonesia masih sangat minim yaitu 0,25% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan masih jauh di standar minimal UNESCO yaitu 2 % dari PDB.

Selanjutnya, dibutuhkan mekanisme koordinasi antar lembaga litbang dalam negeri sejak perumusan kebijakan, perencanaan anggaran dan pelaksanaan sehingga strategi jangka panjang dapat diimplementasikan secara optimal. Mekanisme koordinasi tersebut saat ini menjadi salah satu fokus dalam RUU Sisnas Iptek yang tengah dalam pembahasan di Komisi VII DPR RI. Dapat dipertimbangkan pemanfaatan salah satu institusi pemerintah yang membidangi riset dan pengembangan untuk menjadi *focal point* pelaksanaan strategi tersebut sekaligus bertugas untuk mempromosikan kolaborasi antara perusahaan, universitas, lembaga penelitian dan sektor publik.

■ 4. Penguatan diplomasi kelapa sawit

Hingga saat ini negara-negara di kawasan Uni Eropa masih menjadi tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia. Pengesahan Resolusi Parlemen Eropa mengenai sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit (Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforests) pada tanggal 4 April 2017 dinilai kontraproduktif bagi industri sawit Indonesia. Sebagai salah satu eksportir terbesar produk kelapa sawit, Indonesia mendapat banyak tantangan dari kampanye-kampanye mengenai prosedur penanaman sawit di negara-negara eksportir dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM. Terlebih lagi setelah adanya Resolusi tersebut.

Oleh karena itu, menjadi tugas perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri untuk lebih intens dalam upaya memperbaiki persepsi masyarakat dunia. Baik KBRI sebagai ujung tombak diplomasi ekonomi pemerintahan Joko Widodo maupun atase perdagangan yang secara tradisional memiliki tugas pokok untuk memperkuat performa perdagangan luar negeri Indonesia selayaknya berperan lebih aktif dalam mengkampanyekan posisi terkini terutama terkait penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi komoditas unggulan Indonesia.

Dalam hal ini DPR RI selalu mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah RI dengan menyuarakan di berbagai forum kerjasama antar parlemen langkah-langkah korektif yang secara konsisten telah dilakukan, antara lain mengenai moratorium perluasan lahan untuk kelapa sawit, skema kolaborasi antara pemerintah dan swasta, restorasi lahan gambut dan praktik pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Secara internal, DPR RI memastikan ketersediaan perangkat hukum yang mendukung pembenahan industri kelapa sawit baik dari hulu sampai ke hilir melalui pembahasan RUU Perkelapasawitan sebagai salah satu RUU prioritas tahun 2018.

LAMPIRAN

Kunjungan Delegasi Badan
Kerjasama Antar Parlemen Dewan
Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Untuk menindaklanjuti
Resolusi-Resolusi Organisasi
Antar Parlemen Regional Terkait
Tantangan Integrasi Regional Dan
Liberalisasi Perdagangan

**Canberra dan Sydney - Australia,
22-28 Oktober 2017**





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

L A P O R A N

**KUNJUNGAN DELEGASI BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MENINDAKLANJUTI RESOLUSI-RESOLUSI ORGANISASI ANTAR PARLEMEN
REGIONAL TERKAIT TANTANGAN INTEGRASI REGIONAL DAN LIBERALISASI
PERDAGANGAN
KE CANBERRA DAN SYDNEY – AUSTRALIA, 22 – 28 OKTOBER 2017**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan bidang ekonomi merupakan salah satu prioritas kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 – 2019. Hal ini dilakukan antara lain dengan meluncurkan beberapa paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menarik investasi asing. Fundamental ekonomi Indonesia saat ini tengah menunjukkan kondisi relatif kuat. Meskipun pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2017 mengalami penurunan, namun perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 5% dengan year-on-year inflasi terkendali di rentang target BI 3 – 5 %. Selain itu, pencapaian positif ekonomi makro lainnya adalah penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta tingkat kesenjangan yang ditunjukkan oleh rasio gini di level 0,397. Hal ini tentu saja memberikan prospek bagi peningkatan investasi dalam negeri dan peluang peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, baik dalam lingkup ASEAN maupun Asia-Pasifik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia selama Januari-Juli 2017 mencapai US\$93,59 miliar atau tumbuh 17,32% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang senilai US\$79,77 miliar. Adapun impor naik 14,91% menjadi US\$86,19 miliar. Dalam Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo di depan Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2017, peningkatan pendapatan nasional dari perdagangan internasional masih menjadi salah satu fokus.

Badan Kerja Sama Antar parlemen (BKSAP) merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap dan memiliki mandat untuk melaksanakan diplomasi parlemen. Dalam melaksanakan mandat tersebut, BKSAP dapat mengambil peran dalam diplomasi ekonomi yang merupakan prioritas diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Diplomasi Parlemen ini juga dapat mendukung DPR RI dalam melakukan peran pengawasan atas kerjasama ekonomi yang diambil pemerintah agar selalu berpegang pada visi kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

BKSAP DPR RI dalam melaksanakan tugasnya, membagi wilayah kerja ke dalam beberapa bagian, yakni dalam hal pelaksanaan tugas secara multilateral dan regional melalui organisasi internasional

dan intra-kawasan, dan pelaksanaan tugas secara bilateral dan individual melalui peningkatan hubungan persahabatan dan kerja sama antarpemerintah. Dalam konteks pelaksanaan tugas secara bilateral, BKSAP DPR RI dapat melakukan kunjungan persahabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 (c) Peraturan DPR No 1/2014 tentang Tata Tertib. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2017 ini, BKSAP berencana melakukan kunjungan kerja ke negara anggota Uni Eropa untuk mendapatkan gambaran mengenai liberalisasi perdagangan dan upaya yang dilakukan negara-negara Eropa untuk meningkatkan daya saingnya dalam mekanisme kerja sama dan integrasi regional.

Hal ini penting untuk dikaji mengingat pada tahun 2017 ini, Indonesia telah memasuki tahun kedua diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan cetak biru MEA 2025 menuju integrasi regional juga telah disahkan. Ada sejumlah konsekuensi dari diterapkannya integrasi regional, yaitu arus barang, jasa, modal dan tenaga kerja yang bebas hambatan. Hal ini berarti bukan saja produk dalam negeri yang harus bersaing dengan produk negara ASEAN lainnya, tetapi tenaga kerja profesional dalam negeri pun akan bersaing dengan tenaga kerja dari seluruh negara-negara ASEAN. Seluruh elemen usaha, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah; serta para profesional harus meningkatkan daya saingnya masing-masing agar dapat berkompetisi di tingkat regional.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi Badan Kerja sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindak lanjuti Resolusi-resolusi organisasi antar parlemen regional terkait tantangan integrasi regional dan liberalisasi perdagangan pada tanggal 22 – 28 Oktober 2017 ke Canberra dan Sydney didasarkan atas Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor:188/PIMP/I/2017/2018 tertanggal 17 Oktober 2017

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan kerja BKSAP DPR RI dalam konteks kerja sama regional adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi negara-negara partner bilateral Indonesia dan mitra wicara ASEAN dalam integrasi regional serta strategi yang diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut.
2. Memperoleh gambaran mengenai daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam konteks integrasi regional.
3. Meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama antar-parlemen dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik
4. Memperbarui komitmen Indonesia terhadap penguatan dan peningkatan kerja sama regional.
5. Bertukar pandangan (*sharing best practices*) dengan parlemen negara-negara Asia Pasifik terkait tugas-tugas keparlemenan yang meliputi penyusunan legislasi, anggaran, dan pengawasan, terutama yang berhubungan dengan kerja sama regional.

III. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindak lanjut Resolusi-resolusi organisasi antar parlemen regional terkait tantangan integrasi regional dan liberalisasi perdagangan pada tanggal 22 – 28 Oktober 2017 ke Canberra dan Sydney adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1. Yth. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. | Ketua Delegasi/ Ketua BKSAP/ F-PD |
| 2. Yth. Bpk. Juliari P. Batubara | Anggota Delegasi/ Wakil Ketua BKSAP/ F-PDIP |
| 3. Yth. Bpk. H. Rofi' Munawar, Lc. | Anggota Delegasi/ Wakil Ketua BKSAP/ F-PKS |
| 4. Yth. Bpk. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS | Anggota Delegasi/ Wakil Ketua BKSAP/ F-PPP |
| 5. Dony Maryadi Oekon, ST | Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PDIP |
| 6. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS | Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PDIP |
| 7. Mercy Christy Barends, ST | Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PDIP |
| 8. Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom | Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PG |
| 9. Rachel Maryam Sayidina | Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-P.Gerindra |
| 10. Hj. Melani Leimena Suharli | Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PD |
| 11. Lucky Hakim | Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PAN |
| 12. H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos | Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PKS |
| 13. Drs. Fadholi | Anggota BKSAP/F-P.NASDEM |

Delegasi juga didampingi oleh Pejabat dan staf Set. BKSAP, Tenaga Ahli BKSAP, jurnalis dari harian Bisnis Indonesia serta Pejabat dan staf KBRI Canberra dan KJRI Sydney,

IV. SEKILAS MENGENAI AUSTRALIA

PROFIL BILATERAL RI – AUSTRALIA

Indonesia dan Australia telah menjalin Kemitraan Komprehensif sejak 5 April 2005. Prioritas kerja sama kedua negara mencakup peningkatan perdagangan dan investasi, penguatan *people-to-people link* melalui kerja sama pendidikan dan pariwisata, serta kerja sama keamanan penanganan *people smuggling, illegal fishing dan counter terrorism*.

Beberapa forum bilateral dimana kedua negara terlibat aktif adalah Annual Leaders Meeting antara kedua Kepala Negara, 2+2 Dialogue antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara dan Indonesia-Australia Dialogue di level akar rumput.

Kedua negara telah menandatangani berbagai dokumen strategis yaitu *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* pada 5 April 2005, *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation (Lombok Treaty)* pada 13 November 2006, dan *Australia-Indonesia Joint Understanding on a Code of Conduct between the Republic of Indonesia and Australia in implementation of the agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* pada 28 Agustus 2014. Selain itu terdapat sekitar 198 dokumen kerja sama bilateral yang terdiri dari traktat, agreement dan MoU.

Berdasarkan data statistik perwakilan RI di Australia pada tahun 2015 tercatat sebanyak 68.119 orang diaspora Indonesia bermukim di Australia. Data tahun 2016 dari KBRI Canberra mencatat sebanyak 19.223 pelajar asal Indonesia tengah menyelesaikan pendidikan di Australia.

POSISI AUSTRALIA DALAM PERDAGANGAN INDONESIA

Berdasarkan kajian dari Kementerian Perdagangan RI, ekspor Indonesia didominasi oleh negara tujuan ekspor tradisional yaitu Amerika Serikat, China, dan Jepang. Kontribusi ekspor Indonesia ke negara tersebut masing-masing sebesar 13%, 12% dan 12%. Ekspor Indonesia didominasi oleh ASEAN dan negara mitra FTA Indonesia seperti Jepang, China, Korea, New Zealand, Australia, dan India. Ekspor ke ASEAN pada tahun 2015 mewakili 22,5% dari total ekspor sedangkan ekspor ke mitra FTA selain ASEAN menyumbang 39,2% total ekspor. Negara non mitra FTA yang menjadi partner utama adalah Amerika Serikat yang menyumbang 9% ekspor, diikuti Taipei 4%. Australia merupakan negara mitra FTA melalui AANZFTA yang menempati urutan ke 11 untuk negara tujuan ekspor terbesar pada tahun 2015 dengan kontribusi sebesar 3%.

INVESTASI RI-AUSTRALIA (dalam US\$)

URAIAN	2016	QUARTER KE 2 TAHUN 2017
Investasi Australia di RI (Data BKPM)	US\$ 174,7 juta (813 proyek)	US\$ 59,3 juta (366 proyek)
Investasi RI di Australia (DFAT/Kemlu Australia)	A\$ 13 juta	n.a.

DATA NERACA PERDAGANGAN RI-AUSTRALIA

(Sumber : Kementerian Perdagangan RI) *dalam ribu

Uraian	2014	2015	2016	Trend 2012-2016	Jan-Jun		Perub. (%) 2017/2016
					2016	2017	
Total Perdagangan	10.595.876,1	8.518.102,1	8.469.777,1	-4,61	3.327.500,6	3.418.679,2	2,74
Migas	1.408.558,8	851.030,7	1.270.007,8	12,14	442.215,2	518.822,9	17,32
Non Migas	9.187.317,3	7.667.071,4	7.199.769,3	-3,29	2.885.285,4	2.899.856,3	0,51
Ekspor	4.948.373,7	3.702.307,6	3.208.918,0	-9,65	1.366.992,0	1.014.899,1	-25,76
Migas	1.251.831,1	707.665,2	538.276,0	24,36	264.143,9	237.500,3	-10,09
Non Migas	3.696.542,7	2.994.642,3	2.670.642,1	-4,41	1.102.848,1	777.398,8	-29,51
Impor	5.647.502,4	4.815.794,5	5.260.859,0	-0,59	1.960.508,6	2.403.780,1	22,61
Migas	156.727,7	143.365,4	731.731,8	22,58	178.071,3	281.322,6	57,98
Non Migas	5.490.774,6	4.672.429,1	4.529.127,2	-2,59	1.782.437,3	2.122.457,5	19,08

Neraca Perdagangan	-699.128,6	-1.113487	-2.051941	46,53	-593.516,5	- 1.3888 81	- 134,0 1
Migas	1.095.103,4	564.299,8	-193.455,8	0,00	86.072,6	43.822, 4	150,9 1
Non Migas	-1.794.232,0	-	-1.858.485	0,54	-679.589,1	- 1.345.0 58,7	- -97,92

Komoditas ekspor utama Indonesia ke Australia (Jan-Okt 2015, dalam US\$):

Elektronik (147 juta), Karet (82 juta), Footwear (77 juta), Kokoa (45 juta), Kopi (21 juta), Tekstil (162 juta), dan Produk Hutan (234 juta).

Komoditas impor utama Indonesia ke Australia (Jan-Okt 2015, dalam US\$):

Gandum (1,072 miliar), oil and gas (143 juta), non-oil and gas (4,6 miliar), dan impor sapi (965 juta).

Selama kurun waktu 2012-2016, Kementerian Perdagangan RI mencatat tren penurunan total perdagangan sebanyak 4,63%. Kerja sama perdagangan Indonesia dan Australia saat ini bersifat saling menguntungkan terutama untuk produk-produk pertanian seperti ternak hidup dan daging merah, kapas dan gandum. Indonesia merupakan pasar terbesar kedua bagi produk gandum Australia, dan merupakan pasar terbesar ternak hidup dan produk daging serta kapas Australia.

Data hubungan bilateral yang diterima dari Kementerian Luar Negeri RI mencatat beberapa hambatan perdagangan yang saat ini mempengaruhi produk Indonesia antara lain adanya hambatan non-tarif berupa standar karantina yang dinilai terlalu tinggi, praktek dumping, serta persyaratan *packaging* dan *labelling*. Hambatan tersebut menyebabkan distorsi performa ekspor Indonesia ke Australia dan mengakibatkan belum maksimalnya kapasitas produksi produk ekspor di Indonesia untuk memenuhi permintaan impor dari Australia. Indonesia juga menghadapi persaingan dari negara-negara seperti Tiongkok, Thailand, Malaysia, dan Vietnam untuk produk sejenis.

Kerja sama ekonomi kedua negara diatur di bawah Indonesia-Australia Comprehensive Partnership Agreement (IA-CEPA) yang akan menciptakan kerangka bagi era baru keterlibatan ekonomi yang lebih dekat antara Australia dan Indonesia. IA-CEPA diharapkan membuka pasar baru dan peluang bisnis bagi produsen utama, penyedia jasa dan investor. IA-CEPA diharapkan dapat menjadi *building block* untuk kerjasama ekonomi regional seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans-Pacific Partnership (TPP). Menteri Perdagangan Australia dan Indonesia mengaktifkan kembali perundingan IA-CEPA pada bulan Maret 2016 setelah diluncurkan pertama kali oleh pemimpin kedua negara pada tahun 2010.

IA-CEPA merupakan fokus kunjungan kenegaraan perdana Presiden Joko Widodo pada bulan Februari 2017. Sementara pada kunjungan Perdana Menteri Australia ke Jakarta pada 7 Maret 2017, Malcolm Turnbull menyambut konsesi-konsesi perdagangan yang telah dibuat Indonesia, termasuk pengurangan tarif-tarif atas gula Australia dan berkurangnya pembatasan terhadap impor ternak hidup Australia.

Negosiasi IA-CEPA diharapkan dapat selesai akhir tahun ini dan mulai diberlakukan tahun depan. Negosiator perdagangan kedua negara bertemu setiap tiga bulan dan saat ini telah dicapai kemajuan perundingan di sejumlah bidang termasuk: perdagangan barang, *rules of origin*, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, hambatan teknis perdagangan, tindakan sanitasi dan fitosanitasi, layanan, investasi, layanan telekomunikasi, e-commerce, jasa keuangan, kebijakan persaingan, ketentuan kelembagaan dan kerangka kerjasama ekonomi. *Early harvest* yang telah dapat diimplementasikan termasuk Indonesia-Australia Business Partnership Group, the Red Meat and Cattle Partnership, dan kerja sama jasa keuangan dan kerja sama industri kreatif (fashion and perhiasan).

Pada tanggal 2-6 Oktober 2017 telah berlangsung IA-CEPA putaran ke-9 di Jakarta yang merupakan tindak lanjut dari perundingan putaran ke-8 di Canberra pada 31 Juli – 4 Agustus 2017. Isu-isu utama IA-CEPA yang dibahas dalam putaran ke-9 adalah perdagangan barang (termasuk *rules of origin*, prosedur kepabeanan, fasilitasi perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta sanitasi dan fitosanitasi), perdagangan jasa (termasuk jasa keuangan, pergerakan perseorangan, jasa keuangan dan telekomunikasi), investasi, perdagangan elektronik dan ketentuan kerangka kelembagaan.

Dalam kerangka kerja sama regional ASEAN, Indonesia dan Australia tengah membahas perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang meliputi 10 negara Asia Tenggara ditambah Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru (ASEAN+6). RCEP merupakan bentuk Free Trade Agreement terbesar karena mencakup 3,35 milyar atau 50% lebih dari total penduduk dunia serta 29% lebih dari total PDB dunia. Indonesia berkomitmen untuk terus memainkan peran konstruktif dalam negosiasi RCEP dan meyakini bahwa RCEP akan melengkapi ASEAN-Australia-New Zealand-Free Trade Area (AANZFTA) sehingga memberikan dorongan kuat untuk integrasi ekonomi dan kesejahteraan bersama di wilayah Asia Pasifik.

AANZFTA merupakan kesepakatan perdagangan yang sangat ambisius. Perjanjian perdagangan ini merupakan perjanjian dagang pertama Australia yang melibatkan banyak negara. AANZFTA juga merupakan perjanjian perdagangan pertama ASEAN yang mencakup multisektor dari perdagangan barang, jasa, investasi dan hak kekayaan intelektual.

KEBIJAKAN PERDAGANGAN AUSTRALIA¹

Tariff masih menjadi salah satu instrumen perdagangan yang penting dalam perdagangan Australia meskipun penerimaan dari tariff bukan merupakan komponen terbesar penerimaan negara dari pajak. Saat ini Australia telah menerapkan Harmonized System (HS) 2012 yang memberikan perbedaan tingkat tarif meskipun tidak signifikan.

Rata-rata tariff Most Favoured Nation pada tahun 2010 sebesar 3.1% menjadi 3% pada tahun 2014. Tariff rata-rata untuk produk hasil industri sebesar 3.3% sementara untuk produk hasil pertanian hanya 1.4%. sebanyak 96% dari total pos tariff Australia memiliki kisaran antara nol hingga 5%. Untuk sektor industri yang masih didukung oleh pemerintah seperti tekstil, pakaian, alas kaki (textile clothing and Footwear atau TCF), dan kendaraan bermotor untuk penumpang (passenger motor vehicle atau PMV) masih diberlakukan tariff yang lebih tinggi dari rata-rata.

¹ Diolah dari kajian Kementerian Perdagangan RI, dapat diakses melalui http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Laporan_Analisis_IA-CEPA_versi_cetak.pdf

Mengenai kebijakan non-tariff, Australia menerapkan larangan dan pembatasan impor dalam bentuk persyaratan karantina atau persyaratan teknis. Larangan dan pembatasan tersebut diwajibkan untuk memenuhi standard *Appropriate Level of Protection (ALOP)*. Australia telah melakukan reformasi untuk menciptakan sistem yang modern dan lebih responsif untuk memfasilitasi perdagangan sementara tetap mengelola resiko biosekuriti. 97% dari standar nasional Australia identik atau yang merupakan adopsi dari standar internasional. Lembaga untuk standarisasi Australia terdiri dari empat badan utama yaitu *Standard Australia*, *The National Association of Testing Authorities (NATA)*, *Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ)* dan *National Measurement Institute (NMI)*.

Persyaratan dokumentasi impor yang diterapkan Full Import Declaration (FID) untuk barang dengan nilai di atas \$A 1000; faktur, *lading bill / airway bill*; dan surat-surat lainnya seperti *packing list*, dokumen asuransi, dll yang berkaitan dengan izin *shipment*. Ijin impor juga diperlukan untuk barang-barang tertentu yang dikenakan kontrol atau pembatasan. Transaksi perdagangan internasional dilayani oleh Sistem Kargo Terpadu atau The Integrated Cargo Sistem (ICS).

Mengingat Australia merupakan eksportir utama komoditas pertanian dan produk pertanian pangan aturan Sanitary dan Phytosanitary (SPS) yang diterapkan di negara ini sangat ketat. Ketentuan SPS Australia yang sangat ketat ini kerap mendapat complain di WTO. Sebagai contoh, Australia melakukan tindakan SPS berupa Import Risk Analysis (IRA) untuk sejumlah barang yang diimpor walaupun dalam ketentuan WTO untuk SPS tidak memerlukan analisis semacam itu.

Kebijakan non-tariff lainnya yang diterapkan adalah larangan dan pembatasan impor, prosedur karantina, izin dan inspeksi yang ketat untuk lebih dari 150 produk pertanian dan peternakan seperti sereal, buah segar, sayuran, daging, produk unggas dan barang-barang lainnya dianggap memiliki potensi untuk memperkenalkan kontaminasi atau penyakit. Australia juga menekan impor produk yang bersumber dari kayu yang ditebang secara liar berdasarkan *Illegal Logging Prohibition Act* 2012, yang mulai berlaku pada tanggal 29 November 2012 untuk impor kayu dan produk kayu yang telah ditebang secara illegal.

Australia menerapkan kontrol ekspor berupa pembatasan jumlah produk komoditi primer yang bertujuan memastikan ketersediaan pasokan domestik yang memadai dan untuk menegakkan standar ekspor, contohnya untuk produk gandum yang telah dicabut izin ekspornya.

V. HASIL KUNJUNGAN

Selama kunjungan kerja ke Australia, Delegasi BKSAP DPR RI mengadakan sejumlah pertemuan, antara lain dengan Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade – Parlemen Australia, Bilateral Friendship Groups Indonesia and Australia – Parlemen Australia, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), dan Australia – Indonesia Business Council. Selain itu, Delegasi DPR RI juga berkesempatan untuk mengunjungi Bluescope Steel dan Arnotts.

Pada pertemuan dengan Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade – Parlemen Australia, Delegasi BKSAP mendiskusikan mengenai IA – CEPA dan penguatan kerja sama bilateral RI – Australia. Hubungan RI – Australia saat ini berada pada titik terpuncak, didominasi dengan

kerjasama sektor-sektor strategis yang bersifat multidimensional dalam kerangka kemitraan strategis. Dengan posisi geografis yang saling berdekatan, kedua negara memiliki saling ketergantungan di berbagai bidang. Selain itu, kedua negara memiliki kesamaan agenda hubungan luar negeri yang memprioritaskan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi yang bersifat inter-komplementer. Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA – CEPA) menjadi mekanisme efektif yang melandasi perluasan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang ekonomi. IA – CEPA merupakan modalitas utama yang mendorong kemajuan kerja sama dan mengatasi hambatan perdagangan di antara kedua negara. Berkaitan dengan isu penurunan tariff untuk produk sensitif asal Indonesia, Australia sangat mendukung penurunan tariff terutama untuk produk makanan jadi atau olahan. Australia juga mendukung pendirian Indonesian Food Innovation Centre, yang dalam pekungannya menjadi *early outcomes*. Hambatan non-tariff yang masih memberatkan antara lain standar *labelling* dan *packaging* serta Sanitary dan Phytosanitary.

Australia mengedepankan skema *value chain* dalam distribusi dan pemasaran produk barang dan jasa dalam kerangka IA - CEPA. Dalam kaitan ini, *design and branding* menjadi komponen kerjasama IA - CEPA yang tetap harus diperhatikan dan disepakati berdasarkan aturan dan regulasi WTO dan WIPO. Australia juga membuka akses pasar bagi produk barang dan investasi jasa asal Indonesia sepanjang Indonesia memberikan akses *design and branding* kepada Australia untuk keperluan pemasaran produk Indonesia di Australia

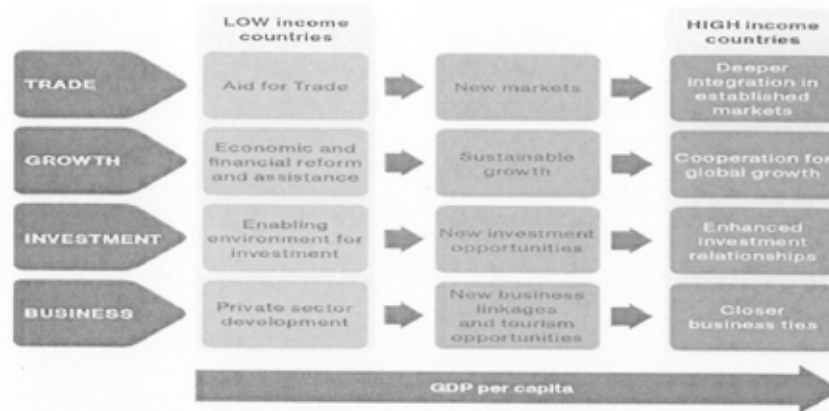
Australia mempunyai minat besar untuk mempertahankan impor produk turunan (*derivatives*) minyak kelapa sawit (CPO) asal Indonesia yang dinilai prospektif dan memiliki pangsa pasar terbesar dalam skala perdagangan bilateral. Potensi pasar konsumen *derivatives* dari CPO pun cukup menjanjikan di Australia dengan melihat tren pasar domestik. Meskipun pihak Australia sangat mempercayai CPO Indonesia, namun demikian Australia tetap menghendaki CPO Indonesia memenuhi standarisasi importasi untuk *sustainable CPO transparency*.

IA – CEPA kembali mengemuka dalam pertemuan dengan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Selain membicarakan mengenai IA – CEPA, dalam pertemuan dengan DFAT dibicarakan pula mengenai visi diplomasi ekonomi Pemerintah Australia yang menjadi wewenang DFAT.

Australia memiliki visi politik luar negeri Australia untuk menjadi *active middle power* dengan tiga pilar utama:

- aliansi tradisional dengan AS dan Inggris
- engagement dengan kawasan Asia-Pasifik melalui peningkatan hubungan dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India dan Indonesia
- kerja sama dalam kerangka multilateral di PBB

Menyadari bahwa kemakmuran Australia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global, diplomasi ekonomi menjadi salah satu fokus pemerintah Australia. Perdagangan internasional tercatat menyumbang 40 persen PDB Australia pada tahun 2016. Australia memiliki GDP per kapita tertinggi ke-11 di dunia dan merupakan ekonomi terbesar ke-13. Untuk mempertahankan kinerja ini tentunya membutuhkan keterlibatan internasional yang kuat. Australia mengedepankan diplomasi ekonomi yang berlandaskan empat pilar yaitu perdagangan, pertumbuhan ekonomi, investasi dan bisnis.



Diambil dari Department of Foreign Affairs and Trade <http://dfat.gov.au/trade/economic-diplomacy/Pages/economic-diplomacy-activities-across-australias-international-relationships.aspx>

Diplomasi ekonomi Australia dijalankan secara komprehensif dengan melibatkan diplomat-diplomat sebagai ujung tombak diplomasi dan melibatkan peran pemerintah negara bagian, perwakilan dagang serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan diplomasi ekonomi berada di bawah koordinasi *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* yang bekerja bersama-sama dengan mitranya yaitu *Austrade*, *The Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)*, *the Export Finance and Insurance Corporation (EFIC)*, *Tourism Australia* dan perwakilan-perwakilan diplomatik di luar negeri.

Dalam pertemuan dengan *Bilateral Friendship Groups Indonesia and Australia* – Parlemen Australia dibahas mengenai kekeluasaan visa kunjungan guna mendukung peningkatan kerja sama ekonomi dan lalu lintas pebisnis antar kedua negara. Selain itu delegasi mendapat pertanyaan mengenai isu Papua dan keistimewaan Papua sebagai daerah otonomi khusus.

Isu produk kelapa sawit Indonesia kembali mengemuka dalam pertemuan dengan *Australia – Indonesia Business Council*.

Pada tanggal 24 Oktober 2017, Delegasi melakukan kunjungan ke perusahaan industri baja **Bluescope Steel Ltd**. Pada kunjungan ini, Delegasi diterima oleh **Mike Archer (Corporate Affairs Manager)**, **Craig Neelson (Community and Communication Manager)** dan **David Jenkins (Manager Government Relations)**.

Bluescope adalah produsen baja untuk pasar domestik Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan industri bangunan dan konstruksi. Bluescope merupakan pemasok baja lapis terbesar ketiga di dunia, khususnya untuk kawasan Oseania dan Asia Pasifik dengan jumlah pegawai sekitar 17.000 orang yang tersebar di 3 negara. Bluescope memiliki 3 (tiga) pabrik baja utama yakni di Auckland (New Zealand), Ohio (Amerika Serikat) serta Port Kembla yang dikunjungi delegasi pada kali ini.

Dalam konteks kerjasama dengan Indonesia, Bluescope telah menggunakan pasokan bahan baku dari Krakatau Steel sejak tahun 1994 dan telah melakukan pembelian *cold rolled coil (CRC)* lebih dari 2 juta ton. Bluescope juga telah mendirikan Bluescope Indonesia, yang merupakan perusahaan

patungan antara Bluescope Steel Ltd dan Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) yang kini menjadi salah satu produsen baja lapis terkemuka. Bluescope Indonesia yang berdiri sejak tahun 1994 ini telah menggunakan fasilitas pelapisan dan pengecatan metalik baja datar di Cilegon.

Dalam kesempatan ini, Bluescope juga mengutarakan keinginan perusahaannya untuk membangun pusat pelatihan SDM di Indonesia bekerjasama dengan PT. Krakatau Steel agar dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berstandar internasional. Menanggapi hal tersebut, Delegasi juga menyampaikan harapan agar selain pelapisan baja ringa, Bluescope juga membangun fasilitas peleburan dan pengolahan besi di Indonesia untuk dipasarkan ke mancanegara.

Delegasi kemudian melanjutkan kunjungannya ke **Arnott's Biscuits Ltd.** Yang merupakan produsen biskuit/kue kering terbesar di Australia dan pemasok terbesar kedua di AS. Arnott's telah berkontribusi besar bagi perekonomian Australia melalui pembukaan lapangan kerja bagi 2.400 penduduk Australia dan penggunaan bahan baku dan jasa dari petani serta perusahaan lokal bagi proses produksinya. Saat ini, Arnott's telah mengekspor produknya ke 40 (empat puluh) negara termasuk Jepang, AS, Kanada, Inggris, Indonesia dan Selandia Baru.

Di Indonesia, Arnott's membangun pabrik yang pertama di Indonesia berlokasi di Bukit Manikam Sakti, Bekasi. Dalam kunjungan ini, pihak Arnott's juga menyampaikan komitmennya untuk membangun pabrik kedua di Indonesia karena tingginya permintaan dalam negeri Indonesia dan beberapa negara di Asia. Pabrik kedua ini berlokasi di kawasan industri Jababeka Bekasi yang sangat strategis untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan ringan ke seluruh wilayah Indonesia,

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Delegasi BKSAP DPR RI telah menjalankan tugas sesuai dengan misi dari kunjungan dan telah mendapatkan sejumlah informasi yang bermanfaat mengenai integrasi regional dan tantangan liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini Australia merasakan manfaat yang sangat besar dengan posisi sebagai mitra wicara ASEAN;
2. Australia mendorong percepatan penyelesaian negosiasi IA-CEPA;
3. Australia memiliki isu yang sama mengenai e-commerce terutama dari segi regulasi. Saat ini regulasi yang ada belum mampu mengikuti perkembangan e-commerce dan belum mengatur mengenai persaingan usaha *online* dan *offline*. Saat ini tengah digodok regulasi mengenai perpajakan usaha online di level parlemen negara bagian.
4. Australia memiliki ketertarikan terhadap isu kelapa sawit Indonesia meskipun tetap mengambil posisi netral dan memahami tekanan dari *consumer group* terkait persaingan bisnis yang dihadapi Indonesia saat ini.
5. Penguatan standarisasi menjadi satu fokus tersendiri. Kegagalan produk-produk Indonesia untuk menembus pasar Australia umumnya disebabkan karena standarisasi bentuk, *design* dan *packaging*.

B. Saran

1. BKSAP sebaiknya mengkomunikasikan hasil-hasil temuan kunjungan kerja baik secara internal di DPR RI kepada Komisi-Komisi terkait terutama Komisi VI yang membidangi Perdagangan, Persaingan Usaha dan Standarisasi Nasional, dan Komisi IV yang membidangi Kelapa Sawit. Selain itu, BKSAP dapat melakukan komunikasi hasil kunjungan kerja ini kepada Kementerian/Lembaga terkait yang menjadi mitra kerja Komisi-Komisi tersebut. Komunikasi dapat dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) atau Seminar yang telah menjadi program kerja panja Kerja Sama Ekonomi Regional terkait perdagangan internasional;
2. Salah satu fokus diplomasi ekonomi yang dijalankan Pemerintah RI saat ini adalah memperkenalkan produk-produk Indonesia di luar negeri sebagai salah satu aspek penting untuk mendorong peningkatan nilai ekspor. Pasal 80 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan pembentukan Badan Promosi Dagang. Pada awal tahun 2016, Pemerintah telah berencana untuk membentuk Badan Promosi Ekspor Nasional yang terdiri dari tujuh belas (17) Kementerian. Pembentukan Badan tersebut dapat memberikan dampak positif dari segi efisiensi anggaran namun selayaknya tetap mengedepankan efektivitas promosi produk-produk, jasa dan pariwisata Indonesia. Menarik kesimpulan dari diskusi dengan Komisi di Parlemen, DFAT maupun pelaku bisnis, masih diperlukan optimalisasi peran-peran perwakilan RI dan Atase Perdagangan di luar negeri bagi sosialisasi kebijakan Indonesia mengenai kelapa sawit dan produk turunannya maupun potensi perdagangan Indonesia.

VII. PENUTUP

Demikian pokok-pokok Laporan Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk untuk Menindaklanjuti Resolusi-resolusi organisasi antar parlemen regional terkait tantangan integrasi regional dan liberalisasi perdagangan pada tanggal 22 – 28 Oktober 2017 ke Canberra dan Sydney. Diharapkan dari kunjungan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja BKSAP. Atas nama Delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2017

KETUA DELEGASI,



Dr. NURHAYATI ALI ASSEGAFF, M.Si

A-432

LAMPIRAN

Laporan Kunjungan Panitia Kerja
Kerjasama Ekonomi Regional
Badan Kerja Sama Antar
Parlemen Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia

Provinsi Kalbar - Indonesia, 23-25 Juli 2017





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

**LAPORAN KUNJUNGAN PANITIA KERJA KERJASAMA EKONOMI REGIONAL
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

TANGGAL 23-25 JULI 2017, PROVINSI KALBAR - INDONESIA

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan Panitia Kerja Kerjasama Ekonomi Regional (Panja KER) pada tanggal 23 – 25 Juli 2017 di Provinsi Kalimantan Barat didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 101/D/ST-PD.DN/BKSAP-KSR/2017 tanggal 21 Juli 2017.

B. SUSUNAN ANGGOTA PANJA

Susunan anggota panja adalah sebagai berikut:

1. Yth. Sdr. Juliari P. Batubara, Wakil Ketua BKSAP/Ketua Panja Kerjasama Ekonomi Regional
2. Yth. Ir. Nazarudin Kiemas, Anggota Panja/F-PDIP
3. Yth. Sdri. Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom, Anggota Panja/F-PG
4. Yth. Sdr. Sartono S.E., M.M., Anggota Panja/F-PD
5. Yth. Sdr. Jon Erizal S.E., M.B.A., Anggota Panja/F-PAN
6. Yth. Sdr. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos., Anggota Panja/F-PKS

C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN PANJA

1. Sosialisasi mengenai peran serta Parlemen dalam mendukung diplomasi ekonomi yang tengah menjadi salah satu fokus pemerintah RI.
2. Diskusi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi kerjasama ekonomi dan perdagangan sub-regional lintas batas negara.
3. Menyerap aspirasi stakeholders di daerah terkait tantangan dan peluang yang dihadapi menyusul implementasi kerjasama ekonomi pemerintah daerah di tingkat regional.
4. Mendapatkan masukan pemerintah daerah dan DPRD untuk DPR sebagai bahan perumusan kebijakan untuk skala nasional.

D. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi kunjungan lapangan dipersiapkan oleh tim pendamping Panja yang terdiri dari Tenaga Ahli BKSAP dan Sekretariat Kerja Sama Regional BKSAP. Materi disusun berdasarkan masukan yang komprehensif dari departemen terkait. Untuk persiapan teknis, Sekretariat Kerja Sama Regional BKSAP telah melakukan peninjauan dan komunikasi intensif dengan Pemda Provinsi Kalimantan Barat.

II. ISI LAPORAN

A. URAIAN TENTANG KUNJUNGAN PANJA

Konsep diplomasi total yang diadopsi Pemerintah RI membuka kesempatan bagi entitas sub-negara untuk menjalankan kebijakan luar negeri. UU no. 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah otonom untuk melakukan sebagian kerja sama luar negeri. Hal ini tercantum dalam pasal 42 ayat (1), bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ditegaskan pula dalam penjelasan pasalnya bahwa selain *sister – city/province*, Pemda juga dapat membuat perjanjian kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU Pemda menjadi landasan hukum pelaksanaan *paradiplomacy* oleh pemerintah daerah di Indonesia bersama dengan UU no.24/2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pada masa sidang ke V tahun 2017 ini, Panja Kerjasama Ekonomi Regional mengagendakan kunjungan lapangan ke Provinsi Kalimantan Barat. Dasar pemilihan daerah tujuan adalah letak geografis Provinsi Kalbar dan posisi strategis yang dimilikinya untuk menjadi pintu gerbang perdagangan dan investasi sub-regional. Dengan luas wilayah 146.807 km², Kalimantan Barat terletak di lokasi yang dekat dengan pusat energi gas Natuna, Singapura sebagai salah satu hub utama kawasan untuk transportasi global dan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1, dan berbatasan darat dengan Sarawak – Malaysia.

Secara bilateral, Kalimantan Barat telah menjalin kerjasama di bidang sosial ekonomi daerah perbatasan Malaysia (Sarawak dan Sabah) melalui Sosek Malindo. Selain Kalimantan Barat, Kalimantan Timur juga tergabung dalam kerangka kerjasama ini. Koordinasi Sosek Malindo di bawah *General Border Committee* (GBC) di masing-masing negara. Di Indonesia GBC diketuai oleh Panglima ABRI.

Di bawah GBC telah dibentuk pula Kelompok Kerja (KK) Sosek Malindo di tingkat provinsi/negeri yang ditujukan untuk:

- a. menentukan proyek proyek pembangunan sosial ekonomi yang digunakan bersama,
- b. merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan,
- c. melaksanakan pertukaran informasi mengenai proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan bersama, dan menyampaikan laporan kepada KK Sosek Malindo tingkat pusat mengenai pelaksanaan kerjasama pembangunan sosial ekonomi di daerah perbatasan.

Selain itu, Kalimantan Barat merupakan bagian dari kerjasama ekonomi regional *Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asia Growth Area* (BIMP-EAGA). BIMP-EAGA secara resmi terbentuk pada *ASEAN 1st Ministerial Conference* di Davao City, Filipina, pada tanggal 26 Maret 1994. Tujuan pembentukan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang berada di perbatasan ASEAN. Provinsi di Indonesia yang menjadi anggota BIMP-EAGA adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kerjasama teknis BIMP-EAGA meliputi berbagai bidang

yang terbagi dalam cluster yaitu: (a) Cluster Pembangunan Sumber Daya Alam diketuai oleh Indonesia, (b) Cluster Transportasi, Infrastruktur, dan Informasi, Komunikasi, dan Pengembangan Teknologi yang diketuai oleh Brunei Darussalam, (c) Cluster Pengembangan Pariwisata yang diketuai oleh Malaysia, (d) Cluster Pembangunan Usaha Kecil dan Menengah diketuai oleh Filipina, dan (e) Task Force on Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan yang diketuai oleh Filipina.

Berdasarkan data BPS, industri kayu masih mendominasi jenis usaha kecil dan mikro di berbagai desa di Kalimantan Barat. Selain itu, Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi pengembangan industri kelapa sawit. Saat ini luas lahan sawit di Kalimantan Barat mencapai 1.312.517 Ha dengan total produksi CPO mencapai 1.174.499 ton (data 2014). Pemerintah daerah mencatat terdapat peningkatan minat masyarakat dalam mengembangkan industri sawit. Namun saat ini masih terdapat berbagai tantangan antara lain kampanye anti sawit dari pihak dalam dan luar negeri serta potensi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016.

Hingga saat ini negara-negara di kawasan Uni Eropa masih menjadi tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia. Pada tanggal 4 April 2017, Parlemen Eropa telah mengadopsi Resolusi mengenai sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit (*Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforests*) diterbitkan karena prosedur penanaman sawit di negara-negara eksportir dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

B. AGENDA KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan lapangan panja terdiri dari sejumlah agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Sekda Pemerintah Provinsi, BAPPEDA, Jajaran SKPD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, dan KADIN.
2. Kunjungan ke industri kelapa sawit di Siantan, PT. Wilmar Cahaya Indonesia.
3. Kunjungan ke industri *One Village One Product (OVOP) Aloe Vera Borneo*.

C. HASIL-HASIL KUNJUNGAN

Pertemuan antara Anggota Panja KER dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, **Yth. Drs. Christiandy Sanjaya S.E., M.M.**, didampingi jajaran SKPD dan pengusaha yang mewakili KADIN setempat, dan dipimpin oleh **Yth. Sdr. Juliari. P. Batubara** selaku Ketua Panja, dilaksanakan di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Pertemuan yang berlangsung dengan hangat dan dinamis tersebut menghasilkan beberapa masukan terkait pelaksanaan kerjasama ekonomi sub-regional selama ini.

Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah sinergi antara pusat dan daerah. Hal ini disebabkan antara lain oleh lambatnya realisasi terhadap asas legalitas status kawasan pabean Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat oleh Kementerian terkait. Hal ini tentu saja berakibat langsung terhadap kinerja ekspor impor melalui PLBN dan tentunya terhadap perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan dan sekitar PLBN. Dimana *spillover effect* yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur PLBN belum memberikan hasil maksimal. Untuk itu diperlukan dukungan dalam mendorong segera diterbitkannya legalitas hukum terkait status kawasan pabean dan kode pelabuhan darat. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan dukungan untuk mendorong segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pendukung Undang – Undang Nomor

7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya yang menyangkut perdagangan lintas batas.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menghadapi tantangan mengelola persaingan dengan pihak Malaysia dimana pihak Malaysia cenderung mengedepankan kesiapan sarana PLBN Entikong terlebih dahulu. Setelah itu baru mereka akan mempersiapkan daerah mereka yang berbatasan dengan PLBN Nanga Badau dan PLBN Aruk sebagaimana tercantum dalam hasil kertas kerja Sosek Malindo ke 32. Selain itu keinginan Kalimantan Barat untuk menggunakan cara goods-in-transit masih menemui kendala dan sedang dalam pembahasan oleh pihak Malaysia (Sarawak).

Pemerintah Kalimantan Barat memiliki keinginan untuk menjadi Hub ASEAN guna mendukung implementasi *ASEAN Master Plan on Connectivity*. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di beberapa Kabupaten dan mendirikan pusat logistik berikat oleh pihak swasta untuk memaksimalkan posisi Kalimantan Barat sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (hub transportasi utama global).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung upaya-upaya diplomasi parlemen yang dilakukan DPR RI. Diharapkan upaya-upaya tersebut dapat DPR RI dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di forum pertemuan regional dan multilateral.

Sedangkan terkait industri kelapa sawit, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan daya saing ini antara lain dengan:

1. Melakukan perbaikan infrastruktur mulai dari perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan antar Kabupaten maupun antar Provinsi, meningkatkan pelayanan pelabuhan antara lain dengan dibukanya *Border Nanga Badau* di Kabupaten Kapuas Hulu dan *Border Aruk* di Kabupaten Sambas (yang belum lama ini di resmikan oleh Bapak Presiden Jokowi). Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat untuk mencapai kesuksesan program hilirisasi industri sawit tersebut seperti pasokan energi, penyediaan air bersih, sistem transportasi jalan, jembatan dan pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini mempunyai *multiplier effect* pada berbagai industri yang mendorong perbaikan ekonomi masyarakat.
2. Melakukan hilirisasi industri yang nantinya memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, peningkatan ekonomi masyarakat setempat, dan penyerapan tenaga kerja.

Hilirisasi industri minyak kelapa sawit saat ini dinilai tidak cepat berkembang akibat belum optimalnya insentif dan keberpihakan pemerintah. Kebijakan dan peraturan yang kurang tepat juga menyebabkan investasi di sektor hilir juga menurun oleh sebab itu saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajukan peninjauan ulang terhadap produk-produk hukum yang tidak berpihak kepada investasi. Beragamnya regulasi di masing-masing daerah akibat otonomi juga dapat menghambat berkembangnya industri hilir tersebut. Sejauh ini pemanfaatan produk turunan CPO di Kalimantan Barat baru diolah sebagai minyak goreng oleh PT. Cahaya Kalbar (PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk).

Selanjutnya, secara teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan upaya-upaya di bawah ini:

- Program Replanting (dengan memanfaatkan bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengalokasikan dana Rp 2,5 triliun untuk melakukan penanaman ulang (*replanting*) kebun sawit tahun ini). Program penggantian Benih Palsu yang didukung melalui Dana APBD I dan APBN.
- Pembinaan dan Penanggulangan Kebakaran lahan dan kebun (yang dilakukan melalui lintas sektoral antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan (SPORC), serta Badan yang membidangi Lingkungan Hidup Daerah.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 584 TAHUN 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar untuk usaha Perkebunan di Kalimantan Barat.

Upaya-upaya peningkatan daya saing tersebut saat ini di Implementasikan untuk pengolahan sawit secara berkelanjutan melalui Penerapan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015. Terdapat tujuh Prinsip ISPO dan beberapa kriteria praktis serta indikator yang menjadi acuan sertifikasi ISPO. Dalam ketentuannya Peraturan tersebut memiliki tujuh prinsip dan Kriteria ISPO yaitu:

1. Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan.
2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit.
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas.
6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.
7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

Sampai saat ini 11 unit perusahaan di Kalimantan Barat telah memiliki sertifikasi ISPO dan 34 perusahaan sedang dalam proses sertifikasi. Meskipun hal ini masih jauh dari target secara keseluruhan tapi upaya untuk mendorong perusahaan perkebunan untuk memiliki sertifikasi ISPO terus dilakukan. Antara lain dengan pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan yang setiap tahun dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten dan Provinsi di Kalimantan Barat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah mencanangkan pembangunan hijau (*Green Growth*) ramah lingkungan berbasis komoditas. Program ini sebagai upaya mendukung Kontribusi Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi. Dalam sesi *Empowering Innovation and Enhancing Climate Change Action for Sustainable Development* pada COP22 di Maroko, Gubernur Kalimantan Barat menyatakan, ada beberapa hal yang dilakukan Kalimantan Barat dalam upaya menurunkan emisi. Misalnya, memperkuat kesatuan pengelolaan hutan, mengendalikan penggunaan ruang dan tata kelola izin, serta membangun kemitraan dengan swasta, memastikan rantai pasok komoditas diproduksi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kalimantan Barat juga menjamin pembangunan rendah emisi yang inklusif dengan keterlibatan aktif masyarakat adat dan petani kecil.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kunjungan lapangan Panja mendapati bahwa setidaknya ada tiga hal yang dapat dijadikan rekomendasi Panja yaitu pengaturan legalitas hukum status kepabeanaan

dan kode pelabuhan darat guna memaksimalkan keberadaan PLBN dan potensi strategis Kalimantan Barat sebagai hub transportasi global,

Panja juga memutuskan untuk membentuk tim kecil yang akan melakukan pembahasan dan follow up atas masukan-masukan dari stakeholders terkait.

B. SARAN

1. Hasil kunjungan lapangan Panja sekiranya dapat dikomunikasikan ke Komisi-komisi terkait guna mendapatkan tindak lanjut yang sesuai.
2. Hasil kunjungan Panja ini dapat menjadi basis bagi kunjungan lapangan Panja selanjutnya.
3. Melakukan *follow up* atas keputusan Panja untuk membentuk tim kecil.

IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 6 (Enam) Anggota DPR RI, 1 (satu) orang Pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI, 2 (dua) orang staf Sekretariat BKSAP (Sekretaris Delegasi), 1 (satu) orang Tenaga Ahli BKSAP, 1 (satu) orang wartawan 1 (satu) orang wartawan TV Parlemen adalah sebesar Rp 120.024.000,- (seratus dua puluh juta dua puluh empat ribu rupiah).

B. KETERANGAN LAMPIRAN

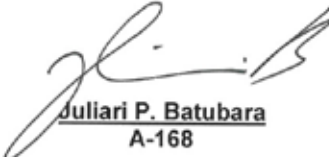
Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

- Materi paparan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
- Materi respon Pemda atas topik-topik yang diajukan melalui TOR;
- Kliping Berita;
- Dokumentasi Foto.

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kunjungan Panja Kerjasama Ekonomi Regional DPR RI berlangsung pada tanggal 23 – 25 Juli 2017 di Kalimantan Barat. Dokumen terkait akan dijadikan lampiran. Atas nama Panja, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas demi bangsa dan negara. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 31 Juli 2017
Ketua Panja Kerjasama Ekonomi Regional,


Juliar P. Batubara
A-168

DOKUMENTASI FOTO



Ketua Panja, Sdr. Juliari P. Batubara sedang memberikan paparan singkat mengenai Panitia Kerja KER (Kerja Sama Ekonomi Regional) kepada Wakil Gubernur beserta Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



Sdr. Jon Erizal, S.E., M.B.A sedang menyampaikan pandangan untuk perlunya dibentuk Tim Ahli BKSAP dengan Pemprov Kalbar untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi untuk meningkatkan perekonomian di Kalimantan Barat



Sdr. Ir. Nazarudin Kiemas sedang memberikan pandangan inovasi kepada Pemprov Kalbar di bidang perkebunan supaya tidak hanya terfokus pada industri sawit



Sdr. Sartono juga memberikan pandangan perihal upaya-upaya yang harus dilakukan Pemprov Kalbar guna meningkatkan perekonomian



Sdr. Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom., menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pemprov Kalbar perihal sejauh mana upaya Pemprov berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan menjaga produk lokal dari persaingan harga di kawasan berbatasan



Sdr. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos., sedang menyampaikan pandangan bahwa kemajuan infrastruktur akan mendukung peningkatan perekonomian daerah



Foto Rombongan Panja KER BKSAP pada saat mengunjungi Industri UMKM Aloe vera yang sudah siap bersaing dengan produk internasional





Foto Rombongan Panja KER BKSAP pada saat melakukan study visit ke PT. Wilmar
Cahaya Indonesia, Tbk



KLIPING BERITA

Himpun Masukan RUU Perkelapasawitan, Panja KER BKSAP Tinjau Industri Kelapa Sawit Pontianak

Selasa, 25 April 2017 10:04 WIB



Wakil Ketua BKSAP Juliar P. Batubara dan Panja Kerjasama Regional (KER) Badan Kerjasama Antar Parlemen meninjau Industri Kelapa Sawit di Pontianak, yakni PT Wilmar dan kunjungan ke industri OVOP Aluevera Borneo di Siantan, Pontianak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panja Kerjasama Regional (KER) Badan Kerjasama Antar Parlemen meninjau Industri Kelapa Sawit di Pontianak, yaitu ke PT Wilmar dan kunjungan ke industri OVOP (*one village one product*) Aluevera Borneo di Siantan, Pontianak.

Menurut Ketua Panja KER Juliar P. Batubara, Panja ini diharapkan dapat lebih berperan sebagai forum yang menyediakan ruang dialog dan pengayaan isu-isu dalam membuat legislasi atau perundang-undangan dan melakukan pengawasan menjamin pelaksanaan kerjasama ekonomi yang efektif.

"Anggota Panja terdiri dari Anggota BKSAP dan bersifat lintas komisi sehingga dapat berperan dalam memastikan sinergi antara resolusi/keputusan yang diambil dalam sidang-sidang parlemen regional dengan pembahasan-pembahasan di Komisinya," ujar Juliar yang juga Wakil Ketua BKSAP tersebut.

Dia menjelaskan, dasar dari pembentukan Panitia Kerja karena adanya sebuah kebutuhan untuk dapat membangun dialog dan berbagi pengalaman dengan parlemen negara-negara lainnya dan mendukung misi diplomasi ekonomi Pemerintah RI.

"Sejalan dengan mandat BKSAP untuk mewakili kepentingan diplomasi parlemen Indonesia, anggota Panja dapat menggalang kerjasama dengan Anggota Parlemen negara lain melalui organisasi-organisasi keparlemenan yang memiliki agenda kerjasama ekonomi antara lain ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF),

dan Asian Parliamentary Assembly (APA),"paparnya, kepada wartawan, Selasa, (25/04/2017).

Nantinya, jelas Juliari, Panja akan menghasilkan saran atau rekomendasi terkait kerjasama ekonomi regional kepada pihak eksekutif atau pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang didiseminasikan pada akhir masa kerja Panja.

Dia menambahkan, peninjauan ke Industri Kepala sawit dan OVOP Alluevera Borneo dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU Perkelapasawitan yang masih digodok di DPR RI.

"Kita juga mengharapkan kunjungan ini dapat meningkatkan kontribusi DPR RI di industri Kelapa sawit dalam memastikan peningkatan kondisi sosial ekonomi petani mengingat saat ini sekitar 6 juta rakyat Indonesia menggantungkan hidup sebagai petani kecil di perdesaan, meningkatkan profesionalitas pengelolaan sektor kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir serta menjamin kepastian hukum dan memberikan solusi terkait carut marut perizinan perkebunan kelapa sawit,"tambah Politisi dari Fraksi PDIP tersebut.

Kunker KER akan dilaksanakan pada tanggal 25-27 April, tim terdiri dari tujuh orang anggota Dewan yang dipimpin langsung oleh Ketua Panja KER Juliari P. Batubara sekaligus Wakil Ketua BKSAP DPR RI. Berikut nama anggota Panja KER, Nazarudin Kiemas (F-PDIP), Dwie Aroem Hadiatie (F-PG), Sartono (F-PD), Jon Erizal (F-PAN), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Achmad Farial (F-PPP). **(Pemberitaan DPR RI)**

Kalbar Harapkan Bksap Perjuangkan Nasib Perkebunan Sawit

Senin, 24 Juli 2017 22:59 WIB

Pontianak (Antara Kalbar) - Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya mengharapkan Panja Kerja Sama Ekonomi Regional Badan Kerja Sama Antarparlemen (KER-BKSAP) DPR RI memperjuangkan nasib perkebunan sawit, pascaresolusi parlemen Uni Eropa.

Kesimpulan kami dari hasil diskusi dengan teman-teman asosisasi, resolusi ini keluar karena masalah bisnis, bukan karena lingkungan hidup. Jika reduksi karbon tak mungkin sawit tidak kalah sama jagung atau bunga matahari," kata Christiandy saat menerima kunjungan Panja KER-BKSAP di Balai Petitih, Senin.

Resolusi parlemen Uni Eropa menyatakan produk sawit penyebab deforestasi, menciptakan pelanggaran HAM, dan tidak mendukung pembangunan keberlanjutan.

Christiandy menjelaskan, permasalahan tersebut diharapkan menjadi masukan penting untuk disampaikan kepada kementerian dan pihak terkait lainnya.

Sebagaimana yang ketahui, katanya, sektor perkebunan kelapa sawit menjadi primadona di Kalimantan Barat.

Dikatakannya, Pemerintah Kalimantan Barat menargetkan luasan lahan perkebunan mencapai 1,5 juta hektar hingga tahun 2025. Saat ini luasan itu sudah mencapai sekitar 1,3 juta hektare, atau sepertiga dari luas wilayah provinsi ini.

"Harapan kami agar ini bisa diperjuangkan, agar sawit bisa tetap diekspor. Kami juga akan banyak mengandalkan sektor perkebunan sawit," katanya.

Menurut Christiandy, dari sisi produktivitas sawit di Kalbar masih rendah, baru mencapai 2 ton per hektare per tahun. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yakni 4 ton per hektare per tahun.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas itu, di antaranya, penggunaan benih asal-asalan yang berdampak pada tidak sesuai masa tanam komoditas. Padahal perkebunan menjadi sektor yang bisa menopang perekonomian Kalimantan Barat.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Panja KER-BKSAP DPR RI Juliari P Batubara mengatakan akan menjalankan fungsi diplomasi untuk menyikapi persoalan sawit sebagaimana masukan dari Pemprov Kalbar.

"Kami akan melakukan fungsi tersebut karena setiap tahun bertemu dengan parlemen dari Eropa. Dalam forum yang relevan akan kami disampaikan hal ini," katanya.

(U.KR-RDO/A013)

Editor: Admin Antarakalbar

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Panja KER BKSAP Tinjau Industri Kelapa Sawit Pontianak

Selasa, 25 April 2017 – 15:49 WIB



Kebun kelapa sawit. Foto: dok. JPNN

jpnn.com, PONTIANAK - Panja Kerjasama Regional (KER) Badan Kerjasama antarparlemen meninjau industri kelapa sawit di Pontianak. Kunjungan dilakukan di PT Wilmar dan industri one village one product (OVOP) Aluevera Borneo di Siantan, Pontianak. Menurut Ketua Panja KER Juliari P. Batubara, panja ini diharapkan bisa lebih berperan sebagai forum yang menyediakan ruang dialog dan pengayaan isu-isu dalam membuat legislasi atau perundang-undangan.

Termasuk bisa melakukan pengawasan menjamin pelaksanaan kerjasama ekonomi yang efektif. "Anggota panja terdiri dari Anggota BKSAP dan bersifat lintas komisi sehingga dapat berperan dalam memastikan sinergi antara resolusi/keputusan yang diambil dalam sidang-sidang parlemen regional dengan pembahasan-pembahasan di Komisinya." ujar Juliari yang juga Wakil Ketua BKSAP tersebut.

Dia menjelaskan, dasar dari pembentukan panja karena adanya sebuah kebutuhan untuk bisa membangun dialog.

Selain itu untuk berbagi pengalaman dengan parlemen negara-negara lainnya dan mendukung misi diplomasi ekonomi Pemerintah RI.

"Sejalan dengan mandat BKSAP untuk mewakili kepentingan diplomasi parlemen Indonesia, anggota Panja dapat menggalang kerjasama dengan Anggota Parlemen negara lain melalui organisasi-organisasi keparlemenan yang memiliki agenda kerjasama ekonomi antara lain ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), dan Asian Parliamentary Assembly (APA)," ujarnya pada Selasa, (25/4).

Nantinya, jelas Juliari, panja akan menghasilkan saran atau rekomendasi terkait kerjasama ekonomi regional kepada pihak eksekutif atau pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang didiseminasikan pada akhir masa kerja.

Dia menambahkan, peninjauan ke industri kepala sawit dan OVOP Aluevera Borneo dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU Perkelapasawitan yang masih digodok di DPR RI.

"Kami juga mengharapkan kunjungan ini bisa meningkatkan kontribusi DPR RI di industri Kelapa sawit dalam memastikan peningkatan kondisi sosial ekonomi petani mengingat saat ini sekitar 6 juta rakyat Indonesia menggantungkan hidup sebagai petani kecil di pedesaan. Kemudian meningkatkan profesionalitas pengelolaan sektor kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir serta menjamin kepastian hukum dan memberikan solusi terkait carut marut perizinan perkebunan kelapa sawit," tambah politikus dari Fraksi PDIP tersebut. Kunker KER akan dilaksanakan pada 25-27 April, tim terdiri dari tujuh orang anggota Dewan yang dipimpin langsung oleh Ketua Panja KER Juliari P. Batubara sekaligus Wakil Ketua BKSAP DPR RI.

Berikut nama anggota Panja KER, Nazarudin Kiemas (F-PDIP), Dwie Aroem Hadiatie (F-PG), Sartono (F-PD), Jon Erizal (F-PAN), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Achmad Faria (F-PPP). (adv/jpnn)

Wagub Minta KER-BKSAP Perjuangkan Nasib Perkebunan Sawit di Kalbar
24 Juli 2017



Foto: Pemerintah Provinsi Kalbar saat menerima kunjungan PANJA MEA BKSAP DPR RI di Gedung Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar/Agustiandi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Adanya resolusi parlemen Uni Eropa yang menyatakan produk sawit Indonesia menyebabkan deforestasi, menciptakan pelanggaran HAM, dan tidak keberlanjutan membuat provinsi Kalimantan Barat mengambil tindakan.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya meminta Panitia Kerjasama Ekonomi Regional Badan Kerjasama antar Parlemen (KER-BKSAP) DPR RI ikut memperjuangkan nasib perkebunan sawit di Kalbar.

"Kesimpulan kami dari hasil diskusi dengan teman-teman asosisasi, resolusi ini keluar karena masalah bisnis, bukan karena lingkungan hidup. Jika reduksi karbon tak mungkin sawit tidak kalah sama jagung atau bunga matahari," katanya saat menerima kunjungan Panja KER-BKSAP di Balai Petitih, Senin (24/7).

Dirinya menegaskan persoalan tersebut menjadi masukan penting untuk disampaikan. Karena sampai kini, sektor perkebunan kelapa sawit tetap menjadi primadona di Kalimantan Barat.

Pemerintah Kalimantan Barat menargetkan luasan lahan perkebunan mencapai 1,5 juta hektare hingga tahun 2025. Saat ini luasan itu sudah mencapai sekitar 1,3 juta hektar, atau sepertiga dari luas wilayah provinsi ini.

"Harapan kami agar ini bisa diperjuangkan, agar sawit bisa tetap ekspor. Ke depannya pun kami juga akan banyak mengandalkan sektor perkebunan sawit," harapnya.

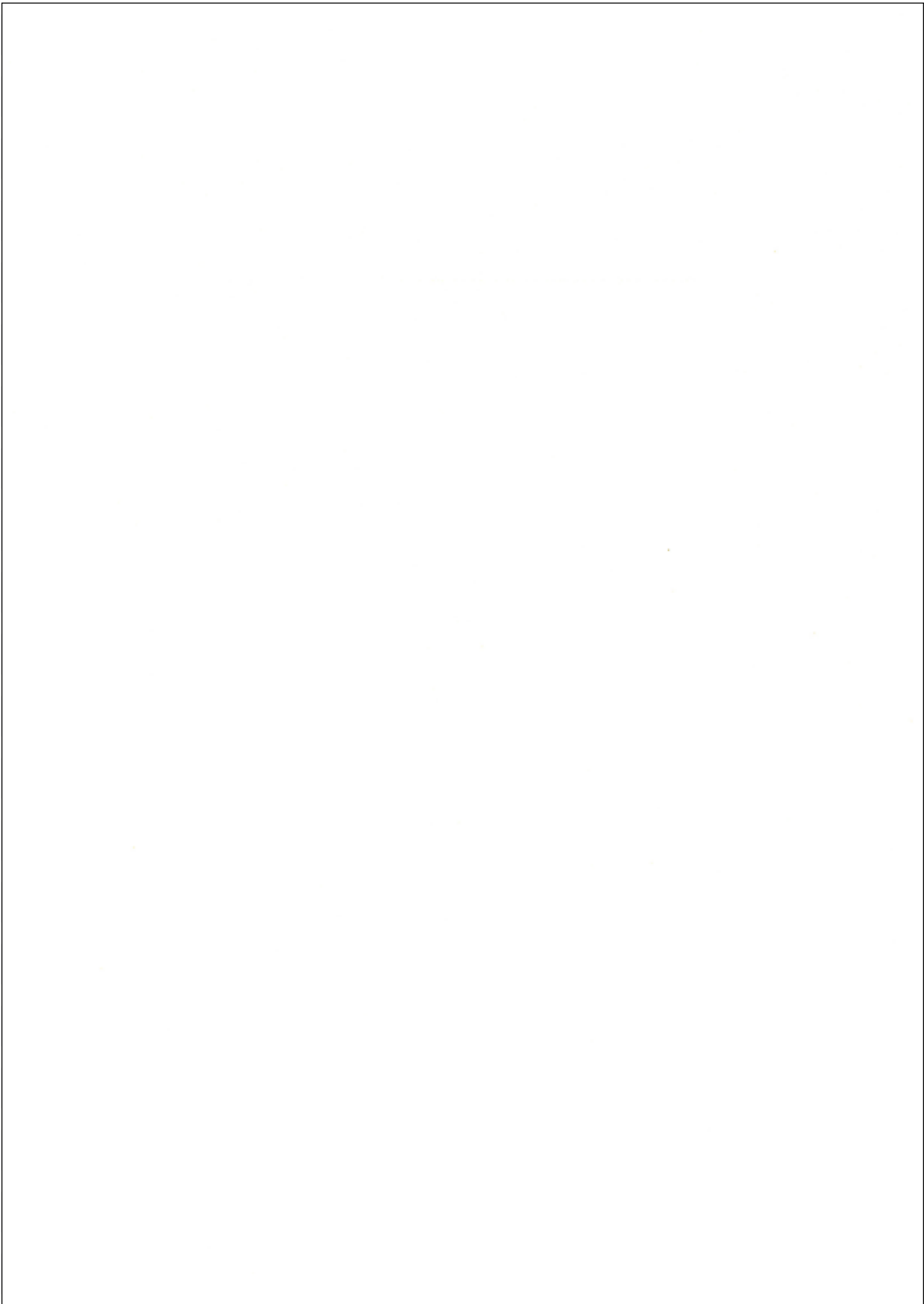
Saat ini produktivitas sawit di Kalbar baru mencapai 2 ton per hektare per tahunnya. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yakni 4 ton per hektare per tahun.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas itu diantaranya penggunaan benih asal-asalan yang berdampak pada tidak sesuainya masa tanam komoditas.

"Padahal perkebunan menjadi sektor yang bisa menopang perekonomian Kalimantan Barat," ungkapnya.

Ketua Tim Panja KER-BKSAP DPR RI Juliari P Batubara mengatakan akan menjalankan fungsi diplomasi untuk menyikapi persoalan sawit yang menjadi masukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

"Kami akan melakukan fungsi tersebut karena setiap tahunnya bertemu dengan parlemen dari Eropa. Dalam forum yang relevan akan kami disampaikan hal ini," pungkasnya.
(Agustiandi/Faisal)





POINTERS SAMBUTAN
KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT
23 – 25 JULI 2017

Yth. Juliari P. Batubara
Wakil Ketua Panja Kerjasama Ekonomi Regional/ Ketua BKSAP DPR RI

- Atas nama Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang sangat baik dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Kerja Sama Antar parlemen (BKSAP) merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap dan memiliki mandat untuk melaksanakan diplomasi parlemen. Salah satu yang menjadi prioritas diplomasi Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo adalah diplomasi ekonomi. Dalam hal ini, BKSAP DPR RI mengambil peran aktif dalam mendukung diplomasi ekonomi Pemerintah RI. Peran DPR RI diterjemahkan antara lain melalui pengawasan atas kerjasama ekonomi yang diambil pemerintah agar selalu berpegang pada visi kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
- Berdasarkan visi-misi untuk memberikan dukungan terhadap diplomasi ekonomi tersebut, maka BKSAP DPR RI membentuk Panja Kerjasama Ekonomi Regional. Panja terdiri dari anggota DPR RI lintas fraksi dan lintas komisi. Hadir dalam kesempatan ini beberapa anggota Panja dan saya persilahkan untuk memperkenalkan diri.
- Fundamental ekonomi Indonesia saat ini tengah menunjukkan kondisi relatif kuat. Meskipun pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2017 mengalami penurunan, namun perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 5% dengan *year-on-year* inflasi terkendali di rentang target BI 3 – 5 %. Selain itu, pencapaian positif ekonomi makro lainnya adalah penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta tingkat kesenjangan yang ditunjukkan oleh rasio gini di level 0,397. Hal ini tentu saja memberikan prospek bagi peningkatan investasi dalam negeri dan peluang peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, baik dalam lingkup ASEAN maupun Asia-Pasifik.

- Tujuan utama Panja Kerjasama Ekonomi Regional melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat adalah karena Kalbar merupakan salah satu wilayah Indonesia yang tergabung dalam kerangka kerjasama ekonomi sub-regional Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Sangat menarik bagi Panja untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Provinsi, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola kerjasama ini.
- Secara konseptual, BIMP-EAGA merupakan sebuah bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan daerah-daerah yang secara geografis terletak di sekitar perbatasan antara satu negara dengan negara-negara lainnya di kawasan yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Philipina. BIMP-EAGA merupakan forum kerjasama yang memiliki nilai strategis baik dari aspek ekonomi, geografis, budaya, serta lingkungan hidup. Kerjasama sub-regional ini merupakan kerjasama sub regional terbesar di Asia yang meliputi wilayah seluas 1,6 juta km².
- Posisi BIMP-EAGA yang terletak di kawasan tropis khatulistiwa memiliki kekayaan alam dan potensi pariwisata, khususnya pariwisata berwawasan lingkungan. BIMP-EAGA merupakan rumah bagi *coral triangle* terbesar di dunia, dimana kawasan ini memiliki 92% total coral dunia dengan 600 spesies biota laut di dalamnya. Kawasan BIMP-EAGA memiliki 25% total hutan hujan tropis dunia, yang sangat penting bagi program-program pelestarian lingkungan, khususnya bagi pengendalian iklim dunia.
- Dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di penghujung tahun 2015 telah membuka peluang pengembangan ekonomi Indonesia sekaligus pula memberikan tantangan bagi daya saing industri dalam negeri. Terbukanya pasar ASEAN yang terdiri dari 600 juta jiwa memberikan peluang bagi pelaku industri di dalam negeri untuk melakukan ekspansi. Namun kebebasan arus pergerakan barang, jasa dan tenaga kerja intra-ASEAN memberikan pekerjaan rumah bagi peningkatan daya saing produk dan daya saing sumber daya manusia.
- Selanjutnya, rapat pleno Panja telah memutuskan untuk menjadikan komoditas kelapa sawit sebagai salah satu fokus kajian Panja. Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi untuk mengembangkan sektor industri kelapa sawit. Salah satu tantangan yang saat ini dihadapi adalah mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas produk kelapa sawit Indonesia agar sesuai dengan standar pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan.
- BKSAP DPR RI memiliki keprihatinan mendalam akan *black campaign* mengenai kelapa sawit beberapa negara Eropa terutama setelah diterbitkannya Resolusi Parlemen Eropa mengenai aturan ketat Kelapa Sawit masuk ke pasar Uni Eropa dan kaitan produksi Kelapa Sawit dengan penggundulan hutan. Sejalan dengan sikap Pemerintah RI, kami meyakini bahwa Resolusi tersebut telah mengeleminasi upaya-upaya *multistakeholders* di Indonesia dalam menciptakan pembangunan

sektor kelapa sawit secara berkelanjutan. Selain itu, Skema sertifikasi tunggal *sustainable palm oil* yang diterbitkan oleh Uni Eropa akan meningkatkan *barriers to trade* yang tidak sesuai dengan semangat kerjasama perdagangan multilateral di bawah WTO.

- Beberapa upaya dialog dengan Parlemen Uni Eropa telah dilakukan BKSAP. Antara lain dalam kunjungan Panja MEA ke Parlemen Jerman tahun 2016. Selanjutnya, BKSAP bersama-sama dengan Komisi I, Komisi IV dan Komisi VI telah melakukan dialog dengan delegasi Komisi Perdagangan Parlemen Eropa (European Parliament's Committee on International Trade - INTA) pada kunjungan ke DPR RI pada bulan Mei 2017.
- Di level nasional, DPR RI berharap Resolusi mengenai kelapa sawit yang dikeluarkan Parlemen Eropa dapat menjadi momentum menuju implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di sektor kelapa sawit. RUU Kelapa Sawit yang saat ini tengah dibahas di parlemen memiliki visi untuk memperbaiki regulasi industri kelapa sawit dari hulu sampai hilir. RUU ini diharapkan pula dapat melengkapi UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 14 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU Nomor 19 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Selain itu, RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diharapkan dapat memberikan penguatan bagi implementasi tanggung jawab perusahaan di sektor bisnis kelapa sawit. RUU tersebut menjangkau pula pembangunan ekonomi dan sosial komunitas setempat secara berkelanjutan. Hal ini terutama untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat Uni Eropa akan praktek-praktek pelanggaran HAM di perkebunan kelapa sawit yang memperkerjakan anak-anak di bawah umur.
- Dalam pertemuan ini, semoga kita dapat saling bertukar pikiran untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang konstruktif sebagai wujud kontribusi kita bersama dalam mendukung peningkatan daya saing nasional melalui kesiapan daerah. Melalui diskusi ini, saya yakin bahwa kita dapat menganalisa berbagai langkah-langkah antisipasi yang efektif dan komprehensif untuk menjawab berbagai peluang dan tantangan yang ada.



**KUNJUNGAN KERJA
PANJA KERJASAMA EKONOMI
REGIONAL (KER)
KE PROVINSI KALIMANTAN
BARAT**

23-25 JULI 2017

- **SEKILAS MENGENAI PANJA KER**
- **KERJASAMA EKONOMI PEMERINTAH DAERAH DI TINGKAT REGIONAL**
- **PROFIL KALIMANTAN BARAT**
- **RESOLUSI KELAPA SAWIT UNI EROPA**
- **USULAN AGENDA PEMBAHASAN**

BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) DPR RI

▪ SEKILAS MENGENAI PANJA KER

Badan Kerja Sama Antar parlemen (BKSAP) merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap dan memiliki mandat untuk melaksanakan diplomasi parlemen. Dalam melaksanakan mandat tersebut, BKSAP dapat mengambil peran dalam diplomasi ekonomi yang merupakan prioritas diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Diplomasi Parlemen ini juga dapat mendukung DPR RI dalam melakukan peran pengawasan atas kerjasama ekonomi yang diambil pemerintah agar selalu berpegang pada visi kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam melakukan tugas tersebut, BKSAP DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Kerja Sama Ekonomi Regional. Panja diharapkan untuk berperan sebagai forum yang menyediakan ruang dialog dan pengayaan isu-isu dalam membuat legislasi/perundang-undangan dan melakukan pengawasan menjamin pelaksanaan kerjasama ekonomi yang efektif. Anggota Panja terdiri dari Anggota BKSAP dan bersifat lintas komisi sehingga dapat berperan dalam memastikan sinergi antara resolusi/keputusan yang diambil dalam sidang-sidang parlemen regional dengan pembahasan-pembahasan di komisinya. Sejalan dengan mandat BKSAP untuk mewakili kepentingan diplomasi parlemen Indonesia, anggota Panja dapat menggalang kerjasama dengan Anggota Parlemen negara lain melalui organisasi-organisasi keparlemenan yang memiliki agenda kerjasama ekonomi antara lain ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), dan Asian Parliamentary Assembly (APA). Hasil kerja Panja berupa saran/rekomendasi terkait kerjasama ekonomi regional kepada pihak eksekutif/pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang didiseminasikan pada akhir masa kerja Panja.

Dasar dari pembentukan Panitia Kerja ini adalah adanya sebuah kebutuhan untuk dapat membangun dialog dan berbagi pengalaman dengan parlemen negara-negara lainnya dan mendukung misi diplomasi ekonomi Pemerintah RI.

Tujuan pembentukan Panja KER adalah:

- Sebagai wujud peran serta Parlemen dalam mendukung diplomasi ekonomi yang tengah menjadi salah satu fokus pemerintah RI;
- Sebagai forum yang menyediakan ruang dialog dan pengayaan isu-isu bagi Anggota Panitia Kerja dalam membuat legislasi/perundang-undangan dan melakukan pengawasan menjamin pelaksanaan kerjasama ekonomi yang efektif;

- Memberikan saran/ rekomendasi terkait kerjasama ekonomi regional kepada pihak eksekutif/pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
- Anggota Panja yang bersifat lintas komisi dapat berperan dalam memastikan sinergi antara resolusi/keputusan yang diambil dalam sidang-sidang parlemen regional dengan pembahasan-pembahasan di komisinya;
- Menggalang kerjasama dengan Anggota Parlemen negara lain melalui organisasi-organisasi keparlemenan yang memiliki agenda kerjasama ekonomi antara lain ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), dsb.

Diharapkan dengan adanya Panja ini dapat memberikan rekomendasi pada bidang perdagangan, pariwisata, investasi dan kerja sama pembangunan agar nantinya partisipasi Indonesia dalam kerangka kerjasama ekonomi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Selain itu Panja dapat berperan dalam mengawal implementasi

Berdasarkan keputusan rapat pleno Panja KER yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2017, Panja memutuskan beberapa kunjungan lapangan sebagai program kerja Panja dan mengagendakan komoditas sawit sebagai salah satu fokus Panja. Hal ini mengingat sawit tengah mendapatkan sorotan terutama di negara-negara Eropa dan terdapat upaya-upaya menghambat perdagangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip liberalisme perdagangan terutama dalam kerangka kerjasama WTO.

▪ KERJASAMA EKONOMI PEMERINTAH DAERAH DI TINGKAT REGIONAL

Konsep diplomasi total yang diadopsi Pemerintah RI membuka kesempatan bagi entitas sub-negara untuk menjalankan kebijakan luar negeri. UU no. 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah otonom untuk melakukan sebagian kerja sama luar negeri. Hal ini tercantum dalam pasal 42 ayat (1), bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ditegaskan pula dalam penjelasan pasalnya bahwa selain *sister – city/province*, Pemda juga dapat membuat perjanjian kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU Pemda menjadi landasan hukum pelaksanaan *paradiplomacy* oleh pemerintah daerah di Indonesia bersama dengan UU no.24/2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pada masa sidang ke IV tahun 2017 ini, Panja KER mengagendakan kunjungan lapangan ke Provinsi Kalimantan Barat. Dasar pemilihan daerah tujuan adalah letak geografis Provinsi Kalbar dan posisi strategis yang dimilikinya untuk menjadi pintu gerbang perdagangan dan investasi sub-regional.

Kalimantan Barat merupakan bagian dari kerjasama ekonomi regional Brunei-Indonesia-Malaysia-Philipina East Asia Growth Area (BIMP-EAGA). BIMP-EAGA secara resmi terbentuk pada ASEAN 1st Ministerial Conference di Davao City, Filipina, pada tanggal 26 Maret 1994. Tujuan pembentukan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang berada di perbatasan ASEAN. Provinsi di Indonesia yang menjadi anggota BIMP-EAGA adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kerjasama teknis BIMP-EAGA meliputi berbagai bidang yang terbagi dalam cluster yaitu: (a) Cluster Pembangunan Sumber Daya Alam diketuai oleh Indonesia, (b) Cluster Transportasi, Infrastruktur, dan Informasi, Komunikasi, dan Pengembangan Teknologi yang diketuai oleh Brunei Darussalam, (c) Cluster Pengembangan Pariwisata yang diketuai oleh Malaysia, (d) Cluster Pembangunan Usaha Kecil dan Menengah diketuai oleh Filipina, dan (e) Task Force on Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan yang diketuai oleh Filipina.

▪ PROFIL KALIMANTAN BARAT

Kalimantan Barat memiliki wilayah seluas 146.807 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Bagian Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata
2. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur)
3. Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa
4. Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan, 89 Kelurahan dan 1.897 desa¹.

¹Gambaran umum aspek geografis Kalimantan Barat <http://kalbarprov.go.id/info.php?idi=68>

Kalimantan Barat terhubung dengan Malaysia Timur melalui jalur perbatasan darat di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Perbatasan Entikong merupakan jalur pintu gerbang RI-Malaysia yang paling ramai di Kalimantan Barat. Untuk mendukung lalu lintas di perbatasan tersebut, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong pada bulan Desember 2016. Pembangunan PLBN tersebut sekaligus menjadi salah satu perwujudan visi pembangunan dari pinggiran dan perbatasan.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di kuartal pertama 2017 mencapai 5,22 persen. Dilihat dari kinerja ekspor, berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, kinerja ekspor mengalami akselerasi dari -4,17% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi 20,21% (yoy) pada triwulan III 2016. Akselerasi ekspor tersebut terutama didorong oleh peningkatan tajam ekspor komoditas mineral alumina olahan seiring peningkatan kapasitas pengolahan mineral alumina. Nilai ekspor alumina pada triwulan III 2016 adalah US\$47,41 juta meningkat tajam dibanding triwulan sebelumnya yaitu US\$6,54 juta. Peningkatan ekspor alumina terjadi untuk negara tujuan Tiongkok namun terjadi penurunan untuk negara tujuan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan².

Selain alumina, peningkatan ekspor ditunjang pula oleh komoditas utama karet remah, CPO, makanan ternak, komoditas buah, kacang-kacangan dan buah kering. Penurunan komoditas ekspor terjadi untuk produk olahan kayu dari -8,46% (yoy) menjadi -23,59% (yoy). Penurunan ekspor kayu olahan umumnya disebabkan oleh kondisi perekonomian negara-negara mitra dagang seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa yang belum sepenuhnya pulih.

Berdasarkan data BPS, industri kayu masih mendominasi jenis usaha kecil dan mikro di berbagai desa di Kalimantan Barat. Selain itu, Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi pengembangan industri kelapa sawit. Saat ini luas lahan sawit di Kalimantan Barat mencapai 1.312.517 Ha dengan total produksi CPO mencapai 1.174.499 ton (data 2014). Pemerintah daerah mencatat terdapat peningkatan minat masyarakat dalam mengembangkan industri sawit. Namun saat ini masih terdapat berbagai tantangan antara lain kampanye anti sawit dari pihak dalam dan luar negeri serta potensi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016.

² Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Barat November 2016 <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/kalbar/Contents/KEKR%20Provinsi%20Kalimantan%20Barat%20November%202016.pdf>

▪ RESOLUSI KELAPA SAWIT UNI EROPA

Parlemen Eropa telah mengadopsi Resolusi mengenai resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM (*Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforests*) pada tanggal 4 April 2017. Resolusi yang secara khusus menyebut Indonesia itu mendapatkan persetujuan Parlemen Eropa setelah melalui mekanisme voting dimana 640 anggota parlemen setuju, 18 menolak dan 28 abstain. Resolusi bersifat non-binding namun Parlemen Eropa telah menyerahkan laporan mengenai Resolusi tersebut pada Komisi Eropa dan Presiden Eropa. Keputusan tindakan tetap di tangan Komisi Eropa. Salah satu poin resolusi tersebut menyerukan Komisi untuk mengambil langkah-langkah penghentian bertahap dalam penggunaan minyak nabati pendorong deforestasi, termasuk kelapa sawit, sebagai komponen biofuel pada 2020.

Menyikapi hal tersebut Fourth Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang diadakan di Jakarta pada tanggal 11 April 2017 dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, dan Minister of Plantation Industries and Commodities Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong, telah mengeluarkan *Joint Communique* yang menyesalkan Resolusi tersebut. Beberapa poin yang disampaikan dalam *Joint Communique* tersebut adalah:

- Skema sertifikasi tunggal sustainable palm oil yang diterbitkan oleh Uni Eropa akan meningkatkan barriers to trade yang tidak sesuai dengan semangat kerjasama perdagangan multilateral di bawah WTO. Selain itu, skema ini kontraproduktif bagi manajemen sumber daya sawit di Indonesia mengingat saat ini Indonesia telah memiliki skema Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat mandatoris dan mengedepankan pendekatan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
- Isu sawit sebagai penyebab utama deforestasi yang tidak memiliki landasan kajian mendalam. Berdasarkan kajian Komisi Eropa tahun 2013, sawit hanya berkontribusi bagi 2,5 persen deforestasi global. Jauh di bawah kontribusi sektor peternakan, kedelai dan jagung.
- Pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi pekerja di bawah umur di perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan tuduhan keji dan tidak berdasar. Tuduhan tersebut mengenyampingkan realita bahwa industri kelapa sawit merupakan industri besar yang memberikan manfaat ekonomi dan sumber penghasilan bagi kurang lebih 16 juta petani kecil di pedesaan.

- Biofuel yang dihasilkan dari kelapa sawit dengan melalui cara-cara yang berkelanjutan lebih ramah lingkungan dibandingkan biofuel lainnya sehingga penghentian bertahap penggunaan kelapa sawit sebagai komponen biofuel pada 2020 tidak menjamin penggantinya nanti akan lebih ramah lingkungan.

Di dalam negeri, Menteri Luar Negeri telah menyatakan keberatan terhadap resolusi tersebut. Skema sertifikasi tunggal yang diusulkan dalam Resolusi Parlemen Eropa berpotensi meningkatkan *unnecessary barriers to trade* dan kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kualitas *sustainability* minyak sawit. Indonesia memiliki Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat mandatoris dengan fokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Rekomendasi pengurangan secara bertahap (*phasing out*) penggunaan minyak sawit dalam Resolusi dinilai bersifat proteksionis. Sangat aneh bahwa Resolusi merekomendasikan promosi minyak rapeseed dan bunga matahari, yang berdasarkan data justru tidak lebih baik dari minyak sawit. Resolusi juga mengesampingkan hak hidup petani kecil ladang sawit. Terdapat 16 juta orang yang secara langsung/tidak langsung tergantung pada sektor kelapa sawit. 41% produksi minyak sawit dihasilkan oleh petani kecil di pedesaan. Selain itu Resolusi tersebut mengabaikan upaya keras yang terus dilakukan Pemerintah dan multistakeholders Indonesia dalam menjaga dan menyeimbangkan isu pembangunan dan lingkungan hidup, termasuk moratorium ekspansi lahan kelapa sawit, skema kolaboratif antara pemerintah-swasta-masyarakat madani untuk restorasi gambut, praktek-praktek *sustainable management* dalam pengelolaan sawit, serta peran Indonesia yang di depan dalam upaya implementasi *Paris Agreement*.

DPR RI saat ini tengah membahas RUU Perkelapasawitan. RUU Perkelapasawitan dapat menjadi kontribusi DPR RI guna memastikan peningkatan kondisi sosial ekonomi petani mengingat saat ini sekitar 6 juta rakyat Indonesia menggantungkan hidup sebagai petani kecil di pedesaan; meningkatkan profesionalitas pengelolaan sektor kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir; serta menjamin kepastian hukum dan memberikan carut marut bagi perizinan perkebunan kelapa sawit.

Pada kesempatan pertemuan dengan Delegasi International Trade Committee European Parliament dengan BKSAP, Komisi IV dan Komisi VI pada tanggal 23 Mei 2017 di Gedung DPR RI, telah disampaikan penyesalan terkait resolusi Parlemen Uni Eropa mengenai kelapa sawit. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang aktif memperjuangkan isu lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia sendiri terlibat menjadi tuan rumah penyelenggaraan COP UNFCCC di Bali yang menghasilkan Bali Roadmap.

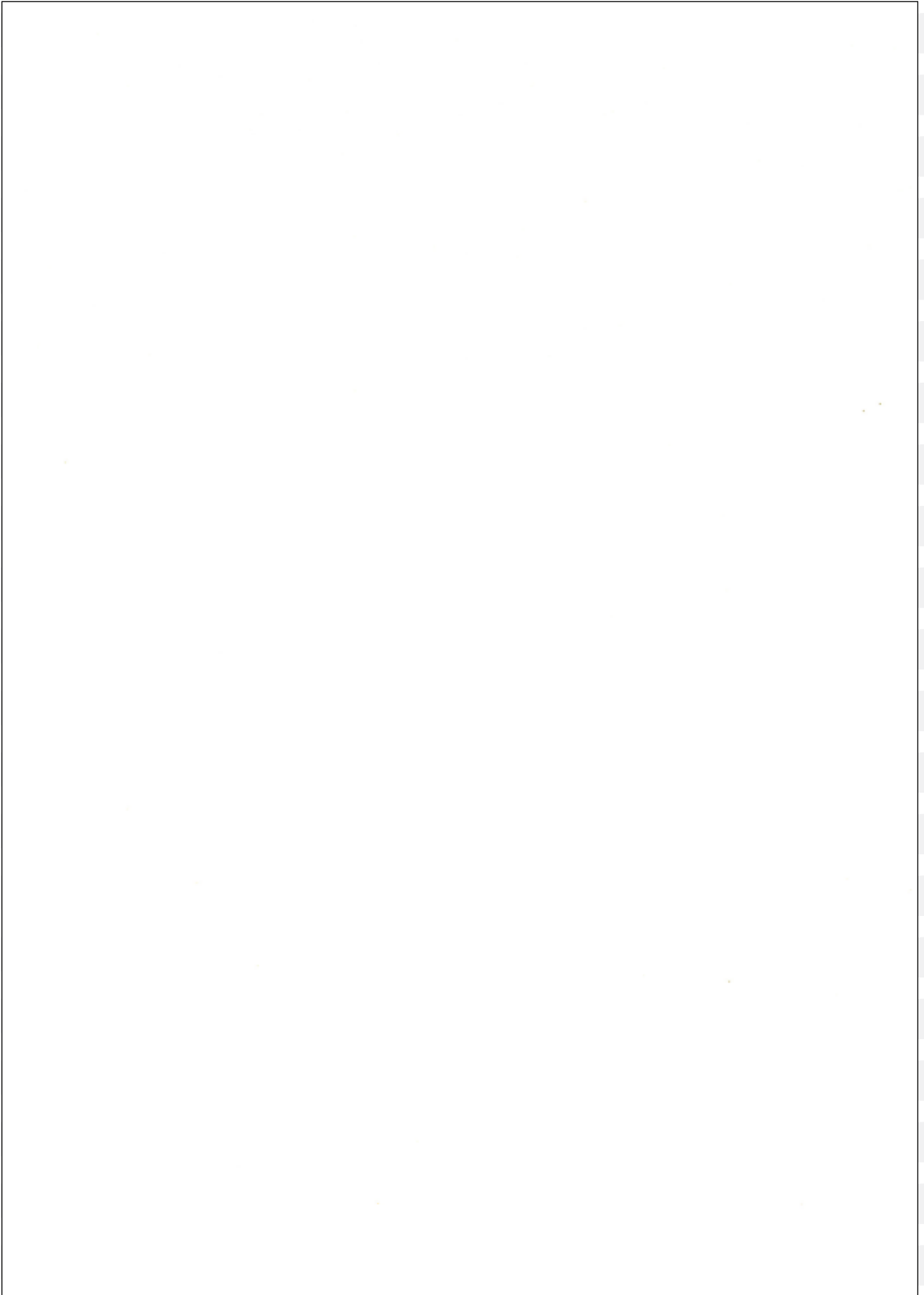
Kunjungan delegasi Parlemen Uni Eropa ke DPR RI adalah untuk membangun hubungan yang konstruktif dan intensif terkait permasalahan kelapa sawit di Indonesia. Parlemen Uni Eropa sudah melihat posisi dan pendekatan yang dilakukan oleh DPR RI terkait isu tersebut. Selain kunjungan ke DPR RI, Delegasi Parlemen Uni Eropa juga melakukan kunjungan ke perkebunan kelapa sawit di Pekanbaru untuk melihat langsung aktivitas perkebunan di sana.

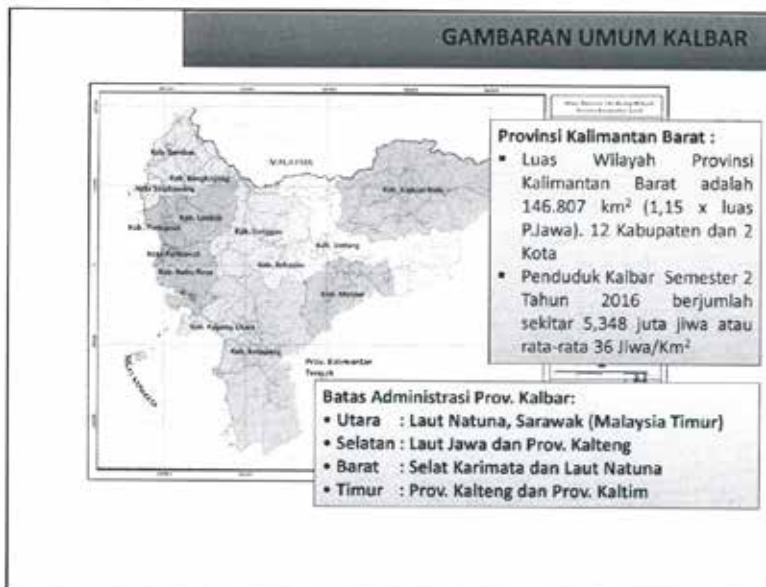
Pemerintah RI saat ini berkeinginan agar pola kerja sama yang sudah terjalin antara Indonesia dan EU untuk produk kayu, melalui lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) juga dapat dilakukan untuk produk kelapa sawit Indonesia. Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan posisi Pemerintah RI tersebut dalam pertemuan G-20 di Hamburg bulan Juli 2017.

▪ **USULAN AGENDA PEMBAHASAN**

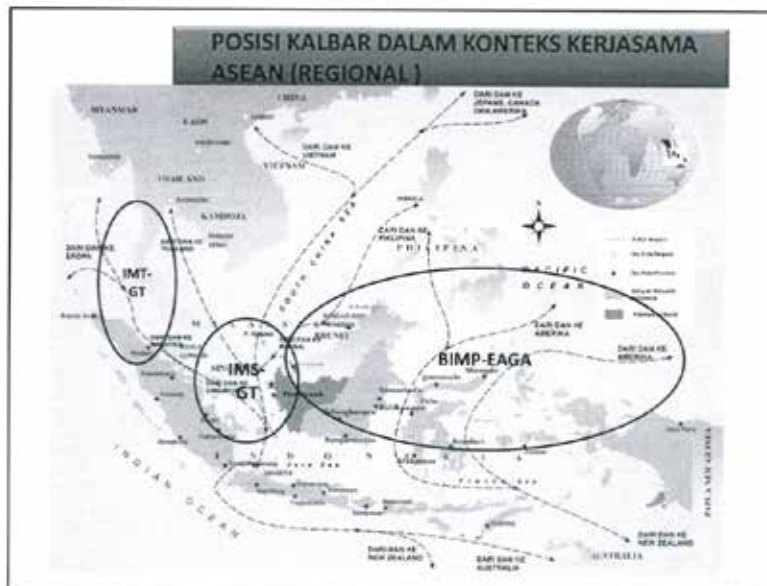
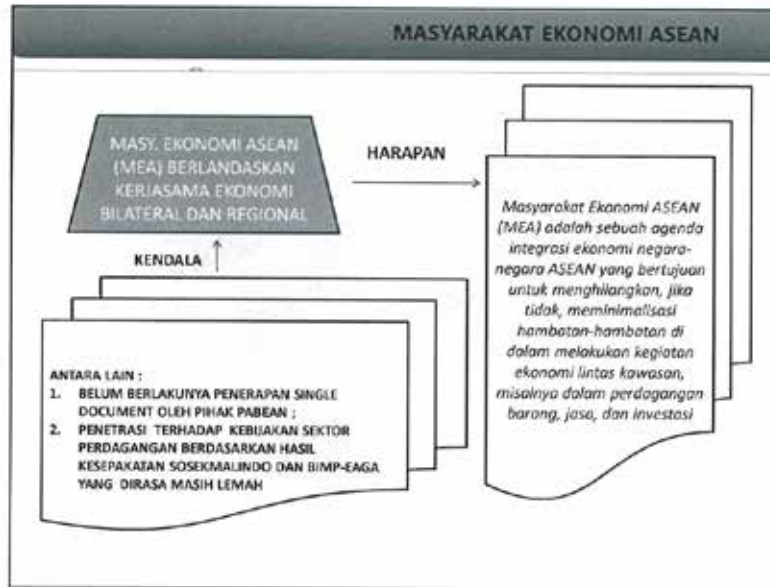
- Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi bagian kerangka kerjasama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Strategi apa yang diterapkan Pemerintah Daerah guna memaksimalkan manfaat dari kerjasama ekonomi regional tersebut?
- Bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang telah berjalan di bawah kerangka BIMP-EAGA?
- Sepanjang pengalaman Pemprov Kalimantan Barat dalam mengelola kerjasama ekonomi regional, tantangan apa saja yang dihadapi?
- Saat ini konektivitas infrastruktur sub-regional mendapatkan perhatian tersendiri BIMP-EAGA. Dalam hal ini, *sub-regional connectivity* diharapkan mendukung terwujudnya *regional connectivity* di wilayah ASEAN sebagaimana yang termaktub dalam ASEAN Master Plan on Connectivity. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mendukung implementasi ASEAN Master Plan on Connectivity tersebut?
- Pasal 69 ayat (2) UU MD3 memberikan amanat pelaksanaan fungsi diplomasi bagi DPR RI untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran apa yang diharapkan pemerintah daerah dari DPR RI dalam pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen yang dapat mendukung peningkatan daya saing daerah dalam liberalisasi perdagangan?
- Apakah ada saran/usulan kerangka legislasi yang dapat mendorong peran daerah dalam meningkatkan daya saing dalam kerangka kerjasama ekonomi antar negara?

- Bagaimana tingkat kesadaran/pengetahuan masyarakat setempat terhadap isu liberalisasi perdagangan dan kerja sama ekonomi regional?
- Sejak Desember 2015, negara-negara anggota ASEAN telah bersepakat untuk meleburkan diri sebagai pasar dan basis produksi bersama dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing industri di daerah agar mampu bertahan di tengah regionalisasi ekonomi kawasan?
- Terkait One Village One Product (OVOP), strategi apa yang diterapkan Pemda dan pelaku usaha guna pengembangan produk-produk unggulan OVOP?
- Tantangan dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan OVOP?
- Sejauh ini bagaimana peran pemerintah daerah sebagai aktor utama diplomasi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi diplomasi tersebut. Dari segi sumber daya manusia, bagaimana kesiapan pemerintah daerah/otoritas setempat dalam mengelola kerjasama ekonomi luar negeri?
- Terkait pengelolaan kelapa sawit, upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri sawit dan memastikan implementasi pengolahan sawit secara berkelanjutan?
- Bagaimana visi pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia? Sejauh ini tantangan apa yang dihadapi dalam sinergi antara pusat dan daerah?
- Sejauh mana letak strategis Kalbar di perbatasan dan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PBLN) berpengaruh terhadap ekspor-impor, investasi asing atau mobilitas orang-barang dan jasa serta aliran modal asing?
- Bagaimana pemerintah Kalimantan Barat dan otoritas setempat mengelola dinamika di perbatasan (Entikong) terutama terkait dengan ancaman non-tradisional dan kejahatan transnasional seperti penyelundupan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia dan tenaga kerja ilegal?









**UPAYA PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
DI KALIMANTAN BARAT**

1. **Penumbuhan Wirausaha baru**
melalui pelatihan serta bantuan peralatan untuk mendorong masyarakat mengoptimalkan potensi daerah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
2. **Penguatan dan Pengembangan IKM**
Kegiatan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM, produksi, standarisasi maupun pemasaran produk IKM melalui :
 - a. Bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha IKM
 - b. Bantuan peralatan bagi industri kecil yang memiliki potensi untuk berkembang.

**UPAYA PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
DI KALIMANTAN BARAT**

2. **Penguatan dan Pengembangan IKM**
 - c. Mendorong pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP. 4 (empat daerah) telah mendapatkan penghargaan OVOP Tahun 2015 dari Menteri Perindustrian yaitu :
 - Kota Pontianak, untuk IKM Minuman Aloe vera
 - Kota Singkawang, untuk IKM Keramik Hias
 - Kab. Sanggau, untuk IKM Lempok Durian
 - Kab. Ketapang, untuk IKM Amplang
 - d. Fasilitasi standarisasi produk seperti sertifikasi halal, penyediaan label dan kemasan, SNI, sertifikasi GMP (Good Manufacturing Practices/Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik)
 - e. Fasilitasi pameran produk IKM didalam dan luar negeri

**UPAYA PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
DI KALIMANTAN BARAT**

3. Hilirisasi Komoditi Industri Unggulan

- Industri pengolahan di Kalimantan Barat sebagian besar masih bersifat industri hulu/antara, seperti industri kelapa sawit yang berjumlah 51 perusahaan hanya memproduksi CPO, baru 1 (satu) perusahaan yang memproduksi produk hilir berupa minyak goreng sawit.
- Pemprov Kalbar berupaya mendorong PTPN XIII sebagai BUMN yang bergerak dibidang industri pengolahan kelapa sawit untuk melakukan hilirisasi produk kelapa sawit.
- Industri pengolahan karet yang berjumlah 17 perusahaan baru memproduksi Crumb Rubber, sangat terbuka peluang untuk hilirisasi industri karet seperti Ban, sarung tangan karet, alat kesehatan, dll
- 2 (dua) Industri pengolahan bauksit di Kalbar baru memproduksi alumina, sangat memungkinkan untuk memproduksi sampai menjadi aluminium.

**UPAYA PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
DI KALIMANTAN BARAT**

4. Pembangunan Kawasan Industri

Saat ini beberapa sedang dipersiapkan pembangunan kawasan industri di Kalimantan Barat yaitu :

- Kawasan Industri Mandor (Kab. Landak)
- Kawasan Industri Ketapang (Kab. Ketapang)
- Kawasan Industri Tayan (Kab. Sanggau)
- Kawasan Industri Semparuk (Kab. Sambas)

5. Pembangunan dan Revitalisasi Sentra IKM

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya mendorong pembangunan Sentra IKM di setiap Kabupaten/Kota. Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM diatur melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Tahun 2016, telah dilakukan revitalisasi Sentra IKM di Kabupaten Sambas (IKM tenun) dan Kabupaten Kayong Utara.
- Tahun 2017, telah dialokasikan DAK Sentra IKM untuk Kabupaten Sambas dan Kabupaten Mempawah, serta kajian pembangunan sentra IKM di daerah kabupaten memiliki perbatasan antar negara.

Pengelolaan Sawit Berkelanjutan

Tujuh prinsip dan Kriteria ISPO yaitu :

1. Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan.
2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit.
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas.
6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.
7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

MATRIK JAWABAN AGENDA PEMBAHASAN

1.	Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi bagian kerangka kerjasama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Strategi apa yang diterapkan Pemerintah Daerah guna memaksimalkan manfaat dari kerjasama ekonomi regional tersebut?
	Jawaban :
2.	Bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang telah berjalan di bawah kerangka BIMP-EAGA?
	Jawaban :
3.	Sepanjang pengalaman Pemprov Kalimantan Barat dalam mengelola kerjasama ekonomi regional, tantangan apa saja yang dihadapi?
	Jawaban : Disperindag Dari sisi perdagangan Pihak Malaysia yang cenderung Mengedepankan Kesiapan Sarana PLBN Entikong Terlebih Dahulu , setelah itu baru mereka akan mempersiapkan daerah mereka yang berbatasan dengan PLBN Nanga Badau dan PLBN Aruk. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hasil Kertas Kerja Sosek Malindo Ke-32 (Point 3.2.3a/terlampir) Selain itu keinginan Indonesia (Kalbar) untuk menggunakan cara Goods-in Transits masih menemui kendala dan sedang dalam pembahasan oleh Pihak Malaysia (Sarawak) (Point 3.2.4/Terlampir)
4.	Saat ini konektivitas infrastruktur sub-regional mendapatkan perhatian tersendiri BIMP-EAGA. Dalam hal ini, <i>sub-regional connectivity</i> diharapkan mendukung terwujudnya <i>regional connectivity</i> di wilayah ASEAN sebagaimana yang termaktub dalam ASEAN Master Plan on Connectivity. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mendukung implementasi ASEAN Master Plan on Connectivity tersebut?
	Jawaban : Disperindag Keinginan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat agar dapat menjadi Hub ASEAN antara lain dengan merencanakan pendirian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di beberapa Kabupaten dan rencana mendirikan pusat logistik berikat oleh Pihak Swasta (Secara Alur Laut Kepulauan Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat Termasuk ALKI I – Hub Transportasi Utama Global)
5.	Pasal 69 ayat (2) UU MD3 memberikan amanat pelaksanaan fungsi diplomasi bagi DPR RI untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran apa yang diharapkan pemerintah daerah dari DPR RI dalam pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen yang dapat mendukung peningkatan daya saing daerah dalam liberalisasi perdagangan?
	Jawaban : Disperindag Keterlibatan Langsung mengenai kerjasama Ekonomi Regional Melalui Diplomasi Parlementer perlu terus ditingkatkan, sehingga dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam suatu Forum Pertemuan Regional
6.	Apakah ada saran/usulan kerangka legislasi yang dapat mendorong peran daerah dalam meningkatkan daya saing dalam kerangka kerjasama ekonomi antar negara?
	Jawaban :
7.	Bagaimana tingkat kesadaran/pengetahuan masyarakat setempat terhadap isu

	liberalisasi perdagangan dan kerja sama ekonomi regional?
	Jawaban :
8.	Sejak Desember 2015, negara-negara anggota ASEAN telah bersepakat untuk meleburkan diri sebagai pasar dan basis produksi bersama dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing industri di daerah agar mampu bertahan di tengah regionalisasi ekonomi kawasan?
	Jawaban :
9.	Terkait One Village One Product (OVOP), strategi apa yang diterapkan Pemda dan pelaku usaha guna pengembangan produk-produk unggulan OVOP?
	Jawaban :
10.	Tantangan dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan OVOP?
	Jawaban :
11.	Sejauh ini bagaimana peran pemerintah daerah sebagai aktor utama diplomasi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi diplomasi tersebut. Dari segi sumber daya manusia, bagaimana kesiapan pemerintah daerah/otoritas setempat dalam mengelola kerjasama ekonomi luar negeri?
	Jawaban :
12.	Terkait pengelolaan kelapa sawit, upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri sawit dan memastikan implementasi pengolahan sawit secara berkelanjutan?
	Jawaban : Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan daya saing industri sawit antara lain : 1. Melakukan perbaikan infrastruktur mulai dari perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan antar Kabupaten maupun antar Provinsi, meningkatkan pelayanan pelabuhan antara lain dengan dibukanya Border Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu dan Border Aruk di Kabupaten Sambas (yang belum lama ini di resmikan oleh Bapak Presiden Jokowi). Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat untuk mencapai kesuksesan program hilirisasi industri sawit tersebut seperti pasokan energi , penyediaan air bersih, sistem transportasi jalan, jembatan dan pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini mempunyai multiplier effect pada berbagai industri yang mendorong perbaikan ekonomi masyarakat. 2. Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengupayakan terbangunnya industri hilir yang nantinya akan berdampak terhadap berkembangnya daerah tersebut, mulai dari peningkatan ekonomi masyarakat setempat, penyerapan tenaga kerja, dan lainnya. Industri hilir minyak kelapa sawit dinilai tidak cepat berkembang akibat belum optimalnya insentif dan keberpihakan pemerintah. Kebijakan dan peraturan yang kurang tepat juga menyebabkan investasi di sektor hilir juga menurun oleh sebab itu saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajukan peninjauan

ulang terhadap produk-produk hukum yang tidak berpihak kepada investasi. Beragamnya regulasi di masing-masing daerah akibat otonomi juga dapat menghambat berkembangnya industri hilir tersebut. Sejauh ini pemanfaatan produk turunan CPO di Kalimantan Barat baru diolah sebagai minyak goreng oleh PT. Cahaya Kalbar (PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk.)

3. Upaya-upaya teknis yang dilakukan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat antara lain;
 - Melakukan Program Replanting (dengan memanfaatkan bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengalokasikan dana Rp 2,5 triliun untuk melakukan penanaman ulang (*replanting*) kebun sawit tahun ini).
 - Program penggantian Benih Palsu yang didukung melalui Dana APBD I dan APBN.
 - Pembinaan dan Penanggulangan Kebakaran lahan dan kebun (yang dilakukan melalui lintas sektoral antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan (SPORC), serta Badan yang membidangi Lingkungan Hidup Daerah.
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 584 TAHUN 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar untuk usaha Perkebunan di Kalimantan Barat.

Upaya-upaya peningkatan daya saing tersebut saat ini di Implementasikan untuk pengolahan sawit secara berkelanjutan melalui Penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015. Terdapat tujuh Prinsip ISPO dan beberapa kriteria praktis serta indikator yang menjadi acuan sertifikasi ISPO. Dalam ketentuannya Peraturan tersebut memiliki tujuh prinsip dan Kriteria ISPO yaitu :

1. Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan.
2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit.
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas.
6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.
7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

Sampai dengan saat ini Provinsi Kalimantan Barat telah memperoleh 11 unit Perusahaan yang telah memiliki sertifikasi ISPO dan 34 Perusahaan sedang dalam Proses Sertifikasi. Meskipun hal ini masih jauh dari target secara keseluruhan tapi upaya untuk mendorong perusahaan perkebunan untuk memiliki sertifikasi ISPO terus dilakukan. Antara lain dengan pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan yang setiap tahun dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten dan Provinsi di Kalimantan Barat.

Komitmen Bapak Gubernur Kalimantan Barat terhadap upaya-upaya mendorong keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan ditunjukkan dengan berbagai sosialisasi dan kunjungan ke negara-negara maju dan berkembang antara lain Meksiko, Brasil dan Amerika.

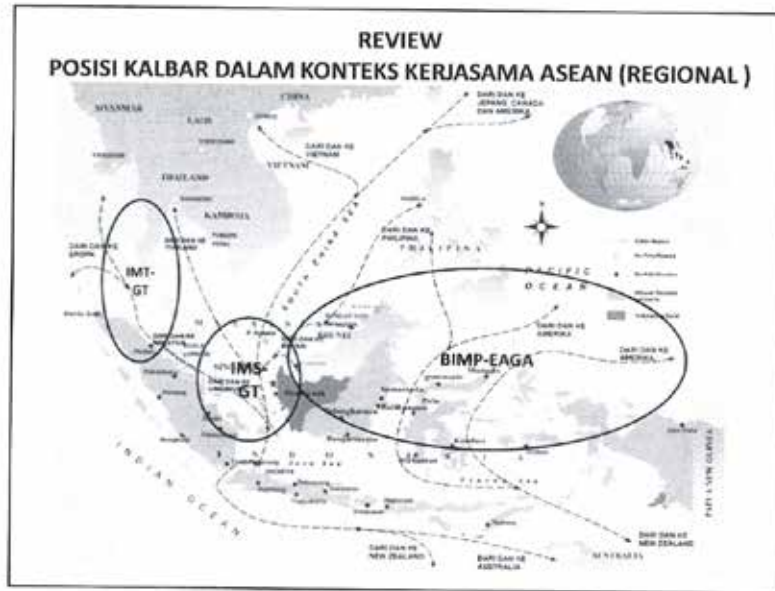
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah mencanangkan pembangunan hijau (*Green Growth*) ramah lingkungan berbasis komoditas. Program ini sebagai upaya mendukung Kontribusi Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi.

Dalam sesi *Empowering Innovation and Enhancing Climate Change Action for Sustainable Development* di ajang COP22 di Maroko, Gubernur Kalimantan Barat menyatakan, ada

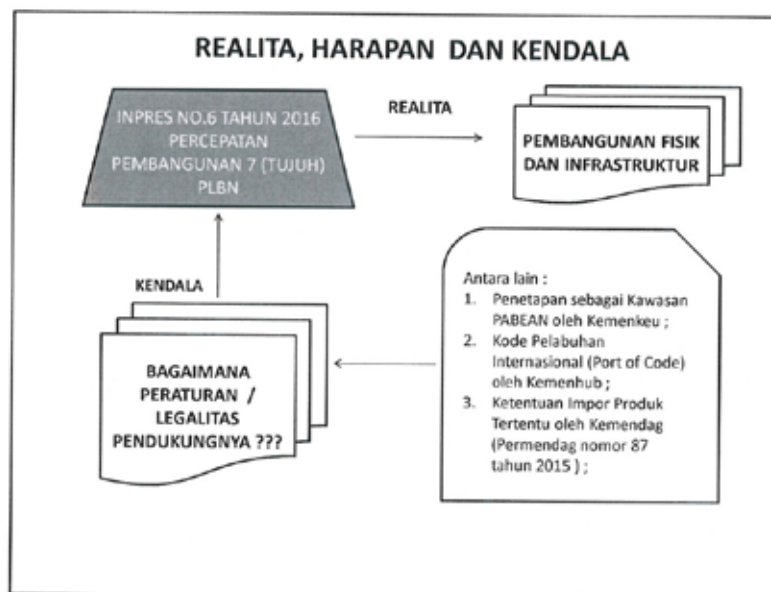
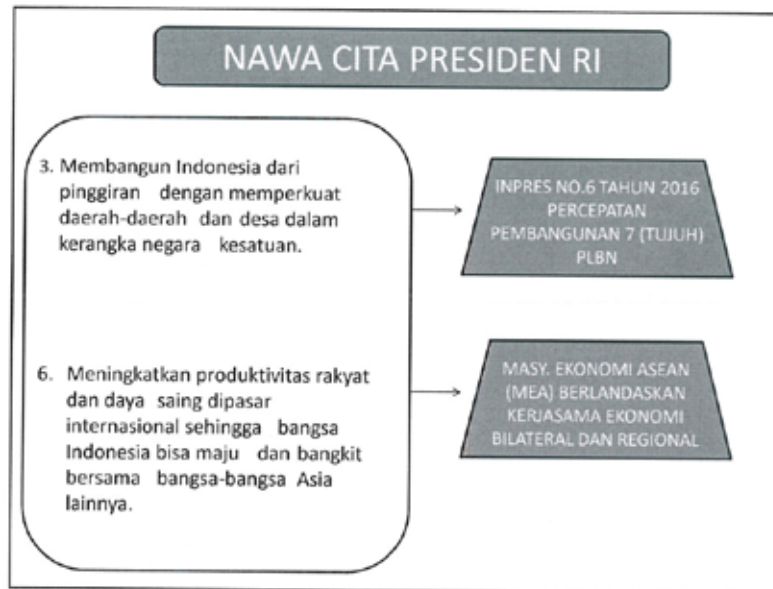
	<p>beberapa hal yang dilakukan Kalbar dalam upaya menurunkan emisi. Misalnya, memperkuat kesatuan pengelolaan hutan, mengendalikan penggunaan ruang dan tata kelola izin, serta membangun kemitraan dengan swasta, memastikan rantai pasok komoditas diproduksi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kalbar juga menjamin pembangunan rendah emisi yang inklusif dengan keterlibatan aktif masyarakat adat dan petani kecil.-</p>
13.	<p>Bagaimana visi pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia? Sejauh ini tantangan apa yang dihadapi dalam sinergi antara pusat dan daerah?</p>
	<p>Jawaban : Biro Pemerintahan</p> <p>“Terwujudnya Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Sebagai Kawasan Yang Aman, Tertib, Maju dan Sejahtera” merupakan visi pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengelola perbatasan pada saat belum dihapuskannya Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengelolaan kawasan perbatasan mengacu pada 2 (dua) Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 diatur mengenai Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.</p> <p>Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yakni pada Pasal 361 ayat :</p> <p>(2) Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan <i>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara</i>.</p> <p>(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan rencana detail tata ruang; pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan. <p>(8) Kewenangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Terhadap kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola kawasan perbatasan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum dijabarkan dalam aturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah) sehingga Pemerintah Daerah tidak memiliki kejelasan pemisahan kewenangan mengelola perbatasan berdasarkan tingkatan daerah.</p> <p>Guna melaksanakan kewenangan mengelola kawasan perbatasan sebagaimana UU Nomor 43 Tahun 2008, Pemerintah Pusat membentuk kelembagaan BNPP dan Badan Perbatasan di Daerah (Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal) melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Akan tetapi Kelembagaan Badan Perbatasan di daerah dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya yakni PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak mengakomodir pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun Pemerintah Kabupaten yang memiliki Badan Perbatasan tidak membentuk kembali lembaga dimaksud. Permasalahan kelembagaan inilah yang menjadi tantangan dan telah menjadi Perhatian Menteri Dalam Negeri sebagaimana Pokok-Pokok Penegasan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP pada Rapat Koordinasi Pengendalian Perbatasan Negara tanggal 17 Januari 2017 yang menegaskan “Perlu percepatan penyelesaian penyusunan PP tentang Pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Perbatasan Negara sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2008 dan pengaturan kewenangan Pemerintah di kawasan perbatasan, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dirasakan tidak</p>

	<p>secara tegas mengatur urusan pengelolaan perbatasan sebagai urusan konkuren sehingga dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak ada pembagian kewenangan pengelolaan perbatasan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten”.</p> <p>Jawaban : Disperindag</p> <p>Dari sisi Perdagangan Tantangan dan Kendala Terkait Sinergi Antara Pusat dan Daerah Lebih Cenderung kepada Masih Lambatnya Realisasi terhadap asas legalitas terhadap status Kawasan Pabean PLBN di Kalimantan Barat oleh Kementerian Terkait. Hal ini berakibat langsung terhadap kinerja Ekspor Impor melalui PLBN dan tentunya pada roda Ekonomi masyarakat di sekitar perbatasan/PLBN. Untuk itu diperlukan dukungan dalam mendorong segera diterbitkannya Legalitas Hukum terkait status Kawasan Pabean, Kode Pelabuhan Darat khususnya yang berada di Perbatasan Kalimantan Barat;</p> <p>Dukungan untuk mendorong segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pendukung dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya yang menyangkut perdagangan lintas batas (Ekspor dan Impor);</p>
14.	<p>Sejauh mana letak strategis Kalbar di perbatasan dan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PBLN) berpengaruh terhadap ekspor-impor, investasi asing atau mobilitas orang-barang dan jasa serta aliran modal asing?</p> <p>Jawaban :</p>
15.	<p>Bagaimana pemerintah Kalimantan Barat dan otoritas setempat mengelola dinamika di perbatasan (Entikong) terutama terkait dengan ancaman non-tradisional dan kejahatan transnasional seperti penyelundupan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia dan tenaga kerja illegal?</p> <p>Jawaban : Biro Pemerintahan</p> <p>Ancaman non-tradisional yang erat hubungannya dengan kejahatan transnasional seperti penyelundupan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia dan Tenaga Kerja Illegal dapat masuk ke wilayah Negara Indonesia melalui pintu lintas batas resmi (3 PLN Terpadu) maupun jalur tidak resmi. Oleh karena itu dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan yang ada di kawasan perbatasan memerlukan perhatian semua pihak baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten beserta unsur Kecamatan, Intansi vertikal dan aparat keamanan. Sebagai ilustrasi terhadap peredaran narkoba menjadi perhatian jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Sehubungan dengan itu Polda Kalimantan Barat telah melakukan pertemuan dengan Polisi Di Raja Malaysia (PDRM) di Kuching Malaysia. Rapat Koordinasi yang bertema “Mensyuarat Koordinasi (Rakor) Antara PDRM Malaysia Dengan Polri Kalbar ke-11 Tahun 2017” yang menghasilkan penandatanganan MoU Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Lintas Negara pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 yang dilaksanakan oleh masing-masing Pimpinan Kepolisian.</p>

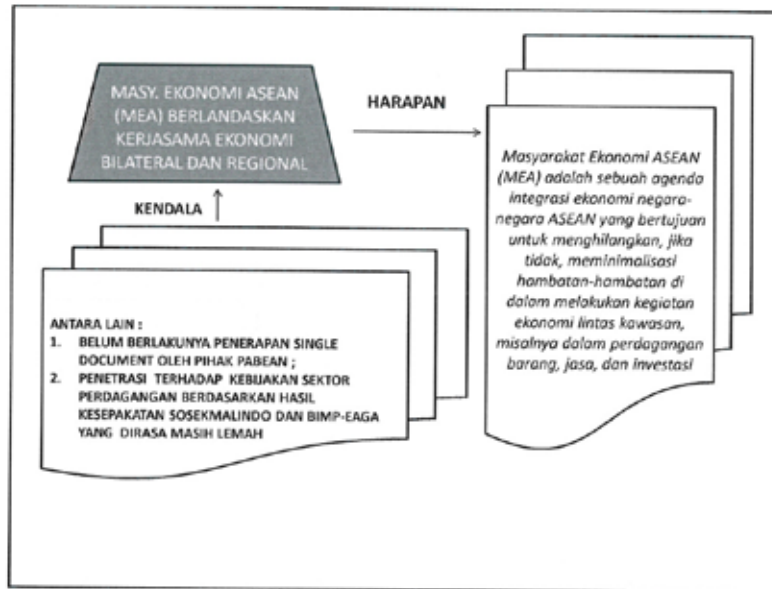
02-Aug-17



02-Aug-17



02-Aug-17



TANGGAPAN TERHADAP USULAN AGENDA PEMBAHASAN YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR PERDAGANGAN :

1. TANTANGAN DAN KENDALA TERKAIT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH LEBIH CENDERUNG KEPADA **MASIH LAMBATNYA REALISASI** TERHADAP ASAS LEGALITAS TERHADAP STATUS KAWASAN PABEAN PLBN DI KALBAR OLEH KEMENTERIAN TERKAIT . HAL INI BERAKIBAT LANGSUNG TERHADAP KINERJA EKSPOR IMPOR MELALUI PLBN DAN TENTUNYA PADA RODA EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR PERBATASAN / PLBN . UNTUK ITU DIPERLUKAN DUKUNGAN DALAM MENDORONG SEGERA DITERBITKANNYA LEGALITAS HUKUM TERKAIT STATUS KAWASAN PABEAN , KODE PELABUHAN DARAT KHUSUSNYA YANG BERADA DI PERBATASAN KALIMANTAN BARAT ;
2. DUKUNGAN UNTUK MENDORONG SEGERA DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PENDUKUNG DARI **UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014** TENTANG PERDAGANGAN, KHUSUSNYA YANG MENYANGKUT PERDAGANGAN LINTAS BATAS (EKSPOR DAN IMPOR) ;
3. KETERLIBATAN LANGSUNG MENGENAI KERJASAMA EKONOMI REGIONAL MELALUI **DIPLOMASI PARLEMENTER** PERLU TERUS DITINGKATKAN, SEHINGGA DAPAT MEMPERKUAT POSISI TAWAR INDONESIA DALAM SUATU FORUM PERTEMUAN REGIONAL ;

02-Aug-17

LAMPIRAN :
HASIL YANG TELAH DICAPAI

1. KERJASAMA BILATERAL (SOSEK MALINDO) ANTARA SARAWAK – KALIMANTAN BARAT

Kerjasama di bidang sosial ekonomi daerah perbatasan Malaysia (Sarawak dan Sabah) dengan Indonesia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur) yang disebut **Sosek Malindo**, diketuai oleh General Border Committee (GBC) di masing-masing negara yang di Indonesia adalah Panglima ABRI.

Di bawah GBC telah dibentuk pula kelompok kerja (KK) Sosek Malindo di tingkat propinsi/negeri yang ditujukan untuk:

- (a) menentukan proyek proyek pembangunan sosial ekonomi yang digunakan bersama,
- (b) merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan,
- (c) melaksanakan pertukaran informasi mengenai proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan bersama, dan
- (d) menyampaikan laporan kepada KK Sosek Malindo tingkat pusat mengenai pelaksanaan kerjasama pembangunan sosial ekonomi di daerah perbatasan.

*HASIL KK2 BIDANG EKONOMI, PERDAGANGAN DAN PERHUBUNGAN PADA SIDANG KE 32
TERLAMPIR*

NEGARA-NEGARA ASEAN TUJUAN EKSPOR KALBAR
(Nilai Juta USD)

REGION/NEGARA	Nilai : USD (juta)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ASEAN	202,4	58,6	55,2	87,4	92,1	80,0
- Malaysia	35,6	39,4	37,8	63,6	79,1	66,6
- Thailand	2,6	1,8	2,0	3,1	4,0	6,5
- Vietnam	8,5	3,7	2,8	6,0	4,3	4,1
- Singapura	155,7	13,7	12,4	14,8	4,5	2,6
- Myanmar	-	-	-	-	0,1	0,2
- Pilipina	-	-	-	-	0,1	0
- Brunai Darussalam	0,1	-	0,1	-	-	-

Sumber Data : Kemendag (diolah Disperindag Prov. Kalbar) . 2016

**PERANAN NEGARA ASEAN TERUTAMA (Thailand & Malaysia)MENINGKAT DLM
EKSPOR KALBAR**

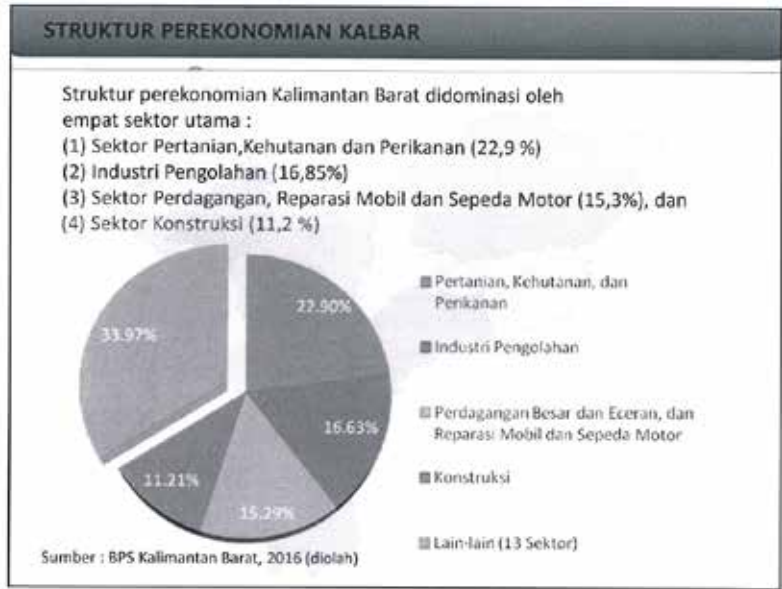
8

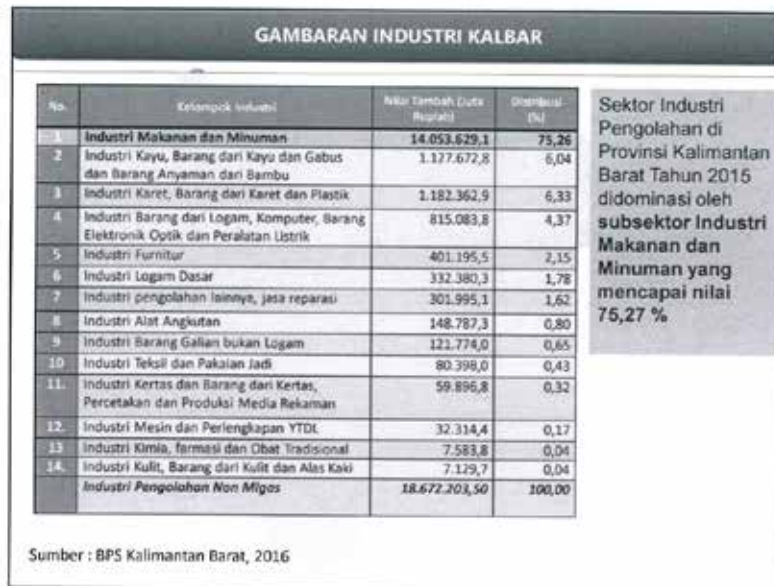
02-Aug-17

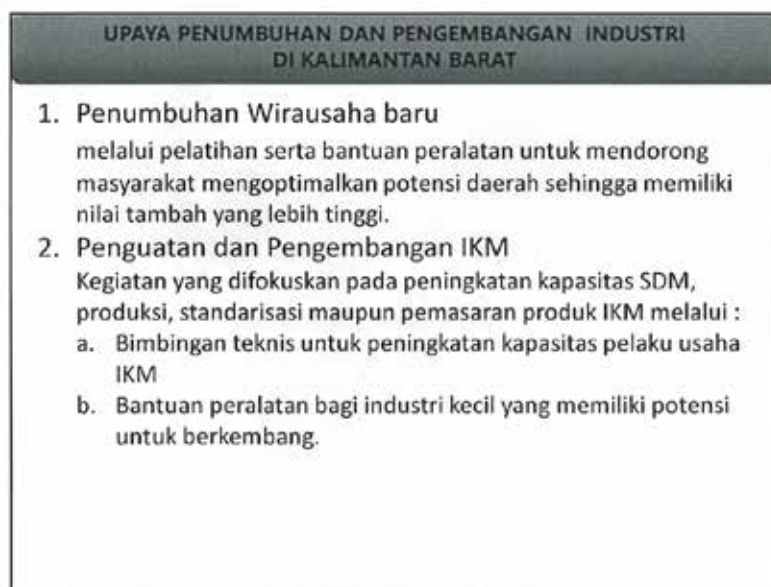
2. KERJASAMA REGIONAL BIMP - EAGA

- Kerja sama *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)* dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Davao City, Filipina pada tanggal 26 Maret 1994.
- Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA.
- **Para pelaku usaha** diharapkan menjadi motor penggerak kerja sama dimaksud sedangkan **pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator**.
- Wilayah Indonesia yang menjadi anggota BIMP-EAGA adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
- Pertemuan tertinggi BIMP-EAGA adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kemudian Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Tingkat Pejabat Senior, dan pertemuan teknis di bawah SOM. Pertemuan teknis di bawah SOM terdiri atas cluster dan task force, yaitu :
 - (a) Cluster on Natural Resources Development, diketuai oleh Indonesia
 - (b) Cluster on Transport, Infrastructure, and Information, Communication, and Technology Development (TIICTD), diketuai oleh Brunei Darussalam
 - (c) Cluster on Joint Tourism Development (JTD), diketuai Malaysia
 - (d) Cluster on Small and Medium Enterprises Development (SMED), diketuai oleh Filipina.
 - (e) Task Force on Customs, Immigration, Quarantine, and Security, diketuai oleh Filipina.
 - (f) Cluster investmen and trading (baru terbentuk)









**UPAYA PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
DI KALIMANTAN BARAT**

2. Penguatan dan Pengembangan IKM

- c. Mendorong pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP. 4 (empat daerah) telah mendapatkan penghargaan OVOP Tahun 2015 dari Menteri Perindustrian yaitu :
 - Kota Pontianak, untuk IKM Minuman Aloevera
 - Kota Singkawang, untuk IKM Keramik Hias
 - Kab. Sanggau, untuk IKM Lempok Durian
 - Kab. Ketapang, untuk IKM Amplang
- d. Fasilitasi standarisasi produk seperti sertifikasi halal, penyediaan label dan kemasan, SNI, sertifikasi GMP (Good Manufacturing Practices/Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik)
- e. Fasilitasi pameran produk IKM didalam dan luar negeri

**UPAYA PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
DI KALIMANTAN BARAT**

3. Hilirisasi Komoditi Industri Unggulan

- Industri pengolahan di Kalimantan Barat sebagian besar masih bersifat industri hulu/antara, seperti industri kelapa sawit yang berjumlah 51 perusahaan hanya memproduksi CPO, baru 1 (satu) perusahaan yang memproduksi produk hilir berupa minyak goreng sawit.
- Pemprov Kalbar berupaya mendorong PTPN XIII sebagai BUMN yang bergerak dibidang industri pengolahan kelapa sawit untuk melakukan hilirisasi produk kelapa sawit.
- Industri pengolahan karet yang berjumlah 17 perusahaan baru memproduksi Crumb Rubber, sangat terbuka peluang untuk hilirisasi industri karet seperti Ban, sarung tangan karet, alat kesehatan, dll
- 2 (dua) Industri pengolahan bauksit di Kalbar baru memproduksi alumina, sangat memungkinkan untuk memproduksi sampai menjadi aluminium.

**UPAYA PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
DI KALIMANTAN BARAT**

4. Pembangunan Kawasan Industri

Saat ini beberapa sedang dipersiapkan pembangunan kawasan industri di Kalimantan Barat yaitu :

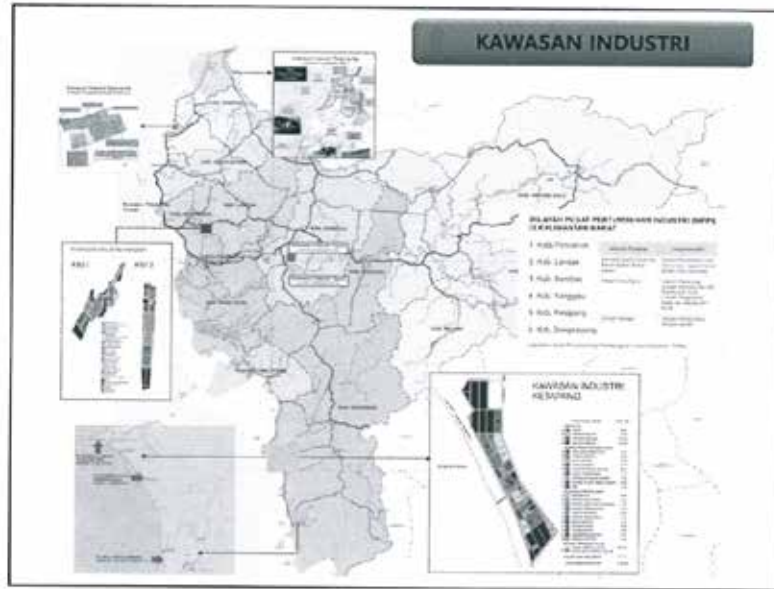
- Kawasan Industri Mandor (Kab. Landak)
- Kawasan Industri Ketapang (Kab. Ketapang)
- Kawasan Industri Tayan (Kab. Sanggau)
- Kawasan Industri Semparuk (Kab. Sambas)

5. Pembangunan dan Revitalisasi Sentra IKM

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya mendorong pembangunan Sentra IKM di setiap Kabupaten/Kota. Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM diatur melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Tahun 2016, telah dilakukan revitalisasi Sentra IKM di Kabupaten Sambas (IKM tenun) dan Kabupaten Kayong Utara.
- Tahun 2017, telah dialokasikan DAK Sentra IKM untuk Kabupaten Sambas dan Kabupaten Mempawah, serta kajian pembangunan sentra IKM di daerah kabupaten memiliki perbatasan antar negara.

DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN KALIMANTAN BARAT

1. Percepatan pembangunan kawasan industri di Kalimantan Barat membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat khususnya dalam pembangunan fisik sarana dan prasarana kawasan industri.
2. Penumbuhan wirausaha baru dan pembangunan Sentra IKM terutama di daerah perbatasan
3. Dukungan kebijakan guna menjamin ketersediaan bahan baku industri di daerah, seperti yang terjadi saat ini maraknya ekspor buah kelapa menyebabkan industri lokal kekurangan bahan baku. Untuk itu perlu adanya



PERTANYAAN DARI DPR RI

Terkait pengelolaan kelapa sawit, upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri sawit dan memastikan implementasi pengolahan sawit secara berkelanjutan ?

JAWABAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan daya saing industri sawit antara lain :

1. Melakukan perbaikan infrastruktur mulai dari perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan antar Kabupaten maupun antar Provinsi, meningkatkan pelayanan pelabuhan antara lain dengan dibukanya Border Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu dan Border Aruk di Kabupaten Sambas (yang belum lama ini di resmikan oleh Bapak Presiden Jokowi). Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat untuk mencapai kesuksesan program hilirisasi industri sawit tersebut seperti pasokan energi , penyediaan air bersih, sistem transportasi jalan, jembatan dan pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini mempunyai multiplayer effect pada berbagai industri yang mendorong perbaikan ekonomi masyarakat.
2. Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengupayakan terbangunnya industri hilir yang nantinya akan berdampak terhadap berkembangnya daerah tersebut, mulai dari peningkatan ekonomi masyarakat setempat, penyerapan tenaga kerja, dan lainnya. Industri hilir minyak kelapa sawit dinilai tidak cepat berkembang akibat belum optimalnya insentif dan keberpihakan pemerintah. Kebijakan dan peraturan yang kurang tepat juga menyebabkan investasi di sektor hilir juga menurun oleh sebab itu saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajukan peninjauan ulang terhadap produk-produk hukum yang tidak berpihak kepada investasi. Beragamnya regulasi di masing-masing daerah akibat otonomi juga dapat menghambat berkembangnya industri hilir tersebut. Sejauh ini pemanfaatan produk turunan CPO di Kalimantan Barat baru diolah sebagai minyak goreng oleh PT. Cahaya Kalbar (PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk.)
3. Upaya-upaya teknis yang dilakukan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat antara lain;
 - Melakukan Program Replanting (dengan memanfaatkan bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengalokasikan dana Rp 2,5 triliun untuk melakukan penanaman ulang (*replanting*) kebun sawit tahun ini).
 - Program penggantian Benih Palsu yang didukung melalui Dana APBD I dan APBN.
 - Pembinaan dan Penanggulangan Kebakaran lahan dan kebun (yang dilakukan melalui lintas sektoral antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan (SPORC), serta Badan yang membidangi Lingkungan Hidup Daerah.
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 584 TAHUN 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar untuk usaha Perkebunan di Kalimantan Barat.

Upaya-upaya peningkatan daya saing tersebut saat ini di implementasikan untuk pengolahan sawit secara berkelanjutan melalui Penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015. Terdapat tujuh Prinsip ISPO dan beberapa kriteria praktis serta indikator yang menjadi acuan sertifikasi ISPO. Dalam ketentuannya Peraturan tersebut memiliki tujuh prinsip dan Kriteria ISPO yaitu :

1. Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan.
2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit.
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas.
6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.
7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

Sampai dengan saat ini Provinsi Kalimantan Barat telah memperoleh 11 unit Perusahaan yang telah memiliki sertifikasi ISPO dan 34 Perusahaan sedang dalam Proses Sertifikasi. Meskipun hal ini masih jauh dari target secara keseluruhan tapi upaya untuk mendorong perusahaan perkebunan untuk memiliki sertifikasi ISPO terus dilakukan. Antara lain dengan pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan yang setiap tahun dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten dan Provinsi di Kalimantan Barat.

Komitmen Bapak Gubernur Kalimantan Barat terhadap upaya-upaya mendorong keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan ditunjukkan dengan berbagai sosialisasi dan kunjungan ke negara-negara maju dan berkembang antara lain Meksiko, Brasil dan Amerika.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah mencanangkan pembangunan hijau (*Green Growth*) ramah lingkungan berbasis komoditas. Program ini sebagai upaya mendukung Kontribusi Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi.

Dalam sesi *Empowering Innovation and Enhancing Climate Change Action for Sustainable Development* di ajang COP22 di Maroko, Gubernur Kalimantan Barat menyatakan, ada beberapa hal yang dilakukan Kalbar dalam upaya menurunkan emisi. Misalnya, memperkuat kesatuan pengelolaan hutan, mengendalikan penggunaan ruang dan tata kelola izin, serta membangun kemitraan dengan swasta, memastikan rantai pasok komoditas diproduksi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kalbar juga menjamin pembangunan rendah emisi yang inklusif dengan keterlibatan aktif masyarakat adat dan petani kecil.-

Sekian.-

LAMPIRAN

Laporan Kunjungan Delegasi
Badan Kerjasama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Untuk
menindaklanjuti Resolusi-Resolusi
*Asean Inter-Parliamentary
Assembly (AIPA) Dan Asia Pacific
Parliamentary Forum (APPF)*
Terkait Integrasi Regional dan
Regionalisme Ekonomi

Stockholm - Swedia, 3-9 Desember 2017





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

LAPORAN
KUNJUNGAN DELEGASI BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MENINDAKLANJUTI RESOLUSI-RESOLUSI *ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)* DAN *ASIA PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM (APPF)* TERKAIT
INTEGRASI REGIONAL DAN REGIONALISME EKONOMI

STOCKHOLM – SWEDIA, 3 – 9 DESEMBER 2017

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) merupakan Alat Kelengkapan DPR RI (AKJ) yang bertugas menjalankan diplomasi parlemen, sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Ayat (1) UU RI No. 42 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang menerangkan bahwa tugas BKSAP antara lain: membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

Untuk melaksanakan mandat tersebut, BKSAP dapat mengambil peran dalam diplomasi ekonomi yang merupakan prioritas diplomasi Indonesia saat ini. Diplomasi Parlemen dilakukan pula untuk mendukung DPR RI dalam melakukan peran pengawasan atas kerjasama ekonomi yang diambil pemerintah agar selalu berpegang pada visi kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks regional, BKSAP senantiasa berupaya berkontribusi ikut menyukseskan visi ekonomi pemerintah melalui kerja sama antar parlemen baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Sebagai negara yang terkemuka di kawasan, Indonesia mendukung penuh perdagangan bebas regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan di awal tahun 2016 dan kerja sama ekonomi dalam kerangka Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Salah satu program kerja BKSAP adalah melakukan kunjungan sebagai *follow up* bagi resolusi-resolusi yang telah disepakati DPR RI dalam kerangka AIPA dan APPF.

Sidang Umum ke-38 ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* pada tanggal 14 - 20 September 2017 di Manila, Filipina, menghasilkan beberapa resolusi di bidang ekonomi yakni: *Resolution on Supporting the Implementation of Financial Inclusion Programs in ASEAN*; *Resolution on Promoting an Inclusive and Innovation-Led Growth for the ASEAN Economic Community (AEC)*; dan *Resolution on Intra-Regional Economic Cooperation for Equitable Development and Inclusive Growth in the ASEAN Economic Community*.

Sidang Tahunan ke-25 *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* yang diselenggarakan pada tanggal 13-20 Januari 2017 di Nadi, Fiji, menghasilkan beberapa resolusi di bidang ekonomi yakni: *Resolution on Commercial and Economic Matters Asia Pacific Economic Cooperation Forum (APEC 2016)*; *Resolution on Promoting Sustainable Economic Growth in the Asia Pacific Region through the Digital Economy*; dan *Resolution on Economic and Trade Cooperation in the Asia Pacific Region*.

Kunjungan terutama ditujukan bagi menelaah tantangan integrasi regional dan liberalisasi perdagangan dalam kerangka regionalisme ekonomi.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi Badan Kerja sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindak lanjut Resolusi-resolusi ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* dan *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* terkait kerja sama ekonomi regional pada tanggal 3 – 9 Desember 2017 ke Stockholm didasarkan atas Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 17/PIMP/II/2017-2018 tertanggal 20 November 2017.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan kerja BKSAP DPR RI dalam konteks kerja sama regional adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi negara-negara di kawasan Eropa terkait integrasi regional serta strategi yang diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut.
2. Memperoleh gambaran mengenai daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam konteks integrasi regional melalui perspektif negara mitra wicara ASEAN.
3. Meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama antar-parlemen dengan negara-negara yang tergabung dalam kerangka kerja sama ekonomi di wilayah Asia Pasifik.
4. Memperbarui komitmen Indonesia terhadap penguatan dan peningkatan kerja sama regional.

5. Bertukar pandangan (*sharing best practices*) terkait tugas-tugas keparlemenan yang meliputi penyusunan legislasi, anggaran, dan pengawasan, terutama yang berhubungan dengan kerja sama regional.

III. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindak Lanjuti Resolusi-resolusi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) adalah sebagai berikut:



- | | |
|---|--|
| 1. Yth. Bapak H. Rofi' Munawar, Lc | Ketua Delegasi / Wakil Ketua BKSAP/
F-PKS |
| 2. Yth. Bapak Dave Akbarshah Fikarno, ME | Wakil Ketua Panja KER/ F- PG |
| 3. Yth. Bapak Ir. Nazarudin Kiemas | Anggota/ F- PDI-P |
| 4. Yth. Ibu Vanda Sarundajang | Anggota/ F- PDI-P |
| 5. Yth. Bapak H. Hasnuryadi Sulaiman | Anggota/ F- PG |
| 6. Yth. Bapak Andika Pandu Puragabaya,
S.Psi, M.Si, M.Sc | Anggota/ F- P. GERINDRA |
| 7. Yth. Bapak H. Jon Erizal, SE., MBA | Anggota/ F- PAN |
| 8. Yth. Bapak H. Abdul Kadir Karding,
S.Pi.,M.Si. | Anggota/ F- PKB |
| 9. Yth. Bapak Drs. H. Mahfuz Sidik, M.Si | Anggota/ F- PKS |
| 10. Yth. Bapak H. Achmad Fariat | Anggota/ F- PPP |
| 11. Yth. Bapak Mukhtar Tompo, S.Psi | Anggota/ F- P.Hanura |

IV. SEKILAS MENGENAI SWEDIA



Populasi	: 9,9 juta jiwa
Luas Wilayah	: 450.295 km ²
Bentuk Pemerintahan:	Monarki Konstitusional
Raja	: Carl XVI Gustaf
Perdana Menteri	: Stefan Löfven (Partai Sosial Demokrat)
Ketua Parlemen	: Urban Ahlin (Partai Sosial Demokrat)
GDP (total)	: USD 497 Milyar (2016)
GDP (per-kapita)	: USD 49,800 (2016)

Swedia memiliki tiga level pemerintah yaitu nasional, regional dan lokal. Selain itu, terdapat juga pemerintahan di level Eropa sejak Swedia bergabung menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 1995.

Bentuk pemerintahan Swedia adalah demokrasi parlementer, yang berarti bahwa semua kekuatan publik berasal dari masyarakat. Di tingkat nasional, rakyat diwakili oleh Riksdag (parlemen Swedia) yang memiliki kekuasaan legislatif. Pemerintah menerapkan keputusan Riksdag dan menyusun proposal untuk undang-undang baru atau amandemen undang-undang. Swedia juga memiliki tiga level pemerintah yaitu nasional, regional dan lokal. Selain itu, terdapat juga pemerintahan di level Eropa sejak Swedia bergabung menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 1995.

Pada tingkat nasional, kekuasaan legislatif dipegang oleh *Riksdag* (parlemen pusat). Pemerintah pusat terdiri dari Perdana Menteri dan kementerian. Selain itu, terdapat sekitar 400 lembaga pemerintah pusat dan lembaga administrasi publik. Daftar menteri yang menjabat terdapat dalam Lampiran 1 laporan ini.

Pada tingkat daerah, Swedia terbagi atas 290 pemerintah kota (*kommuner*) dan 20 pemerintah regional (*län*). Antara pemerintah kota dan pemerintah regional tidak terdapat hubungan hirarki karena masing-masing memiliki kewenangan untuk memerintah bagi dirinya sendiri (*self-governed*).

Politik Dalam Negeri

Pemilihan umum untuk anggota parlemen pusat dan daerah diadakan setiap empat tahun. Pada setiap pemilihan umum, lebih dari 90% warga negara Swedia memberikan suaranya, namun persentase ini turun menjadi 84% pada pemilihan umum tahun 2010.

Partai Sosial Demokrat (the Social Democrat/Social Demokraterna) adalah partai terbesar di Riksdag sejak 1917. Partai ini selalu merupakan partai yang memerintah, dan antara tahun 1932 dan 2006, partai ini berada di oposisi hanya selama 9 tahun.

Pemerintah pusat pada saat ini terdiri atas Perdana Menteri, yaitu Stefan Löfven dan 23 Menteri. Pemerintahan periode ini terbentuk dari koalisi Partai Sosial Demokrat (S) dan Partai Lingkungan (MP).

Politik Luar Negeri dan Pertahanan

Selama 200 tahun terakhir, Swedia dalam keadaan damai dan tidak terlibat dalam peperangan. Perang terakhir yang dialami Swedia telah berakhir pada tahun 1814. Sejak tahun 1945, Swedia mempertahankan politik pertahanannya yaitu non-aliansi dan netral pada saat perang. Karena kebijakan pertahanan netral inilah, Swedia bukan merupakan anggota NATO.

Swedia merupakan negara anggota Uni Eropa sejak 1995 dan anggota Schengen. Selain itu, negara ini adalah supporter terbesar yang menginginkan agar Uni Eropa memperluas keanggotaannya.

Dalam lingkup PBB, Swedia selalu merupakan salah satu negara yang memberikan kontribusi terbesar secara staf dan keuangan

Ekonomi

Swedia memiliki kebijakan ekonomi terbuka yang tergantung pada ekspor.

Produk engineering mencakup lebih dari separuh ekspor Swedia yaitu sebanyak hampir 54%. Alat elektronik, mesin dan kendaraan bermotor adalah produk terpenting dalam kategori ini. Produk ekspor dengan pertumbuhan tercepat adalah barang elektronik, termasuk alat komunikasi dan produk terkait komputer. Produk engineering juga mencakup bagian terbesar dari impor Swedia – hampir mencapai 49% dari total impor. Kategori impor kedua terbesar adalah produk kimia, diikuti dengan produk makanan, tekstil/pakaian, mineral, minyak dan produk petroleum.

Mayoritas perdagangan yang dilakukan Swedia adalah dengan negara industri lainnya. Pada tahun 1997, 75% dari ekspornya ditujukan ke negara-negara Eropa. Hampir 90% perdagangan luar negeri Swedia dilakukan dengan negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dimana negara-negara ini juga memasok proporsi impor dengan jumlah serupa. Perdagangan dengan negara berkembang hanya mencakup kurang dari 1/10 dari keseluruhan perdagangan luar negeri Swedia.

Negara Uni Eropa mencakup hampir 60% partner ekspor Swedia, sementara 70% dari impor yang dilakukan Swedia datang dari atau melalui Uni Eropa. Persentase ini meningkat sejak Swedia menjadi anggota Uni Eropa pada 1 Januari 1995. Berikut adalah negara partner perdagangan terbesar Swedia, berdasarkan urutan jumlah ekspor: Jerman; Inggris Raya; Norwegia; Amerika Serikat.

Hubungan Bilateral Indonesia dengan Swedia

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Swedia dimulai pada tahun 1952. Setelah Perjanjian Damai Aceh ditandatangani pada tahun 2005, hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia kembali normal yang ditandai dengan ditempatkannya kembali Duta Besar RI di Stockholm pada tahun 2006.

Sejak tahun 2008, Indonesia dan Swedia memiliki kerja sama di bidang HAM, termasuk perlindungan anak dan peningkatan HAM dalam lembaga pemasyarakatan. Kerjasama ini didukung dengan lembaga nirlaba Swedia, Raoul Wallenberg.

Selain itu, kerjasama kedua negara juga dilakukan melalui organisasi internasional non-pemerintah, di antaranya dengan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA International). Organisasi ini bergerak di bidang reformasi dan proses demokrasi. Melalui Surat Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2013, Indonesia menjadi anggota IDEA International yang berkedudukan di Stockholm.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke Swedia pada tanggal 27-29 Mei 2013 atas undangan Raja Carl Gustaf VI. Kunjungan ini menghasilkan penandatanganan kesepakatan berikut:

- MoU on Cooperation in the field of Sustainable Urban Development through SymbioCity and Green City Concepts.
- Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden concerning Health Cooperation.
- Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden regarding Science, Technology and Innovation.
- Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden on Environmental Cooperation.

Dialog HAM antara Indonesia dan Swedia dimulai pada tahun 2008, yang dibuka secara resmi di Jakarta oleh Menlu RI Hassan Wirajuda dan Menlu Swedia, Carl Bildt. Dialog ini adalah sebagai dasar untuk berbagai kerjasama di bidang HAM antara kedua negara.

V. HASIL KUNJUNGAN

Selama kunjungan kerja ke Stockholm, delegasi Panja Kerja Sama Ekonomi Regional mengadakan sejumlah pertemuan antara lain dengan Committee of Foreign Affairs – The Parliament of Sweden, Committee of Trade and Industry – The Parliament of Sweden, Ministry of Research and Education, dan Swedish Governmental Agency for Innovation Systems – VINNOVA.

Pertemuan dengan Committee of Foreign Affairs – the Parliament of Sweden



Pada pertemuan dengan Committee of Foreign Affairs – The Parliament of Sweden, BKSAP mendiskusikan mengenai perjanjian perdagangan bebas dan kebijakan Swedia terkait liberalisasi perdagangan. Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Swedia, Kenneth G. Forslund menyampaikan bahwa sebagai negara yang sangat berorientasi pada ekspor dan memiliki kebijakan ekonomi yang sangat terbuka, Swedia sangat mendukung pembentukan Free Trade Agreement dengan berbagai negara. Tercatat nilai ekspor Swedia pada tahun 2016 mencapai \$147,3 miliar dan mitra dagang terbesar saat ini adalah negara-negara anggota OECD. Swedia menyambut baik kunjungan BKSAP dan memandang kunjungan ini sebagai langkah awal intensifikasi kerja sama perdagangan dengan Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang terkemuka di kawasan ASEAN. Dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, Swedia memandang sebagai langkah yang strategis untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antar kawasan.

Swedia sangat mendorong penyelesaian perundingan Indonesia – EU CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement). Berkaca dari *Comprehensive Economic and Trade Agreement between the EU and Canada (CETA)* yang saat ini tengah dalam proses ratifikasi di Parlemen Swedia, perjanjian tersebut telah mampu meningkatkan ekspor Swedia ke Kanada secara signifikan dan membuka lapangan kerja baru bagi penduduk Swedia. Diharapkan Indonesia – EU CEPA akan memberikan manfaat sejenis bagi Indonesia dan Swedia. Terutama karena kebijakan perdagangan Swedia merupakan implementasi dari kebijakan di tingkat supranasional yaitu Uni Eropa.

Selain kerja sama perdagangan, dalam pertemuan ini dibahas pula berbagai isu-isu bilateral yang menjadi perhatian kedua negara. Swedia merupakan negara yang mengutamakan ekonomi hijau, teknologi, inovasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.



Terdapat pula pertanyaan mengenai komitmen Indonesia terkait hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup terutama dalam industri kelapa sawit. Delegasi BKSAP menyampaikan bahwa Indonesia sangat serius dalam membenahi industri kelapa sawit. Selain tengah membahas RUU Perkelapasawitan sebagai payung hukum pembenahan industri ini dari hulu hingga ke hilir, DPR RI juga mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat standarisasi Crude Palm Oil (CPO) melalui penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Dalam hal standarisasi sebenarnya ISPO telah dapat disejajarkan dengan RSPO yang menjadi standar preferensi negara-negara Uni Eropa karena kriteria ISPO telah mencakup aspek legalitas, tanggung jawab sosial dan praktik bisnis yang berlaku secara universal.

Selanjutnya, Pemerintah RI juga melakukan langkah korektif secara terus menerus dan konsisten mengenai moratorium perluasan lahan untuk kelapa sawit, skema kolaborasi antara pemerintah dan swasta, restorasi lahan gambut dan praktik pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pertemuan dengan Committee on Trade and Industry– the Parliament of Sweden

Dalam pertemuan dengan Committee on Trade and Industry, delegasi BKSAP membicarakan mengenai kerja sama ekonomi regional ASEAN dan Uni Eropa serta kerja sama ekonomi bilateral. Swedia menyambut baik pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan memandang posisi strategis Indonesia di kawasan dapat membantu ekspansi kerja sama perdagangan Swedia dengan negara-negara anggota ASEAN.



Swedia merupakan pula negara yang sangat mementingkan inovasi dan pengembangan teknologi. Dalam pertemuan dengan Ministry of Education and Research, ditekankan bahwa kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penentu keberlanjutan tradisi inovasi di Swedia. Inovasi diatur melalui undang-undang. Sekitar 3,5 persen investasi publik dan swasta diarahkan untuk riset dan pengembangan.

Pertemuan dengan Kementerian Pendidikan dan Penelitian Swedia

Kementerian Pendidikan dan Penelitian Swedia bertanggung jawab atas kebijakan Pemerintah di bidang pendidikan, penelitian dan pemberdayaan generasi muda Swedia. Kementerian tersebut bertujuan agar Swedia menjadi negara penelitian terkemuka di mana penelitian dan inovasi dilakukan dengan standar yang tinggi dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan masyarakat dan daya saing industri. Di bidang penelitian, tugas utama Kementerian ini adalah menetapkan kebijakan dengan tujuan dan arahan sesuai dengan Undang-Undang tentang Riset.

Kementerian Pendidikan dan Penelitian Swedia juga melakukan kerja sama internasional di bidang penelitian, salah satunya melalui program Horizon 2020. Horizon 2020 merupakan instrumen utama dan kerangka kerjasama penelitian dan inovasi internasional di Uni Eropa. Melalui program Horizon 2020 ini, Kementerian Pendidikan dan Penelitian Swedia hendak memperkuat keunggulan penelitian, meningkatkan daya saing ekonomi dan industri, serta mengatasi tantangan masyarakat global. Swedia telah berpartisipasi aktif dalam kerangka kerja sama penelitian Horizon 2020 misalnya pengembangan metode evaluasi kemitraan publik-swasta, penyelarasan dan koordinasi program penelitian antar negara, evaluasi terhadap skema hibah litbang bisnis dan pendanaan proyek yang pada berbasis kinerja. Jumlah aplikasi penelitian dari Swedia tercatat sebanyak 13.946 aplikasi dengan tingkat keberhasilan hingga 15,5%. Pemerintah Swedia sendiri merupakan kontributor program Horizon 2020 terbesar ke-8 di Uni Eropa.



Tidak dipungkiri bahwa dukungan pendanaan menjadi salah satu faktor pendukung utama riset dan pengembangan teknologi. Swedia memusatkan manajemen pendanaan riset dan pengembangan teknologi dalam satu badan bentukan pemerintah yaitu Swedish Governmental Agency for Innovation Systems – VINNOVA.

Pertemuan dengan Swedish Governmental Agency for Innovation Systems – VINNOVA

VINNOVA didirikan pada bulan Januari 2001, oleh pemerintah Swedia sebagai badan pemerintah yang membidangi kebijakan tentang inovasi. Misi VINNOVA adalah mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan cara menumbuhkan iklim inovasi serta mempersiapkan pendanaan bagi penelitian dan pengembangan teknologi yang didorong oleh kebutuhan. Visi VINNOVA adalah agar Swedia menjadi negara terdepan di dunia dalam penelitian dan inovasi, serta menjadi pilihan yang terbaik untuk berinvestasi dan melakukan bisnis. Oleh karena itu, VINNOVA mempromosikan kolaborasi antara perusahaan, universitas, lembaga penelitian dan sektor publik. VINNOVA melakukan ini dengan cara merangsang penelitian pengembangan, melakukan investasi jangka panjang dalam pengembangan atmosfer penelitian dan inovasi yang kuat, mengembangkan VINNOVA sebagai katalis ajang pertemuan diantara institusi-institusi tersebut.



VINNOVA adalah sebuah lembaga pemerintah Swedia yang bekerja di bawah Kementerian Perindustrian, Energi dan Komunikasi dan bertindak sebagai ujung tombak pemerintah Swedia dalam Program Uni Eropa dalam Kerangka Kerja Riset dan Pengembangan Teknologi. VINNOVA berperan besar untuk mendukung terciptanya pasar baru dan eksploitasi komersial yang terinspirasi dari hasil penelitian dan pengembangan di lembaga tersebut. VINNOVA memegang peran penting untuk memenuhi tantangan sosial dan meningkatkan daya saing jangka panjang Swedia melalui lima program kolaborasi strategis, yaitu: teknologi transportasi, ekonomi berbasis lingkungan, ilmu hayat, smart city, dan kolaborasi antara industri manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan pemula yang inovatif, perusahaan IT dan telekomunikasi yang telah mapan. Setiap tahun, VINNOVA menginvestasikan sekitar SEK 3 miliar untuk mendorong inovasi. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan melalui seleksi proposal di mana perusahaan, sektor publik dan organisasi lainnya mengajukan permintaan pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi mereka.

VINNOVA juga melakukan penguatan kerja sama dengan lembaga pemodal riset dan inovasi internasional. VINNOVA bertanggung jawab atas kerjasama internasional di bawah kerja sama bilateral dengan negara-negara lain. Bentuk kerja sama diselenggarakan melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara mitra. Jaringan kerja sama internasional VINNOVA meliputi benua Amerika, Eropa dan Asia. DI Asia, VINNOVA bekerja sama dengan Jepang, India dan Cina terutama di bidang ICT dan inovasi bio-teknologi yang ramah lingkungan.

VI. LAIN-LAIN

A. Briefing dengan Duta Besar RI untuk Swedia

Pada pertemuan ini, Ketua Delegasi, Bapak H. Rofi' Munawar, Lc., menyampaikan terima kasih kepada Duta Besar RI untuk Swedia, Bapak Bagas Hapsoro, SH., MA., atas sambutan terhadap Delegasi Panja KER.



Pada kesempatan ini pula, Dubes RI menyampaikan secara singkat poin-poin penting hubungan bilateral Indonesia – Swedia dan hal-hal apa yang dapat diangkat untuk di diskusikan dengan Parlemen Swedia. Dubes RI juga menyampaikan permintaan

Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons (PFSALW) untuk bertemu dengan Delegasi Panja KER pada tanggal 7 Desember 2017.

B. Pertemuan dengan Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons

Melalui KBRI Swedia, Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons (PFSALW) meminta waktu untuk bertemu delegasi Panja Kerja Sama Ekonomi Regional pada tanggal 7 Desember 2017. Pertemuan bertempat di KBRI Swedia. PFSALW diwakili oleh *General Secretary*, Karin Olofsson, dan *Program Officer*, Fausto Octavio Brindis Abraham. Maksud dari pertemuan ini adalah sebagai *outreach* mengenai visi misi PFSALW dan program yang tengah dijalankan.



Proses pembentukan PFSALW sejak tahun 1999 dan merupakan sebuah inisiatif parlemen bagi menciptakan platform untuk tindakan bersama dalam mengatasi SALW. Forum ini resmi berdiri pada tahun 2002 di Parlemen Spanyol dan saat ini merupakan satu-satunya jaringan global anggota parlemen yang secara khusus didedikasikan untuk masalah pengendalian senjata dan pencegahan kekerasan. Saat ini lebih dari 200 anggota parlemen yang tersebar di 80 negara telah bergabung menjadi anggota PFSALW. Anggota parlemen dari Indonesia maupun negara anggota ASEAN lainnya saat ini belum ada yang menjadi anggota Forum ini.

Dalam pertemuan ini, Karin Olofsson menyampaikan pula mengenai rencana PFSALW untuk mengadakan seminar regional pada bulan April 2018 mengenai “*Connecting the dots: Supporting the 2030 Agenda, the Arms Trade Treaty and the United Nations Program of Action on Small Arms Implementation through increased parliamentary engagement action in international processes*” bekerja sama dengan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA). Proses kerja sama saat ini baru dalam tahap *expression of interest* dan komunikasi awal dengan Sekjen AIPA. Menyikapi hal

tersebut, delegasi menyarankan PFSALW untuk mengirimkan surat mengenai organisasi mereka ke BKSAP DPR RI termasuk mengenai komunikasi yang dilakukan dengan Sekjen AIPA.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Delegasi Panja KER telah menjalankan tugas sesuai dengan misi dari kunjungan dan telah mendapatkan sejumlah informasi yang bermanfaat mengenai kebijakan ekonomi Swedia yang sangat berorientasi pada ekspor dan mendukung pembentukan Free Trade Agreement dengan berbagai negara. Swedia merupakan pula negara yang sangat mementingkan inovasi dan pengembangan teknologi dimana kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penentu keberlanjutan tradisi inovasi di Swedia.
2. Sempat disinggung pula mengenai penyelesaian perundingan Indonesia – EU *CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement)* yang pada September 2017 lalu telah melalui tahap ketiga perundingan. Swedia mengungkapkan harapannya bahwa Indonesia – EU *CEPA* akan mendorong volume ekspor kedua negara dan menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk ke ASEAN. Untuk kawasan Asia Tenggara, saat ini EU juga tengah menunggu ratifikasi EU – Viet Nam Free Trade Agreement.
3. Hal lain yang perlu digarisbawahi dalam kunjungan ini adalah kebijakan Swedia mengenai pengembangan riset dan teknologi dimana VINNOVA berperan besar untuk mendukung terciptanya pasar baru dan eksploitasi komersial yang terinspirasi dari hasil penelitian dan pengembangan teknologi baru. Komitmen Swedia juga ditunjukkan melalui besarnya investasi yang di salurkan yakni sekitar SEK 3 miliar untuk mendorong inovasi.

B. Saran

1. Kebijakan yang berorientasi pada pengembangan riset dan teknologi dapat diadopsi oleh Indonesia, dalam hal ini BKSAP sebaiknya mengkomunikasikan hasil kunjungan kepada Komisi X yang membidangi pendidikan dan Komisi VII yang membidangi riset dan teknologi.
2. Menjaga *image* mengenai Indonesia dan memperbaiki persepsi masyarakat dunia masih menjadi tugas besar bagi perwakilan-perwakilan RI di luar negeri. Dalam hal ini baik KBRI sebagai ujung tombak diplomasi ekonomi pemerintahan Joko Widodo maupun atase perdagangan yang secara tradisional memiliki tugas pokok untuk memperkuat performa perdagangan luar negeri Indonesia selayaknya berperan lebih aktif dalam mengkampanyekan posisi terkini terutama terkait

penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi komoditas unggulan Indonesia.

VIII. PENUTUP

Demikian pokok-pokok Laporan Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindak lanjut Resolusi-resolusi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* dan *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* terkait integrasi regional dan regionalisme ekonomi pada tanggal 3 – 9 Desember 2017 ke Stockholm. Diharapkan dari kunjungan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja BKSAP. Atas nama Delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 2¹ Desember 2017

KETUA DELEGASI,



ROFI MUNAWAR

A - 115

